



**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN KONSERVATISME  
AKUNTANSI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK  
PADA SEKTOR PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI  
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  
PERIODE 2017-2021**

Skripsi

Dibuat oleh :

Dewi Ratna Ningsih  
0221 19 032

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR  
MEI 2023**



**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN KONSERVATISME  
AKUNTANSI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK  
PADA SEKTOR PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI  
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  
PERIODE 2017-2021**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA., CCSA.,  
CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE)

The stamp is circular and contains the text 'FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS' at the top and 'UNIVERSITAS PAKUAN' at the bottom. In the center is a smaller version of the university's emblem. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN KONSERVATISME  
AKUNTANSI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK  
PADA SEKTOR PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI  
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  
PERIODE 2017-2021**

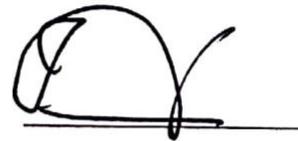
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari Kamis, 25 Mei 2023

Dewi Ratna Ningsih  
0221 19 032

Disetujui

Dosen Penguji Sidang  
(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M., CA)



Ketua Komisi Pembimbing  
(Dr. Antar M.T Sianturi., Ak., MBA., CA., QIA., CGCAE)



Anggota Komisi Pembimbing  
(Haqi Fadillah, S.E., M.Ak., BKP., CertDA., CAP)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Ratna Ningsih  
NPM : 0221 19 032  
Judul Skripsi : Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017- 2021

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Mei 2023



Dewi Ratna Ningsih  
0221 19 032

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2023**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

DEWI RATNA NINGSIH. 022119032. Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. Di bawah bimbingan: AN TAR M.T SIANTURI dan HAQI FADILLAH. 2023.

Penghindaran pajak adalah skema penghindaran pajak secara legal yang dilakukan perusahaan untuk meminimumkan beban pajak dengan memanfaatkan kekurangan dari peraturan pajak yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

Metode penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan populasi sebanyak 133 perusahaan, dan sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 34 perusahaan dengan 5 tahun pengamatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah verifikatif dengan metode *explanatory survey*. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi data panel menggunakan program *Eviews 9*, metode statistik menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, kemudian dilanjutkan dengan uji regresi data panel dan uji hipotesis berupa uji t, uji F, dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara, konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: ukuran perusahaan, konservatisme akuntansi, penghindaran pajak.

## PRAKATA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, allhamdulillahirobbil alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA SEKTOR PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021”

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan kelulusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penulis membutuhkan usaha dan kerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun, skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan bantuan orang-orang yang berada disekitar penulis. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan, kecerdasan, dan jalan agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Umi dan kakak penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam menyusun penelitian ini.
3. Bapak Prof. Dr. Pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. selaku Rektor Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
6. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., MSi., CMA., CAPM., CAP. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
7. Ibu Enok Rusmanah, S.E., M.Acc. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
8. Bapak Dr. Antar M.T Sianturi., Ak., MBA., CA., QIA., CGCAE selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Bapak Haqi Fadillah, S.E., M.Ak., BKP., CertDA., CAP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menerapkan ilmu tersebut untuk menyusun penelitian ini.

11. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan yang secara tidak langsung sudah membantu penulis untuk menyelesaikan proposal penelitian ini.
12. Teman-teman penulis di kelas A, kelas B, dan kelas ekstensi angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu. Terima kasih karena telah membantu penulis memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan proposal penelitian ini.
13. Teman-teman satu bimbingan baik dengan ketua komisi maupun anggota komisi yang telah bersedia *sharing* pengalamannya selama bimbingan.
14. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan karena sudah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan edutrip sekaligus seminar proposal di Malaysia pada tanggal 06-09 Januari 2023.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis memanjatkan doa untuk semua pihak yang disebutkan atau pihak lain yang sudah membantu namun tidak disebutkan, semoga mendapatkan pahala dan barokah dari Allah SWT, Aamiin aamiin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bogor, Mei 2023

Dewi Ratna Ningsih

## DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK .....	vi
PRAKATA .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah .....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	8
1.2.2 Perumusan Masalah .....	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	9
1.3.1 Maksud Penelitian .....	9
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Kegunaan Penelitian .....	10
1.4.1 Kegunaan Praktik .....	10
1.4.2 Kegunaan Akademik .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1 Pajak .....	11
2.1.1 Pengertian Pajak .....	11
2.1.2 Fungsi Pajak .....	12
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak .....	12
2.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak .....	13
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak .....	14
2.2 Ukuran Perusahaan .....	15
2.2.1 Pengertian Ukuran Perusahaan .....	15
2.2.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan .....	16
2.2.3 Pengukuran Ukuran Perusahaan .....	17
2.3 Konservatisme Akuntansi .....	18
2.3.1 Pengertian Konservatisme Akuntansi .....	18
2.3.2 Konservatisme Akuntansi Dalam IFRS .....	19
2.3.3 Jenis-Jenis Konservatisme Akuntansi .....	22
2.3.4 Pengukuran Konservatisme Akuntansi .....	23
2.4 Penghindaran Pajak .....	23
2.4.1 Pengertian Penghindaran Pajak .....	23
2.4.2 Strategi Penghindaran Pajak .....	25
2.4.3 Pengukuran Penghindaran Pajak .....	27
2.5 Penelitian Terdahulu .....	27

2.6	Kerangka Pemikiran.....	33
2.6.1	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak .....	33
2.6.2	Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak ....	33
2.6.3	Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak.....	34
2.7	Hipotesis Penelitian .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>36</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	36
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	36
3.2.1	Objek Analisis .....	36
3.2.2	Unit Analisis .....	36
3.2.3	Lokasi Penelitian.....	36
3.2.4	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	37
3.3	Operasionalisasi Variabel.....	37
3.4	Metode Penarikan Sampel.....	38
3.5	Metode Pengumpulan Data .....	39
3.6	Metode Analisis Data.....	39
3.6.1	Metode Estimasi Regresi Data Panel .....	40
3.6.2	Analisis Statistik Deskriptif .....	41
3.6.3	Pemilihan Model Regresi Data Panel .....	41
3.6.4	Uji Asumsi Klasik.....	42
3.6.5	Analisis Regresi Linear Berganda.....	44
3.6.6	Uji Hipotesis .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>46</b>
4.1	Hasil Pengumpulan Data.....	46
4.2	Kondisi Ukuran Perusahaan, Konservatisme Akuntansi, dan Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 .....	47
4.2.1	Kondisi Ukuran Perusahaan pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 .....	47
4.2.2	Kondisi Konservatisme Akuntansi pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 .....	49
4.2.3	Kondisi Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 .....	52
4.3	Analisis Statistik Deskriptif.....	54
4.4	Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	55
4.3.1	Uji Chow .....	55
4.3.2	Uji Hausman .....	56
4.3.3	Uji Lagrange Multiplier .....	56
4.5	Uji Asumsi Klasik.....	58
4.5.1	Uji Normalitas .....	58
4.5.2	Uji Multikolinearitas .....	58

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas .....	59
4.5.4 Uji Autokorelasi .....	59
4.6 Analisis Regresi Linear Berganda.....	60
4.7 Uji Hipotesis .....	62
4.7.1 Uji t .....	62
4.7.2 Uji F .....	63
4.7.3 Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	63
4.8 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian .....	64
4.8.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 .....	64
4.8.2 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 .....	66
4.8.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 .....	67
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
5.1 Simpulan .....	69
5.2 Saran.....	69
5.2.1 Bagi Praktisi .....	69
5.2.1 Bagi Akademisi .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 : Realisasi Pendapatan Negara Indonesia.....	1
Tabel 2.1 : Klasifikasi Ukuran Perusahaan .....	17
Tabel 2.2 : Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 2.3 : Matriks Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1 : Operasionalisasi Variabel .....	38
Tabel 3.2 : Pertimbangan Penarikan Sampel .....	38
Tabel 3.3 : Daftar Sampel yang Memenuhi Pertimbangan Penelitian .....	39
Tabel 4.1 : Prosedur Pemilihan Sampel .....	46
Tabel 4.2 : Daftar Nama Perusahaan Sampel.....	46
Tabel 4.3 : Data Perhitungan Ukuran Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 .....	47
Tabel 4.4 : Data Perhitungan Konservatisme Akuntansi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 .....	50
Tabel 4.5 : Data Perhitungan Penghindaran Pajak Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 .....	52
Tabel 4.6 : Uji Statistik Deskriptif .....	54
Tabel 4.7 : Uji Chow .....	55
Tabel 4.8 : Uji Hausman .....	56
Tabel 4.9 : Uji Lagrange Multiplier (LM) .....	57
Tabel 4.10 : Hasil Uji Model Regresi Data Panel .....	57
Tabel 4.11 : Uji Normalitas.....	58
Tabel 4.12 : Uji Multikolinearitas .....	59
Tabel 4.13 : Uji Heteroskedastisitas.....	59
Tabel 4.14 : Uji Autokorelasi.....	60
Tabel 4.15 : Analisis Regresi Linear Berganda .....	61
Tabel 4.16 : Uji t .....	62
Tabel 4.17 : Uji F .....	63
Tabel 4.18 : Koefisien Determinasi (Adjusted R <sup>2</sup> ) .....	64
Tabel 4.19 : Hasil Hipotesis Penelitian .....	68

## DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 1.1 : Rata-Rata Ukuran Perusahaan, Konservatisme Akuntansi, dan Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 .....	5
Gambar 2.1 : <i>Roadmap</i> Konvergensi IFRS Terhadap PSAK .....	20
Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.1 : Grafik Perhitungan Ukuran Perusahaan pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 .....	49
Gambar 4.2 : Grafik Perhitungan Konservatisme Akuntansi pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 .....	51
Gambar 4.3 : Grafik Perhitungan Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 .....	53
Gambar 4.4 : Grafik Rata-Rata Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 .....	65
Gambar 4.5 : Grafik Rata-Rata Konservatisme Akuntansi dan Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 .....	66

## DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran 1 : Transformasi Perusahaan yang Termasuk Dalam Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi (JASICA) ke IDX-IC.....	76
Lampiran 2 : Perhitungan Ukuran Perusahaan pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.....	79
Lampiran 3 : Perhitungan Konservatisme Akuntansi pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.....	84
Lampiran 4 : Perhitungan Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.....	88

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Ayat (1) UU KUP). Pajak memiliki peranan penting bagi negara karena digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dalam melahirkan masyarakat yang adil dan makmur baik secara fisik maupun psikis sesuai dengan dasar dan konstitusi negara. Pajak merupakan donasi terbesar bagi pendapatan negara. Penerimaan pajak selalu berada pada posisi teratas dalam menyumbangkan pendapatan negara. Hal ini dapat terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Indonesia

Sumber Penerimaan – Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)		
	2019	2020	2021
I. Penerimaan	1.955.110,00	1.628.950,53	1.733.042,80
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,90	1.285.136,32	1.375.832,70
Penerimaan Bukan Pajak	408.994,30	343.814,21	357.210,10
II. Hibah	5.497,30	18.832,82	2.700,00
Jumlah	1.960.633,60	1.647.783,34	1.735.742,80

Sumber: <https://www.bps.go.id>, 2022

Dari tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2021 penerimaan pajak memiliki porsi yang cukup besar dalam pendapatan negara yakni sebesar Rp1.375.832,70 miliar atau setara dengan 79,26% dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak hanya sebesar Rp357.210,10 miliar atau 20,58% dan berasal dari hibah sebesar Rp2.700 miliar atau 0,16% oleh karena itu negara terus berusaha untuk menambah pendapatan terutama dari penerimaan pajak.

Dalam penerapannya, pajak memiliki dua pandangan yang berbeda antara negara dengan perusahaan. Bagi negara pajak sangat krusial dalam pembangunan negara. Namun bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang dapat menurunkan profit perusahaan karena apabila profit yang dihasilkan oleh perusahaan besar maka beban pajak yang harus dibayarkan juga besar. Apabila beban pajak yang harus dibayarkan besar, otomatis akan mengurangi laba perusahaan atau laba ditahan. Oleh karena itu seorang manajer perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimumkan pembayaran pajak atau pajak terutangnya.

Akibat perbedaan pandangan di atas, menimbulkan perlawanan terhadap pajak. Pohan (2013) ada dua bentuk perlawanan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan yang

terjadi karena kondisi yang berada di sekitar wajib pajak tersebut. Jadi perlawanan pasif bukan merupakan ide dari wajib pajak sendiri, tetapi bisa berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, serta sistem pemungutan pajak itu sendiri. Sedangkan, perlawanan secara aktif merupakan perlawanan yang sengaja dilakukan oleh wajib pajak yang ditunjukkan langsung terhadap fiskus untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan secara aktif bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti penghematan pajak (*tax saving*), penggelapan pajak (*tax evasion*), dan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghematan pajak (*tax saving*) merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara menahan diri atau tidak membeli produk yang mengandung pajak, bisa juga dengan mengurangi jam kerja agar penghasilannya menjadi kecil dan bisa terbebas dari beban pajak yang besar. Sedangkan, penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam memangkas pajak. Upaya ini merupakan tindakan ilegal karena melanggar ketentuan perpajakan contohnya adalah menambahkan beban perusahaan secara palsu agar laba bersih perusahaan terlihat kecil sehingga beban pajak yang dibayarkan pun akan sedikit. Selanjutnya ada penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan skema penghindaran pajak secara legal yang dilakukan perusahaan untuk meminimumkan beban pajak dengan memanfaatkan kekurangan dari peraturan pajak yang berlaku (Pohan, 2013).

Apabila dilihat dari praktiknya, terdapat beberapa contoh praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak seperti memanfaatkan prosedur depresiasi aset. Padahal pada hakikatnya, aset tidak mengalami depresiasi yang signifikan atau nilainya meningkat. Tetapi dengan memanfaatkan sistem tersebut perusahaan dapat menghindari kewajiban pajak yang melekat pada pertambahan nilai aset yang dimiliki (Prabandaru, 2019). Selain contoh di atas, cara lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam upaya penghindaran pajak adalah dengan skema *transfer pricing* seperti yang terjadi pada PT Adaro Energy Tbk. Sejak tahun 2009-2017, Adaro diduga telah melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International. Adaro diduga melakukan perencanaan pajak dengan berbagai cara agar hanya membayar beban pajak sebesar US\$ 125 juta atau Rp 1,75 triliun lebih rendah dibandingkan yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Menurut Yustinus Prastowo selaku pengamat perpajakan (Sugianto, 2019) menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Adaro ini termasuk dalam *tax avoidance* bukan *tax evasion* karena memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual kembali ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi sehingga pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih rendah. Menurutnya, walaupun tindakan itu tidak melanggar hukum namun tetap saja tidak baik untuk dilakukan karena perusahaan mencari profit dengan sumber daya di Indonesia tetapi penerimaan pajak yang didapat negara tidak penuh.

Secara hukum penghindaran pajak memang tidak dilarang meskipun sering mendapatkan sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena memiliki konotasi yang negatif. Namun tetap saja praktik penghindaran pajak ini merugikan negara seperti yang disampaikan oleh Tax Justice Network yang menyatakan bahwa pada tahun 2020, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar atau sebanding dengan Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak. Kerugian ini berasal dari penghindaran pajak badan sebesar US\$ 4,78 miliar atau Rp 67,6 triliun yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang memindahkan labanya ke negara yang dipandang sebagai *tax haven* agar laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan terlihat kecil, akibatnya beban pajak yang dibayarkan juga lebih kecil dari yang seharusnya. Sedangkan, sisanya sebesar US\$ 78,83 juta atau sebanding dengan Rp 1,1 triliun, berasal dari penghindaran pajak orang pribadi yang tergolong ber harta dengan cara menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri agar terhindar dari jangkauan hukum (Santoso, 2020).

Akibat banyaknya perusahaan yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak, maka banyak peneliti yang tertarik untuk meneliti penghindaran pajak di Indonesia. Selviani et al. (2019) salah satu faktor yang diduga menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengelompokkan suatu perusahaan ke dalam kelompok besar atau kecil berdasarkan total asetnya.

Siregar & Widyawati (2016) semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, menunjukkan bahwa semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal ini akan digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan yang ada. Dewi dan Noviri (2017) perusahaan dengan skala besar umumnya membayar pajak lebih rendah dibandingkan perusahaan berskala kecil. Hal ini karena, perusahaan dengan skala besar akan memiliki sumber daya manusia yang mampu membuat perencanaan pajak yang baik agar dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Sedangkan, perusahaan yang berskala kecil akan kesulitan meminimalkan beban pajaknya karena minimnya tenaga ahli dalam bidang perpajakan.

Selain ukuran perusahaan, perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi dalam laporannya juga diduga merupakan salah satu faktor perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan laba dan meminimalkan beban pajak. Konservatisme akuntansi merupakan suatu teknik di mana apabila perusahaan memperoleh laba atau keuntungan maka tidak akan diakui sebagai aset yang terlalu besar, namun sebaliknya jika perusahaan mengeluarkan biaya atau kerugian maka perusahaan akan lebih cepat mengakuinya tanpa harus menunggu didapatkannya bukti nyata. Sehingga cara ini diduga bisa membantu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak tanpa melanggar peraturan

perpajakan. Pilihan konservatif biasanya akan membuat aset dan pendapatan tidak terlihat terlalu besar.

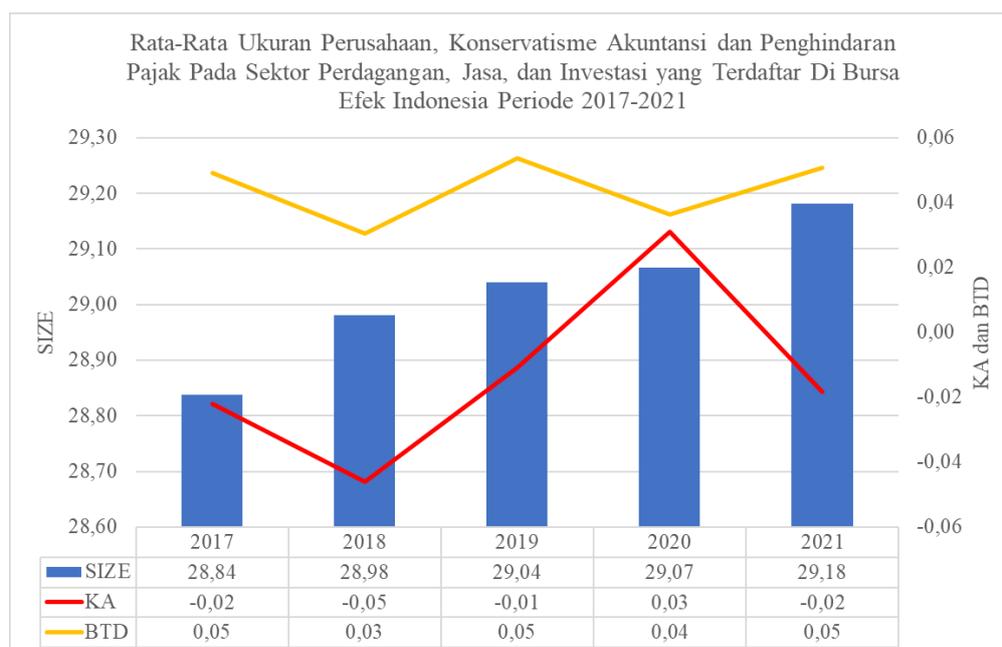
Salah satu contoh konservatisme akuntansi dari sisi beban adalah metode penyusutan saldo menurun ganda. Metode penyusutan ini akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih konservatif dibandingkan metode garis lurus karena pada awal masa penyusutan, beban penyusutan menghasilkan kos yang tinggi (Sumarlin & Firdaus, 2018). Selain itu, metode saldo menurun ganda tidak diatur dalam perpajakan. Berdasarkan UU Pajak Penghasilan Pasal 11 ayat (1), metode penyusutan yang diperbolehkan dalam perpajakan adalah metode garis lurus dan saldo menurun. Sehingga apabila perusahaan menggunakan metode saldo menurun ganda sebagai metode penyusutan aset tetap, maka perusahaan tersebut wajib melakukan rekonsiliasi fiskal atas beda waktu.

Salah satu contoh konservatisme akuntansi dari sisi pendapatan adalah metode pengakuan pendapatan. Perusahaan yang mencatat pendapatan dengan metode *cash basis* dianggap lebih konservatif dibandingkan *accrual basis* karena pendapatan akan dicatat saat pendapatan diterima atau dibayarkan (Andriana, 2021). Salah satu perusahaan yang termasuk dalam sektor perdagangan yaitu PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) mengakui pendapatan atas penjualan barang pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang kepada pelanggan, baik pada saat penyerahan barang, atau dalam hal barang disimpan di gudang perusahaan atas permintaan pelanggan. Sedangkan, pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) merupakan salah satu perusahaan dalam sektor jasa mengakui pendapatan jasa pada saat jasa tersebut telah diserahkan. Kemudian, pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT MNC Investama Tbk (BHIT) merupakan salah satu perusahaan dalam sektor investasi, mengakui pendapatan dari jasa pengelolaan investasi dan jasa penasehat investasi pada saat jasa diberikan sesuai dengan ketentuan kontrak. Sedangkan, untuk pendapatan jasa penjamin emisi efek diakui pada saat aktivitas penjaminan emisi secara substansial telah selesai dan jumlah pendapatan telah dapat ditentukan.

Penerapan prinsip konservatisme akuntansi menyebabkan perusahaan merancang tidak adanya laba dan bergegas mengakui terjadinya kerugian. Prinsip ini secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan, di mana laporan keuangan yang dibentuk nantinya akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak manajemen (Rosdiani & Hidayat, 2020). Sederhananya konservatisme diinterpretasikan sebagai kehati-hatian, sehingga dengan kehati-hatian ini maka laporan keuangan cenderung bersifat pesimisme.

Sektor perdagangan, jasa, dan investasi merupakan sektor yang terdiri dari sub sektor perdagangan besar barang produksi, perdagangan eceran, restoran, hotel dan pariwisata, *advertising*, *printing* dan perangkatnya, kesehatan, jasa komputer dan perangkatnya, perusahaan investasi, serta lainnya. Sektor perdagangan, jasa, dan

investasi memiliki sumbangan yang cukup besar bagi negara. Pada akhir bulan Oktober 2022, sektor perdagangan mendorong pertumbuhan ekonomi terbesar ke dua setelah sektor manufaktur. Sektor ini tumbuh mencapai 64,4% dibandingkan tahun lalu dan memiliki kontribusi sebesar 24,8% terhadap penerimaan pajak dilanjutkan oleh sektor jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh mencapai 64,4% dibandingkan tahun lalu dan memiliki kontribusi sebesar 10,6% terhadap penerimaan pajak (Hariani, 2022). Adapun pada tahun 2021 merupakan pemecahan rekor bagi perdagangan Indonesia. Pada tahun 2021, ekspor Indonesia mencapai US\$ 209,16 miliar atau naik sebesar 42,62% dibandingkan tahun lalu. Menurut Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan mengatakan bahwa pada periode ini, Indonesia mengalami surplus US\$ 34,32 miliar. Apabila kondisi ini konsisten, maka pada periode ini Indonesia akan mengalami surplus berkisar US\$ 36-37 miliar. Jumlah ini merupakan jumlah tertinggi dibandingkan tahun 2011 (Sandi, 2022). Dalam penelitian ini, jumlah populasi pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi periode 2017-2021 berjumlah 133 perusahaan dan yang terpilih menjadi sampel penelitian adalah 34 perusahaan. Berikut disajikan grafik data mengenai rata-rata ukuran perusahaan, konservatisme akuntansi dan penghindaran pajak yang diproksikan dengan *BTD (Book Tax Differences)*.



Sumber: data diolah penulis, 2022

Gambar 1.1 Rata-rata ukuran perusahaan, konservatisme akuntansi, dan penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021

Berdasarkan gambar 1.1, menunjukkan bahwa angka penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi tidak konsisten. Pada tahun 2017 rata-rata penghindaran pajak cukup tinggi yakni sebesar 0,05 dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebesar 0,03 ini menunjukkan bahwa perusahaan pada sektor ini diduga

melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh nilai BTD yang tinggi, menandakan bahwa tingkat penghindaran pajak juga tinggi. Pada tahun 2018 rata-rata penghindaran pajak sebesar 0,03, rata-rata ini cukup rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2017 sebesar 0,05, ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak pada sektor ini berkurang. Namun pada tahun 2019 rata-rata penghindaran pajak naik kembali yang sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 0,03, pada tahun 2019 naik menjadi 0,05, ini menunjukkan bahwa perusahaan pada sektor ini diduga melakukan praktik penghindaran pajak kembali. Pada tahun 2020 rata-rata penghindaran pajak turun kembali dibandingkan tahun sebelumnya 2019 sebesar 0,05, pada tahun 2020 turun menjadi 0,04, ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak pada sektor ini berkurang. Namun pada tahun 2021, praktik penghindaran pajak kembali naik dari tahun sebelumnya karena memiliki rata-rata penghindaran pajak yang tinggi yakni sebesar 0,05. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan BTD yaitu selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal dibagi total aset. Handayani & Rachmawati (2022) semakin tinggi nilai BTD maka semakin tinggi dugaan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini karena apabila laba fiskal lebih kecil atau tidak sama dengan laba akuntansi maka akan menghasilkan nilai BTD yang tinggi. Laba fiskal yang lebih kecil atau tidak sama dengan laba akuntansi mengindikasikan bahwa perusahaan berupaya melakukan perencanaan pajak untuk menghasilkan laba fiskal yang rendah karena hal ini akan berdampak pada pembayaran pajak yang rendah juga.

Berdasarkan gambar 1.1, diduga adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi dengan memanfaatkan ukuran perusahaan sebagai alat penghindaran pajak karena rata-rata ukuran perusahaan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat juga dari rata-rata ukuran perusahaan dengan rata-rata penghindaran pajak yang tidak konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2017 rata-rata ukuran perusahaan sebesar 28,84 sedangkan, rata-rata penghindaran pajaknya sebesar 0,05. Kemudian pada tahun 2018 rata-rata ukuran perusahaan naik menjadi 28,98 dengan rata-rata penghindaran pajak yang turun menjadi 0,03 dan pada tahun 2019 rata-rata ukuran perusahaan naik kembali menjadi 29,04 begitupun dengan rata-rata penghindaran pajak sebesar 0,05. Pada tahun 2020 terus naik menjadi 29,07 sedangkan, rata-rata penghindaran pajaknya turun menjadi 0,04 dan pada tahun 2021 rata-rata ukuran perusahaan naik lagi menjadi 29,18 begitupun dengan rata-rata penghindaran pajak yakni sebesar 0,05. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dari logaritma natural total aset. Fauziah & Kurnia (2021) semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar juga ukuran dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang berskala besar cenderung memiliki pendapatan yang besar dan mempunyai sumber daya yang mumpuni untuk dapat melakukan perencanaan pajak yang baik sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan gambar 1.1, diduga adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi dengan memanfaatkan konservatisme akuntansi sebagai alat penghindaran pajak karena rata-rata konservatisme akuntansi yang tinggi mendekati nilai positif. Hal ini dapat dilihat juga dari rata-rata konservatisme akuntansi dengan rata-rata penghindaran pajak yang tidak konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2017 rata-rata konservatisme akuntansi sebesar -0,02 sedangkan, rata-rata penghindaran pajaknya sebesar 0,05. Kemudian pada tahun 2018 rata-rata konservatisme akuntansi turun menjadi -0,05 begitupun dengan rata-rata penghindaran pajak sebesar 0,03 dan pada tahun 2019 rata-rata konservatisme akuntansi naik mendekati nilai positif yakni -0,01 begitupun dengan rata-rata penghindaran pajak sebesar 0,05. Pada tahun 2020 rata-rata konservatisme akuntansi naik kembali menjadi positif sebesar 0,03 sedangkan, rata-rata penghindaran pajaknya turun menjadi 0,04 dan pada tahun 2021 rata-rata konservatisme akuntansi kembali turun menjadi -0,02 sedangkan, rata-rata penghindaran pajak naik menjadi 0,05. Dalam penelitian ini, konservatisme akuntansi diukur dengan menjumlahkan laba bersih dengan depresiasi atau amortisasi kemudian dikurangkan dengan arus kas operasi dan dibagi total aset. Lubis et al. (2022) semakin besar nilai positif rasio tersebut, maka semakin besar suatu laporan keuangan mengalami konservatif, semakin besar perusahaan melakukan konservatisme pada laporan keuangannya maka semakin besar juga indikasi bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

Banyaknya peneliti yang melakukan penelitian terkait penghindaran pajak menimbulkan perbedaan pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Fauziah & Kurnia (2021) ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena perusahaan yang memiliki ukuran besar mampu menekan beban pajaknya. Hasil penelitian ini sama dengan Sari & Marsono (2020) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Lubis et al. (2022) dan Krisyadi & Mulfandi (2021) ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini bisa disebabkan karena perusahaan dengan ukuran besar akan menjadi perhatian bagi pemerintah (regulator) oleh karena itu perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang baik dan tetap menaati aturan perpajakan yang berlaku.

Ellyanti & Suwarti (2022) konservatisme akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena konservatisme akuntansi mengarah kepada prinsip perusahaan yang melakukan kehati-hatian dalam laporan keuangan, di mana perusahaan tidak akan mengakui laba terlebih dahulu, tetapi segera mengakui utang atau kerugian yang mungkin akan terjadi. Semakin tinggi tingkat konservatisme, maka usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak juga semakin tinggi. Hasil penelitian ini didukung oleh Rosdiani & Hidayat (2020) konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena manajemen perusahaan ingin memaksimalkan laba dengan

meminimalkan beban pajaknya, yaitu dengan cara menerapkan konservatisme akuntansi. Berbeda dengan hasil penelitian Sari et al. (2016) konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena adanya Peraturan Pemerintah terkait konservatisme akuntansi menyebabkan perusahaan kesulitan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh Dewi & Trisnawati (2021) konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang menerapkan prinsip konservatisme akuntansi belum tentu melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena dan uraian di atas menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi periode 2017-2021. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode penelitian, lokasi penelitian dan proksi penghindaran pajak. Selain alasan di atas, alasan penulis memilih sektor perdagangan, jasa, dan investasi karena sudah banyak penelitian dilakukan pada sektor atau sub sektor manufaktur, sedangkan, pada sektor ini hanya dilakukan pada sub sektor nya saja seperti penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2016) yang melakukan penelitian hanya pada sub sektor perdagangan eceran, dan Rosdiani & Hidayat (2020) yang melakukan penelitian hanya pada sub sektor keuangan oleh karena itu penulis memilih sektor perdagangan, jasa, dan investasi agar sampel perusahaan yang dihasilkan lebih banyak dan diharapkan memperoleh hasil yang lebih akurat.

Proksi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *BTD (Book Tax Differences)*, karena penelitian sebelumnya banyak menggunakan proksi *CETR* atau *ETR* sebagai alat ukur penghindaran pajak. *BTD* merupakan proksi penghindaran pajak yang digunakan untuk mengukur selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal untuk melihat kemampuan perusahaan dalam melaporkan laba yang dihasilkan. *BTD* merupakan refleksi dari perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak terutang tanpa harus mengurangi laba akuntansi (Cahyani & Kiswara, 2019). Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa masalah yang menjadi latar belakang penelitian ini yaitu:

1. Perbedaan pandangan antara pemerintah dan wajib pajak dalam memandang pajak menimbulkan perlawanan pajak. Salah satunya dilakukan oleh perusahaan dalam sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak.

2. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata ukuran perusahaan, konservatisme akuntansi dan penghindaran pajak yang diprosikan dengan *BTD (Book Tax Differences)* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi tidak konsisten dalam melakukan pembayaran pajak.
3. Terdapat perbedaan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
2. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
3. Apakah ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi berpengaruh positif secara simultan terhadap penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan atau hubungan antara variabel-variabel penelitian yaitu ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, khususnya perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 sehingga diperoleh sebuah kesimpulan dan dapat memberikan saran atas permasalahan yang ada.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dibangun mengenai beberapa hal berikut:

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
3. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi secara simultan terhadap penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Kegunaan Praktik**

Dimasa mendatang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan dalam membuat kebijakan terkait perencanaan pajak agar perusahaan terhindar dari penghindaran pajak yang ilegal karena dapat merusak reputasi perusahaan. Sedangkan, bagi investor dan calon investor, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengambil keputusan investasi pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi.

### **1.4.2 Kegunaan Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, apresiasi, dan masukan mengenai ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi yang menjadi salah satu faktor terjadinya penghindaran pajak sehingga dapat berguna bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai acuan kepustakaan bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah kewajiban warga negara untuk melepaskan sebagian dari kekayaan yang dimiliki ke dalam kas negara yang disebabkan karena suatu kondisi, peristiwa, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu (Lestari, 2019). Pajak bersifat wajib dan memaksa, tetapi keuntungannya tidak dapat dirasakan langsung karena pajak untuk kepentingan bersama dalam membangun negara. Mustaqiem (2014) seiring dengan berjalannya waktu, pembayaran pajak lebih luas tidak sebatas beralihnya kekayaan sektor partikelir ke sektor pemerintah, karena yang menjadi subjek pajak tidak hanya sektor swasta tetapi juga sektor non-swasta seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut UU No. 6 Tahun 1983 dan terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021, pajak merupakan sumbangan wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib yang tertuang dalam Landasan Konstitusional dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan negara guna mensejahterakan rakyat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan beberapa unsur pokok terkait definisi pajak, yaitu:

1. Pajak sebagai kontribusi wajib warga negara

Seluruh warga negara Indonesia wajib membayar pajak apabila sudah memenuhi kriteria sebagai subjek dan objek pajak, yaitu wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari batas PTKP yakni sebesar Rp 54 juta setahun (PTKP tahun 2022 berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021).

2. Pajak bersifat memaksa

Apabila seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayarnya karena apabila tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana.

3. Pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung

Pajak yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak tidak dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh wajib pajak karena pajak berbeda dengan retribusi. Salah satu contoh retribusi merupakan uang parkir, yaitu ketika kita sudah mendapatkan manfaat parkir maka kita akan membayarnya. Sedangkan, pajak akan didapatkan berupa fasilitas seperti perbaikan jalan raya, kesehatan gratis, beasiswa pendidikan, dan lain-lain karena pajak merupakan sarana pemerataan pendapatan bagi warga negara.

#### 4. Pajak berdasarkan undang-undang

Seluruh aturan terkait prosedur perpajakan mulai dari perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak diatur dalam perundang-undangan. Lembaga negara yang mengendalikan pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

##### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Salim & Haeruddin (2019) umumnya setiap negara memiliki empat fungsi pajak yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi pemerataan, dan fungsi stabilisasi. Namun dari ke empat fungsi tersebut, Pemerintah Indonesia hanya memfokuskan pada fungsi anggaran dan fungsi mengatur.

###### 1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Pajak merupakan sumber penghasilan negara yang berasal dari wajib pajak yang dimasukkan ke dalam kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Fungsi pajak sebagai anggaran adalah untuk menyeimbangkan dana negara antara penghasilan dan pengeluaran.

###### 2. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Fungsi pajak adalah menjalankan dan mengatur kebijakan negara dibidang sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur ini digunakan sebagai alat untuk memperlambat laju inflasi, memajukan aktivitas ekspor, memberikan perlindungan untuk barang produksi dalam negeri serta mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

###### 3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak digunakan untuk menyeimbangkan antara pembagian penghasilan dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

###### 4. Fungsi Stabilisasi

Pajak digunakan untuk menetralsir kondisi ekonomi, misalnya mengatasi inflasi atau deflasi yang terjadi.

##### **2.1.3 Jenis-Jenis Pajak**

Salim & Haeruddin (2019) ada beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak, dan subjek pajaknya.

###### 1. Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Pajak tidak langsung (*indirect Tax*), merupakan pajak yang hanya dibebankan kepada wajib pajak apabila melakukan kegiatan tertentu yang menyebabkan wajib pajak tersebut harus membayar pajak. Contohnya adalah PPnBM yang hanya dikenakan apabila wajib pajak menjual barang yang tergolong mewah.

- b. Pajak langsung (*direct tax*), merupakan pajak yang dibebankan kepada seluruh wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang diberikan dari kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang didalamnya ada jumlah yang wajib dibayar oleh wajib pajak secara berkala dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Contohnya adalah PPh dan PBB.
2. Berdasarkan instansi pemungut, pajak dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu:
    - a. Pajak daerah (lokal), merupakan pajak yang dipungut hanya pada daerah dan rakyat di daerah tersebut saja. Biasanya instansi yang melakukan pemungutan atas pajak daerah adalah Pemda Tingkat I atau Pemda Tingkat II. Contoh pajak yang dipungut adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan lain-lain.
    - b. Pajak negara (pusat), merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, dan kantor inspeksi pajak lain yang berada di Indonesia. Contoh pajak yang dipungut oleh negara adalah PPh, PBB, PPN, dan lain-lain.
  3. Berdasarkan objek pajak dan subjek pajak, maka pajak dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu:
    - a. Pajak objektif, merupakan pajak yang dipungut berdasarkan objeknya seperti pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk, dan lain-lain.
    - b. Pajak subjektif, merupakan pajak yang dipungut berdasarkan subjeknya seperti pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

#### **2.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Suparnyo (2012) asas-asas dalam melaksanakan pemungutan pajak terdiri dari asas yuridis, asas ekonomis, asas umum dan merata, asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan, asas waktu, asas rentabilitas, dan asas resiprositas.

1. Asas yuridis, mengartikan bahwa pemungutan pajak harus berlandaskan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui wakil rakyat (DPR) agar pemungutan pajak tidak dianggap sebagai perampokan.
2. Asas ekonomis, mengartikan bahwa pajak harus dibayarkan dari penghasilan rakyat dan tidak menghalangi aktivitas atau usaha rakyat dalam memproduksi atau berdagang serta pajak tidak boleh merugikan kepentingan umum.
3. Asas umum dan merata, mengartikan bahwa pajak harus dibayarkan oleh seluruh wajib pajak tanpa pandang bulu dan bersifat merata yaitu sesuai dengan kemampuan wajib pajak.
4. Asas domisili merupakan kewenangan negara untuk memungut pajak dari wajib pajak berdasarkan tempat tinggalnya. Misalnya, seorang rakyat Indonesia yang memiliki penghasilan dari dalam dan luar negeri maka negara wajib memungut pajak atas penghasilan tersebut baik dari dalam ataupun luar negeri.
5. Asas sumber merupakan pemungutan pajak yang didasarkan dari sumber penghasilannya, bukan tempat tinggalnya. Misalnya, apabila Warga Negara Asing

(WNA) memperoleh pendapatan dari Indonesia, maka WNA tersebut wajib membayar pajak atas pendapatannya dari Indonesia.

6. Asas kebangsaan, memiliki dua arti yaitu arti aktif dan arti pasif. Arti aktif bermakna bahwa pemerintah berkuasa untuk memungut pajak dari semua wajib pajak di mana pun berada. Sedangkan, arti pasif bermakna bahwa pemerintah berkuasa untuk memungut pajak kepada warga negara asing yang bermukim di negara Indonesia.
7. Asas waktu, artinya pemerintah harus memungut pajak dalam kondisi wajib pajak mampu membayar pajak. Misalnya, pemerintah memungut pajak pada saat wajib pajak memperoleh gaji atau penghasilan.
8. Asas rentabilitas, merupakan biaya pemungutan pajak tidak melebihi besar pajaknya. Hal ini berkaitan dengan fungsi pajak sebagai fungsi budgeter yaitu memperoleh penghasilan sebesar-besarnya bagi negara, sehingga apabila pemungutan pajak ini tidak menguntungkan bagi negara maka pemungutan pajak tidak akan dilakukan.
9. Asas resiprositas adalah kebebasan subjektif dengan syarat timbal balik. Misalnya, duta besar luar negeri yang berada di Indonesia bisa saja dibebaskan dari pajak dengan syarat timbal balik yaitu duta besar Indonesia yang berada di negara tersebut juga harus membebaskan duta besar Indonesia dari pajak.

#### **2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Salim & Haeruddin (2019) secara umum sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ada tiga yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding assessment system*.

##### *1. Official Assessment System*

Pemerintah diberikan wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Namun sejak masa reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem ini sudah tidak digunakan lagi. Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah pajak terutang dihitung oleh fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif, tidak melakukan perhitungan hanya mengikuti perhitungan dari fiskus.
- c. Timbulnya utang pajak setelah fiskus melakukan perhitungan dan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

##### *2. Self Assessment System*

Wajib pajak diberikan wewenang oleh fiskus untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan. Ciri-ciri *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak.

- b. Wajib pajak bersifat aktif dengan melakukan pelaporan dan pembayaran sendiri pajak terutang yang harus dibayar.
- c. Surat ketetapan pajak tidak perlu dikeluarkan setiap saat oleh pemerintah, kecuali jika terjadi kasus-kasus tertentu, seperti terlambat pelaporan atau pembayaran pajak atau terjadinya kurang bayar.

### 3. *Withholding Assessment System*

Pihak lain atau pihak ketiga diberikan wewenang oleh fiskus untuk memotong dan memungut besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Maksud pihak lain atau pihak ketiga disini merupakan pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh Indonesia merupakan *self assessment system* dan *withholding assessment system*.

## 2.2 Ukuran Perusahaan

### 2.2.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengelompokan suatu perusahaan dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Selviani (2020) ukuran perusahaan merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengelompokan suatu perusahaan ke dalam kelompok besar atau kecil berdasarkan total asetnya. Semakin besar total aset maka semakin besar juga ukuran dari perusahaan tersebut. Perusahaan dengan total aset besar menandakan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan karena arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan lebih stabil dan mampu untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset kecil.

Siregar & Widyawati (2016) semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, menunjukkan bahwa semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal ini akan digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan yang ada. Sedangkan, Krisyadi & Mulfandi (2021) semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi juga perusahaan berpotensi melakukan penghindaran pajak. Hal ini karena perusahaan yang besar akan memiliki sumber daya manusia yang banyak dan perusahaan akan memanfaatkan sumber daya itu untuk melakukan perencanaan pajak sehingga perusahaan dapat memaksimalkan penghematan pajak. Begitu juga Dewi dan Noviari (2017) perusahaan dengan skala besar umumnya membayar pajak lebih rendah dibandingkan perusahaan berskala kecil. Hal ini karena, perusahaan dengan skala besar akan memiliki sumber daya manusia yang mampu membuat perencanaan pajak yang baik agar dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Sedangkan, perusahaan yang berskala kecil akan kesulitan meminimalkan beban pajaknya karena minimnya tenaga ahli dalam bidang perpajakan.

### 2.2.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 ukuran perusahaan berdasarkan laba bersih dan hasil penjualannya dibagi menjadi tiga jenis yaitu usaha kecil, usaha mikro, dan usaha menengah.

#### 1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### 2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

#### 3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sedangkan, menurut Badan Standarisasi Nasional, ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

#### 1. Perusahaan Kecil

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki hasil penjualan minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per tahun.

#### 2. Perusahaan Menengah

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) termasuk tanah dan bangunan serta memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

#### 3. Perusahaan Besar

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) termasuk tanah dan bangunan serta memiliki hasil penjualan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) per tahun.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi ukuran perusahaan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dan Badan Standarisasi Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Klasifikasi	
	Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Hasil penjualan pertahun
UU No. 20 Tahun 2008		
1. Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
2. Usaha Kecil	> 50 juta s.d 500 juta	> 300 juta s.d 2,5 miliar
3. Usaha Menengah	> 500 juta s.d 10 miliar	> 2,5 miliar s.d 50 miliar
Badan Standarisasi Nasional		
1. Perusahaan Kecil	Maksimal 200 juta (termasuk tanah dan bangunan)	Minimal 1 miliar
2. Perusahaan Menengah	1 miliar s.d 10 miliar (termasuk tanah dan bangunan)	> 1 miliar s.d 50 miliar
3. Perusahaan Besar	> 10 miliar (termasuk tanah dan bangunan)	> 50 miliar

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008 dan Badan Standarisasi Nasional

### 2.2.3 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Dalam penelitian Fauziah & Kurnia (2021) peneliti menggunakan indikator logaritma natural (Ln) dari total aset karena aset dianggap memiliki tingkat kestabilan yang cukup berkelanjutan. Semakin besar total aset maka semakin besar juga ukuran dari perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan juga akan semakin kompleks. Sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh

perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Selain itu, nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan proksi lainnya.

$$\text{SIZE} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

## 2.3 Konservatisme Akuntansi

### 2.3.1 Pengertian Konservatisme Akuntansi

Prayanthi & Pantow (2018) konservatisme akuntansi didefinisikan sebagai reaksi kehati-hatian (*prudent*) dalam menanggapi keraguan dengan meyakinkan bahwa keraguan dan risiko bisnis sudah dipertimbangkan secara matang. Hal ini ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan *shareholders* serta *debtholders*. Sumarlin & Firdaus (2018) konservatisme akuntansi adalah prinsip yang bertujuan agar pengakuan dan pengukuran aset atau laba dilaksanakan dengan hati-hati akibat kondisi ekonomi dan dunia bisnis yang diliputi oleh ketidakpastian. Savitri (2016) konservatisme merupakan kecenderungan seorang akuntan yang memerlukan kepastian yang lebih besar dalam mengakui berita baik (*good news*) sebagai hal yang menguntungkan daripada mengakui berita buruk (*bad news*) sebagai hal yang merugikan.

Penerapan prinsip konservatisme akuntansi menyebabkan perusahaan untuk merancang tidak adanya laba dan bergegas mengakui terjadinya kerugian. Prinsip ini secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan, di mana laporan keuangan yang dibentuk nantinya akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak manajemen (Rosdiani & Hidayat, 2020). Sederhananya konservatisme diinterpretasikan sebagai kehati-hatian, sehingga dengan kehati-hatian ini maka laporan keuangan cenderung bersifat pesimisme. Praktik konservatisme yaitu memperlambat atau menunda pendapatan yang mungkin akan terjadi dan akan mempercepat pengakuan biaya yang mungkin terjadi. Begitu juga dengan aset dan utang, aset akan dinilai pada nilai paling rendah dan utang akan dinilai pada nilai tertinggi. Cara ini dilakukan untuk mencegah sedini mungkin risiko yang akan terjadi.

Walaupun konservatisme akuntansi terlihat bermasalah karena tidak melaporkan nilai sesungguhnya secara tepat, namun kenyataannya prinsip ini masih diterapkan oleh para akuntan. Marselina (2016) empat faktor yang menyebabkan perusahaan masih menerapkan konservatisme akuntansi adalah sebagai berikut:

#### 1. *Contracting Explanatin*

Konservatisme adalah usaha perusahaan untuk menciptakan kontrak yang efektif dengan berbagai pihak luar. Berdasarkan definisi kontrak, konservatisme akuntansi dapat dipakai untuk menghindari moral hazard disebabkan oleh para pihak yang memiliki informasi asimetris, pembayaran asimetris, waktu terbatas. Dengan pengaplikasian konservatisme, maka laporan keuangan yang disajikan merupakan skenario terpuruk bagi perusahaan karena berita buruk diakui lebih dulu daripada berita bagus menyebabkan keputusan ekonomi tidak menilai terlalu tinggi.

## 2. *Litigation*

Guna menghindari ekspektasi tinggi dari pengguna laporan keuangan, maka perusahaan menggunakan konservatisme akuntansi untuk mengurangi risiko litigasi karena apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dilebih-lebihkan, maka investor dapat melakukan litigasi dan tuntutan hukum untuk memperjuangkan haknya.

## 3. *Taxation*

Penggunaan konservatisme akuntansi bertujuan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan. Perusahaan dapat memilih metode yang kemungkinan konservatif untuk menekan beban pajak sejauh diizinkan oleh standar akuntansi keuangan yang berlaku.

## 4. *Regulation*

Regulator menciptakan berbagai insentif bagi pelaporan keuangan sehingga menyebabkan pelaporan keuangan disiapkan secara hati-hati. Negara yang memiliki regulator tinggi, cenderung memiliki tingkat konservatisme yang tinggi juga.

### **2.3.2 Konservatisme Akuntansi Dalam IFRS**

Seiring berkembangnya kegiatan bisnis internasional dan dampak dari globalisasi menyebabkan standar akuntansi internasional sangat penting untuk diterapkan. Pada dasarnya, setiap negara memiliki lembaga untuk membuat standar pelaporan keuangannya sendiri seperti Indonesia memiliki IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) yang menerbitkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), Amerika Serikat memiliki FASB (*Financial Accounting Standard Board*) yang menerbitkan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*), dan Uni Eropa memiliki IASB (*International Accounting Standard Board*) yang menerbitkan IAS (*International Accounting Standard*) yang kemudian berganti nama menjadi IFRS (*International Financial Reporting Standard*) pada tahun 2001.

IFRS adalah standar akuntansi internasional yang saat ini dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan di berbagai negara. Indonesia melalui DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) yang dibentuk oleh IAI memaklumkan konvergensi IFRS terhadap PSAK melalui *roadmap* (Fitriasuri & Terizaghi, 2014) di bawah ini:



Gambar 2.1 Roadmap Konvergensi IFRS Terhadap PSAK

Sehubungan dengan konvergensi IFRS, konservatisme akuntansi tidak berlaku dalam IFRS. Prinsip yang digunakan dalam IFRS adalah *fair value* yaitu prinsip yang lebih menekankan pada relevansi sehingga hal ini tidak sejalan dengan prinsip konservatisme yang lebih menekankan pada realibilitas. Sari & Sarumpaet (2017) laporan keuangan menurut IFRS harus *understandable, relevan, reliable, comparable*, dan tanpa diikuti oleh bias konservatif. Namun dalam penerapannya, prinsip akuntansi yang konservatif masih ada pada area tertentu dalam IFRS.

Juanda (2012) “Konservatisme akuntansi tetap “bermain” atas pengimplementasian IFRS. Standar-standar IASB (IFRS) tidak merujuk secara eksplisit prinsip penerapan konservatisme, karena memang tidak sesuai dengan kerangka teori IFRS. Namun, konservatisme tidak hilang hanya karena tidak “ditekankan” dalam standar. Dengan adanya ketidakpastian maka akan tetap ada penerapan konservatisme dalam penyajian laporan keuangan.”

Sari & Sarumpaet (2017) konservatisme akuntansi dalam IFRS tidak sepenuhnya hilang, namun digantikan dengan prinsip *prudence* yang dijelaskan dalam IASB *framework*, paragraf 37 yakni:

*“The preparers of financial statements do, however, have to contend with the uncertainties that inevitably surround many events and circumstances, such as the collectability of doubtful receivables, the probable useful life of plant and equipment and the number of warranty claims that may occur. Such uncertainties are recognised by the disclosure of their nature and extent and by the exercise of prudence in the preparation of the financial statements. Prudence is the inclusion of a degree of caution in the exercise of the judgements needed in making the estimates required under conditions of uncertainty, such that assets or income are not overstated and liabilities or expenses are not understated. However, the exercise of prudence does not allow, for example, the creation of hidden reserves or excessive provisions, the deliberate understatement of assets or income, or the deliberate overstatement of liabilities or expenses, because the financial statements would not be neutral and, therefore, not have the quality of reliability” (IASB Framework, paragraph 37)*

“Namun, penyusun laporan keuangan harus bersaing dengan ketidakpastian yang pasti mengelilingi banyak peristiwa dan keadaan, seperti kolektabilitas piutang ragu-ragu, kemungkinan masa manfaat pabrik dan peralatan dan jumlah klaim garansi yang mungkin terjadi. Ketidakpastian tersebut diakui oleh pengungkapan sifat dan luasnya dan oleh pelaksanaan kehati-hatian dalam penyusunan laporan keuangan. Kehati-hatian adalah dimasukkannya tingkat kehati-hatian dalam pelaksanaan penilaian yang diperlukan dalam membuat perkiraan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak dilebih-lebihkan dan kewajiban atau pengeluaran tidak dikecilkan. Namun, pelaksanaan kehati-hatian tidak memungkinkan, misalnya, penciptaan cadangan tersembunyi atau ketentuan yang berlebihan, pernyataan aset atau pendapatan yang disengaja, atau pernyataan kewajiban atau pengeluaran yang disengaja, karena laporan keuangan tidak akan netral dan, oleh karena itu, tidak memiliki kualitas keandalan.” (IASB *Framework*, paragraph 37)

Prinsip *prudence* diperkenalkan sebagai pengganti prinsip konservatisme. *Prudence* dalam IFRS berhubungan dengan pendapatan yaitu pendapatan boleh diakui walaupun masih bersifat potensi sejauh memenuhi ketentuan pengakuan dalam IFRS. Hasil penelitian Prayanthi & Pantow (2018) tingkat konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Memang betul bahwa IFRS tidak lagi menekankan akuntansi yang konservatif, namun IFRS menekankan *prudence*. Beberapa contoh yang membuktikan bahwa konservatisme akuntansi masih diterapkan meskipun sudah dilakukannya konvergensi IFRS terhadap PSAK, antara lain:

1. Cadangan kerugian piutang

Cadangan kerugian piutang merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan dalam mengestimasi risiko atas kemungkinan tidak tertagihnya suatu piutang (Wijayanti, 2019).

2. Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak untuk dijual. Aset tetap umumnya bersifat tahan lama dan berumur panjang (lebih dari satu tahun). Beberapa contoh konservatisme akuntansi dalam aset tetap antara lain:

- a. Penyusutan aset tetap, perusahaan yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun ganda, dianggap menghasilkan laporan keuangan yang lebih konservatif jika dibandingkan dengan metode garis lurus karena pada awal periode beban penyusutan yang dihasilkan oleh metode saldo menurun ganda akan menghasilkan pembebanan yang lebih tinggi sedangkan beban penyusutan yang dihasilkan dari metode garis lurus akan menghasilkan pembebanan yang sama setiap tahunnya. Sehingga metode garis lurus lebih menggambarkan kondisi sesungguhnya dibandingkan metode saldo menurun ganda (Sumarlin & Firdaus, 2018).

- b. Aset zombie adalah aset tetap yang sudah habis umur ekonomisnya namun masih digunakan. Hal ini umumnya disebabkan akibat manajer yang salah memperdiksi umur ekonomis aset tetap tersebut (Sumarlin & Firdaus, 2018). Laporan keuangan yang dihasilkan akibat adanya aset zombie menjadi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya yaitu nilai buku sudah habis atau nol namun aset tetap masih dioperasikan.
- c. Pertukaran aset tetap sejenis apabila laba tidak diakui. Aset tetap yang ditukarkan dengan aset tetap sejenis (sama persis tipe, ukuran, jenis, model, bentuk, ataupun warnanya) apabila terjadi keuntungan atas pertukaran aset tetap sejenis tersebut, maka keuntungan tersebut tidak diakui namun menjadi selisih dari harga perolehan aset tetap sejenis yang baru.

### 3. Provisi

Menurut PSAK 57, provisi didefinisikan sebagai liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Keberadaan dari provisi ini ada, namun waktu dan jumlahnya pada saat menyusun laporan keuangan belum dapat dipastikan. Provisi timbul dari peristiwa di masa lalu. Beberapa contoh provisi adalah litigasi atau perkara hukum, jaminan atau garansi, premi produk, kewajiban pengelolaan lingkungan, kontrak yang memberatkan, restrukturisasi bisnis yang menjanjikan kewajiban di masa yang akan datang.

### 4. Pengakuan pendapatan

Perusahaan yang mengakui pendapatan dengan metode *cash basis* yaitu mencatat pendapatan pada saat pendapatan diterima, dianggap lebih konservatif dibandingkan dengan metode *accrual basis* yang mencatat pendapatan pada saat terjadinya suatu transaksi atau pada saat barang atau jasa diserahkan kepada pelanggan. Metode *accrual basis* mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat daripada *cash basis*. Penggunaan *accrual basis* memiliki kompleksitas lebih tinggi dibandingkan *cash basis* (Andriana, 2021).

#### 2.3.3 Jenis-Jenis Konservatisme Akuntansi

Sari & Sarumpaet (2017) konservatisme akuntansi dibagi menjadi dua jenis yaitu konservatisme kondisional (*conditional*) dan konservatisme non kondisional (*unconditional*).

##### 1. Konservatisme Kondisional (*conditional*)

Konservatisme kondisional merupakan konservatisme berdasarkan kondisi pasar yaitu terkait dengan *earnings* dan bergantung pada berita (*news dependent*). Konservatisme jenis ini merupakan reaksi dari perusahaan yang melakukan verifikasi yang berbeda sebagai penyerapan informasi yang ada yang dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan sehingga konservatisme jenis ini berkaitan dengan *gains* dan *losses* ekonomis. Akuntansi akan bersifat konservatif apabila pengakuan terhadap berita yang mengindikasikan adanya *losses* ekonomis lebih tepat waktu dibandingkan

pengakuan terhadap *gains* ekonomis. Dalam hal ini, dampak dari konservatisme kondisional terhadap aliran pendapatan dapat kurang konsisten dalam jangka panjang dan lebih sulit bagi investor untuk mendeteksi konservatisme jenis ini.

## 2. Konservatisme Non Kondisional (*unconditional*)

Konservatisme non kondisional merupakan konservatisme yang berdasarkan akuntansi, berhubungan dengan neraca, dan tidak bergantung pada terdapatnya kabar (baik atau buruk). Artinya, konservatisme ini bersifat bebas dari berita baik atau buruk dalam dunia bisnis. Misalnya, sebuah perusahaan tidak melakukan pencatatan *goodwill* atau pembebanan yang relatif cepat terhadap aktivitas R&D, aktivitas periklanan, atau penggunaan metode pengalokasian yang bersifat akselerasi (depresiasi saldo menurun ganda), sehingga mengakibatkan nilai buku aset yang *understated* sehingga konservatisme jenis ini menghasilkan pendapatan yang lebih konsisten dalam jangka panjang karena konservatisme yang dilakukan terkandung dalam kebijakan akuntansi, di mana konsistensi perlakuan akuntansinya lebih konsisten.

### 2.3.4 Pengukuran Konservatisme Akuntansi

Dalam penelitian Lubis et al. (2022), peneliti mengukur konservatisme akuntansi dengan menggunakan metode kenaikan laba bersih ditambah penyusutan kemudian dikurangi arus kas operasi, dibagi total aset dan dikalikan negatif 1. Semakin besar nilai positif rasio tersebut, maka semakin besar suatu laporan keuangan mengalami konservatif, semakin besar perusahaan melakukan konservatisme pada laporan keuangannya maka semakin besar juga indikasi bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

$$KA = \frac{(Net\ Profit + Dep) - Cash\ Flow}{Total\ Asset} \times -1$$

Keterangan:

<i>KA</i>	: Konservatisme Akuntansi
<i>Net Profit</i>	: Laba Bersih
<i>Dep</i>	: Depresiasi atau Penyusutan
<i>Cash Flow</i>	: Arus Kas Operasi
<i>Total Asset</i>	: Total Aset

## 2.4 Penghindaran Pajak

### 2.4.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Halim, et al. (2020) penghindaran pajak merupakan perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Alasan seorang wajib pajak melakukan penghindaran dan pengeluaran pajak

adalah karena tarif pajak yang terlalu tinggi, undang-undang yang tidak tepat, hukuman yang tidak memberikan efek jera kepada para pelaku, dan ketidakadilan yang nyata. Akibat dari kondisi ini menyebabkan penghindaran dan pengelakan pajak cenderung naik

Dewi & Noviani (2017) penghindaran pajak merupakan permasalahan yang kompleks dan unik. Disatu sisi penghindaran pajak tidak dilarang, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Awalia (2019) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) karena memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meminimalkan pembayaran pajak. Walaupun penghindaran pajak mendapatkan perhatian dari kantor pajak karena memiliki konotasi yang negatif tetapi penghindaran pajak tidak ilegal. Hal ini berbeda dengan pengelakan pajak karena tindakan ini melanggar peraturan perpajakan sehingga tindakan ini dapat dikenakan sanksi administrasi hingga sanksi pidana.

Praktik penghindaran pajak merupakan persoalan yang individual namun kompleks sebab tidak melanggar peraturan perpajakan namun tidak diinginkan oleh negara karena penerimaan negara yang berasal dari pajak memiliki porsi yang cukup besar dibandingkan penerimaan lain sehingga negara bergantung pada penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan negara. Putra (2019) motivasi wajib pajak melakukan penghindaran pajak adalah *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration*.

### 1. *Tax Policy*

Banyaknya berbagai jenis pajak yang harus dibayar, di mana masing-masing jenis pajak tersebut mempunyai perlakuan yang berbeda menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak agar tidak menguras *cash flow* perusahaan. Contohnya seperti pajak bea masuk yang akan dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak atau bisa juga direstitusi apabila perusahaan melakukan ekspor barang. Selain itu, ada juga PPh yaitu pajak atas penghasilan sehingga hal ini dapat mengurangi laba bersih perusahaan.

### 2. *Tax Law*

Tidak adanya undang-undang yang mengatur permasalahan secara sempurna dan pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain seperti PP, Keppres, KMK dan SE DJP serta tidak jarang ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Celah ini dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

### 3. *Tax Administration*

Sebagai negara yang berkembang dengan wilayah yang luas dan memiliki banyak penduduk, Indonesia masih kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara memadai. Akibat banyaknya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi antara

fiskus selaku pejabat pajak dengan wajib pajak. Hal ini mendorong wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana.

Secara umum, motivasi dilakukannya penghindaran pajak guna memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perusahaan harus cermat dalam memanfaatkan peluang yang ada dalam peraturan perpajakan. Secara umum tujuan yang ingin dicapai dari penghindaran pajak adalah:

1. Meminimalkan beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) pada saat pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan.

#### **2.4.2 Strategi Penghindaran Pajak**

Putra (2019) setelah mengetahui motivasi dan tujuan perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka terdapat beberapa strategi umum yang dilakukan untuk penghindaran pajak yaitu:

##### 1. *Tax Saving*

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp100 juta maka dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawannya menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

##### 2. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan

Dengan menguasai peraturan perpajakan yang berlaku, maka perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau kenaikan dan sanksi pidana seperti pidana atau kurungan.

##### 3. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dapat diterapkan melalui penundaan pembayaran Pajak Petambahan Nilai (PPN). Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan oleh peraturan perpajakan. Dalam hal ini, wajib pajak dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya, setelah bulan penyerahan barang.

##### 4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Banyaknya wajib pajak yang kurang memperoleh informasi terkait pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yaitu pajak dibayar di muka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dan/atau impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
  - a. Apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak, perusahaan akan mengalami kelebihan pembayaran pajak maka perusahaan dapat mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. Pengajuan tersebut dapat dilakukan paling cepat 3 bulan setelah berjalannya tahun pajak dan wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPh Pasal 25.
  - b. Apabila perusahaan melakukan impor, maka perusahaan dapat mengajukan permohonan pemindaian PPh Pasal 22 Impor.

Sementara menurut Amalia (2017) strategi penghindaran pajak yang biasa dilakukan oleh perusahaan dalam aktivitas *foreign direct investment* adalah:

#### 1. *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga *transfer* suatu transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa baik karena penyertaan modal saham, pengendalian manajemen dan lain-lain. *Transfer pricing* dalam dunia internasional terjadi karena adanya perbedaan tarif pajak antarnegara dan biasanya terjadi pada perusahaan multinasional yang beroperasi melewati lintas batas negara. Awalia (2019) ada dua metode *Transfer pricing*, yaitu memindahkan penghasilan ke negara lain yang memiliki tarif pajak rendah atau memindahkan biaya ke negara yang memiliki tarif pajak tinggi.

#### 2. Pemanfaatan *Tax Haven Country*

Pemanfaatan *tax haven country* biasanya dilakukan dengan menempatkan anak perusahaan di *tax haven country* cara ini biasanya dilakukan bersamaan dengan *Controlled Foreign Corporation* (CFC) yaitu strategi penghindaran pajak dengan menunda pembayaran penghasilan yang seharusnya diterima di suatu negara. Namun, beberapa ahli pajak ada yang berpendapat bahwa *tax haven country* tidak dapat didefinisikan secara jelas karena sifatnya tergantung pada ketentuan masing-masing negara. Suatu negara dapat saja dikatakan *tax haven country* oleh negara lain apabila negara tersebut memberikan suatu insentif dalam kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam wilayah negara tersebut. Jadi, apakah suatu negara dapat diklasifikasikan sebagai *tax haven country* atau tidak tergantung dari definisi negara *tax haven country* yang diberikan oleh negara lain tersebut.

#### 3. *Thin Capitalization*

Strategi *thin capitalization* dilakukan dengan cara membuat struktur utang terlihat lebih besar dibandingkan modal. Strategi ini lahir karena peraturan perpajakan yang

membedakan antara perlakuan bunga sebagai pengembalian keuntungan (*return*) dan utang dengan dividen sebagai pengembalian keuntungan atas investasi saham. Pembayaran bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) sedangkan, pembayaran dividen bukan biaya yang dapat dikurangkan (*nondeductible expense*).

### 2.4.3 Pengukuran Penghindaran Pajak

Dalam penelitian Handayani & Rachmawati (2022) peneliti mengukur penghindaran pajak dengan *BTD (Book Tax Differences)* yaitu selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal dibagi total aset. Semakin tinggi nilai *BTD* maka semakin tinggi indikasi bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

$$BTD (Book Tax Differences) = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menunjang analisis data dan landasan teori. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan ukuran perusahaan, konservatisme akuntansi, dan penghindaran pajak:

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Dewi & Noviari (2017)  Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> )	Variabel Independen: - Ukuran Perusahaan - <i>Leverage</i> - Profitabilitas - <i>Corporate Social Responsibility</i>  Variabel Dependen: - Penghindaran Pajak	Ukuran Perusahaan - Total aset <i>Leverage</i> (DAR) - Total utang - Total aset Profitabilitas (ROA) - Laba bersih - Total aset CSR - Variabel <i>dummy</i>  Penghindaran Pajak (CETR) - Pembayaran pajak - Laba sebelum pajak	Regresi linear berganda.	1. Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan pengungkapan CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
2.	Mulyati et al. (2019)  <i>Effect of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance.</i>	Variabel Independen: - <i>Profitability</i> - <i>Leverage</i> - <i>Company Size</i>  Variabel Dependen:	<i>Profitability</i> (ROA) - Laba bersih - Total aset <i>Leverage</i> (DER) - Total utang - Total ekuitas <i>Company Size</i> - Total aset	Regresi linear berganda.	1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		- <i>Tax Avoidance</i>	<i>Tax Avoidance</i> (CETR) - Pembayaran pajak - Laba sebelum pajak		
3.	Selviani et al. (2019)  Pengaruh Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Kimia di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017	Variabel Independen: - Ukuran Perusahaan - <i>Leverage</i>  Variabel Dependen: - Penghindaran Pajak	Ukuran Perusahaan - Total aset <i>Leverage</i> (DER) - Total utang - Total ekuitas  Penghindaran Pajak (CETR) - Pembayaran pajak - Laba sebelum pajak	Deskriptif statistik	1. Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak. 3. Ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.
4.	Rosdiani & Hidayat (2020)  Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: - Derivatif Keuangan - Konservatisme Akuntansi - Intensitas Aset Tetap  Variabel Dependen: - Penghindaran Pajak	Derivatif Keuangan - Variabel <i>dummy</i> Konservatisme Akuntansi - Laba bersih - Beban depresiasi - Arus kas operasi - Total aset  Penghindaran Pajak (CETR) - Pembayaran pajak - Laba sebelum pajak	Regresi linear berganda.	1. Derivatif keuangan dan konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. Derivatif keuangan, konservatisme akuntansi, dan intensitas aset tetap berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak.
5.	Sari & Marsono (2020)  Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada	Variabel Independen: - Profitabilitas - <i>Leverage</i> - Ukuran Perusahaan  Variabel Dependen: - Penghindaran Pajak	Profitabilitas (ROA) - Laba bersih - Total aset <i>Leverage</i> (DER) - Total utang - Total ekuitas Ukuran Perusahaan - Total aset  Penghindaran Pajak (CETR)	Regresi linear berganda.	1. Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018		- Pembayaran pajak - Laba sebelum pajak		
6.	Dewi & Trisnawati (2021)  Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)	Variabel Independen: - Konservatisme Akuntansi - Intensitas Aset Tetap - Profitabilitas - Leverage  Variabel Dependen: - <i>Tax Avoidance</i>	Konservatisme Akuntansi - Laba bersih - Beban depresiasi - Arus kas operasi - Total aset Intensitas Aset Tetap - Total aset tetap - Total aset Profitabilitas (ROA) - Laba bersih - Total aset <i>Leverage</i> (DER) - Total utang - Total ekuitas  <i>Tax Avoidance</i> (CETR) - Pembayaran pajak - Laba sebelum pajak	Regresi linear berganda.	1. Konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. <i>Profitabilitas</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Fauziah (2021)  Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi	Variabel Independen: - Profitabilitas - Ukuran Perusahaan - <i>Leverage</i>  Variabel Dependen: - Penghindaran Pajak	Profitabilitas (ROA) - Laba bersih - Total aset Ukuran Perusahaan - Total aset <i>Leverage</i> (DER) - Total utang - Total ekuitas  Penghindaran Pajak (CETR) - Pembayaran pajak - Laba sebelum pajak	Regresi linear berganda.	1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 3. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
8.	Krisyadi & Mulfandi (2021)  Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan,	Variabel Independen: - Ukuran Perusahaan - <i>Leverage</i> - Profitabilitas	Ukuran Perusahaan - Total aset <i>Leverage</i> (DAR) - Total utang - Total aset Profitabilitas (ROA) - Laba bersih	Regresi data panel.	1. <i>Leverage</i> dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.  2. Ukuran perusahaan dan intensitas modal

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<i>Leverage, Profitabilitas, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia</i>	- Intensitas Modal  Variabel Dependen: - Penghindaran Pajak	- Total aset Intensitas Aset Tetap - Total aset tetap - Total aset  Penghindaran Pajak (ETR) - Beban pajak penghasilan - Laba sebelum pajak		tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
9.	Lismiyyat & Herliansyah (2021)  <i>The Effect of Accounting Conservatism, Capital Intensity and Independent Commissioner Tax Avoidance, With Independent Commissioners as Moderating Variable (Empirical Study on Banking Companies on the IDX 2014-2017)</i>	Variabel Independen: - <i>Accounting Conservatism</i> - <i>Capital Intensity</i> - <i>Independent Commissioner</i>  Variabel Dependen: - <i>Tax Avoidance</i>  Variabel Moderasi: - <i>Independent Commissioners</i>	<i>Accounting Conservatism</i> - Laba bersih - Beban depresiasi - Arus kas operasi - Total aset  <i>Capital Intensity</i> - Total aset tetap - Total aset  <i>Independent Commissioner</i> - Jumlah komisaris independen - Jumlah komisaris  <i>Tax Avoidance (ETR)</i> - Beban pajak penghasilan - Laba sebelum pajak	Regresi linier berganda.	1. Akuntansi konservatisme dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. Komisaris independen tidak memoderasi konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak. 4. Komisaris independen memoderasi intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
10.	Nurcholis et al. (2021)  <i>The Effect of Financial Distress and Accounting Conservatism on Tax Avoidance With Leverage as Moderating Variable</i>	Variabel Independen: - <i>Financial Distress</i> - <i>Accounting Conservatism</i>  Variabel Dependen: - <i>Tax Avoidance</i>  Variabel Moderasi: - <i>Leverage</i>	<i>Financial Distress (EMS)</i> - Modal kerja - Total aset - Laba ditahan - Pendapatan operasional - Total ekuitas - Total utang  <i>Accounting Conservatism</i> - Laba bersih - Beban depresiasi - Arus kas operasi - Total aset	Regresi data panel	1. <i>Financial distress</i> dan konservatisme akuntansi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. <i>Leverage</i> memoderasi <i>financial distress</i> dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak.

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			<i>Tax Avoidance (ETR)</i> - Beban pajak penghasilan - Laba sebelum pajak  <i>Leverage (DER)</i> - Total utang - Total ekuitas		
11.	Pratiwi & Djajanti (2021)  Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan <i>Financial Distress</i> Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Karakteristik Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen: - Konservatisme Akuntansi - <i>Financial Distress</i>  Variabel Dependen: - Penghindaran Pajak  Variabel Moderasi: - Karakteristik Eksekutif	Konservatisme Akuntansi - Laba bersih - Beban depresiasi - Arus kas operasi - Total aset  <i>Financial Distress (Z-Score)</i> - Aset lancar - Utang lancar - Total aset - Laba ditahan - Laba sebelum pajak - Jumlah lembar saham - Harga saham per lembar - Total utang - Penjualan  Penghindaran Pajak (CETR) - Pembayaran pajak - Laba sebelum pajak  Karakteristik Eksekutif ( <i>Risk Taker</i> ) - Laba sebelum pajak - Depresiasi - Amortisasi	Moderate Regression Analysis (MRA)	1. Konservatisme akuntansi dan <i>financial distress</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Karakteristik eksekutif tidak memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak. 3. Karakteristik eksekutif memoderasi pengaruh <i>financial distress</i> terhadap penghindaran pajak.
12.	Ellyanti & Suwarti (2022)  Analisis Pengaruh Konservatisme Akuntansi, <i>Corporate Governance</i> ,	Variabel Independen: - Konservatisme Akuntansi - <i>Corporate Governance</i> - <i>Sales Growth</i>	Konservatisme Akuntansi - Laba bersih - Biaya penyusutan - Kas operasi bersih - Total aset  <i>Corporate Governance</i>	Regresi linear berganda	Konservatisme akuntansi, <i>corporate governance</i> , dan <i>sales growth</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Dan <i>Sales Growth Terhadap Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: - <i>Tax Avoidance</i>	- Laba sebelum pajak - Total kepemilikan saham oleh pihak institusi - Jumlah saham beredar - Jumlah saham manajer <i>Sales Growth</i> - Total penjualan tahun sekarang - Total penjualan tahun sebelumnya  <i>Tax Avoidance (CETR)</i> - Pembayaran pajak - Laba sebelum pajak		
13.	Lubis et al. (2022)  <i>Audit Committee, Company Size, Leverage and Accounting Conservatism on Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: - <i>Audit Committee</i> - <i>Company Size</i> - <i>Leverage</i> - <i>Accounting Conservatism</i>  Variabel Dependen: - <i>Tax Avoidance</i>	<i>Audit Committee</i> - Jumlah anggota komite audit <i>Company Size</i> - Total aset <i>Leverage (DER)</i> - Total utang - Total ekuitas <i>Accounting Conservatism</i> - Laba bersih - Depresiasi - Arus kas operasi - Total aset  <i>Tax Avoidance (ETR)</i> - Beban pajak penghasilan - Laba sebelum pajak	Regresi linear berganda.	1. Komite audit, ukuran perusahaan, dan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan ringkasan penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yang membedakan penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada periode penelitian, lokasi penelitian, dan alat ukur yang digunakan dalam penghindaran pajak. Periode penelitian ini adalah 2017-2021 pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Sedangkan, proksi penghindaran pajak yang digunakan adalah *BTD (Book Tax Differences)*. Persamaan dari penelitian terdahulu

dan yang akan dilakukan oleh penulis adalah terdapat beberapa variabel independen serta dependen yang sama yaitu ukuran perusahaan, konservatisme akuntansi, dan penghindaran pajak.

Berdasarkan paparan tabel ringkasan penelitian terdahulu, untuk memudahkan pengambilan hipotesis maka penulis membuat ringkasan penelitian terdahulu yang memiliki pengaruh dan tidak memiliki pengaruh.

Tabel 2.3 Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Variabel Independen	Variabel Dependen (Penghindaran Pajak)	
		Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
1.	Ukuran Perusahaan (X1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewi &amp; Noviani (2017)</li> <li>2. Mulyati et al. (2019)</li> <li>3. Selviani et al. (2019)</li> <li>4. Fauziah (2021)</li> <li>5. Sari &amp; Marsono (2020)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Krisyadi &amp; Mulfandi (2021)</li> <li>2. Lubis et al. (2022)</li> </ol>
2.	Konservatisme Akuntansi (X2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rosdiani &amp; Hidayat (2020)</li> <li>2. Lismiyat &amp; Herliansyah (2021)</li> <li>3. Nurcholis et al. (2021)</li> <li>4. Pratiwi &amp; Djajanti (2021)</li> <li>5. Ellyanti &amp; Suwarti (2022)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewi &amp; Trisnawati (2021)</li> <li>2. Lubis et al. (2022)</li> </ol>

Sumber: Data diolah penulis, 2022

## 2.6 Kerangka Pemikiran

### 2.6.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengelompokan suatu perusahaan dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total aset maka semakin besar juga ukuran dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang tergolong besar cenderung akan memiliki total aset yang besar juga, artinya perusahaan akan mampu menghasilkan laba yang besar dan konsisten setiap tahunnya. Jika laba perusahaan besar, maka beban pajak yang harus dibayarkan juga besar.

Berdasarkan uraian di atas, diduga adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Dewi & Noviani (2017), Mulyati et al. (2019), Selviani et al. (2019), Fauziah (2021), dan Sari & Marsono (2020) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

### 2.6.2 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak

Konservatisme akuntansi merupakan suatu prinsip kehati-hatian dalam laporan keuangan dengan cara menunda pengakuan laba atau aset dan mempercepat pengakuan beban atau kerugian sehingga menyebabkan laba dan aset pada periode berjalan menjadi lebih rendah. Perusahaan yang akan membayar pajak dengan jumlah besar, cenderung akan memilih kebijakan akuntansi yang konservatif dalam laporan keuangannya guna menekan beban pajak seminimal mungkin.

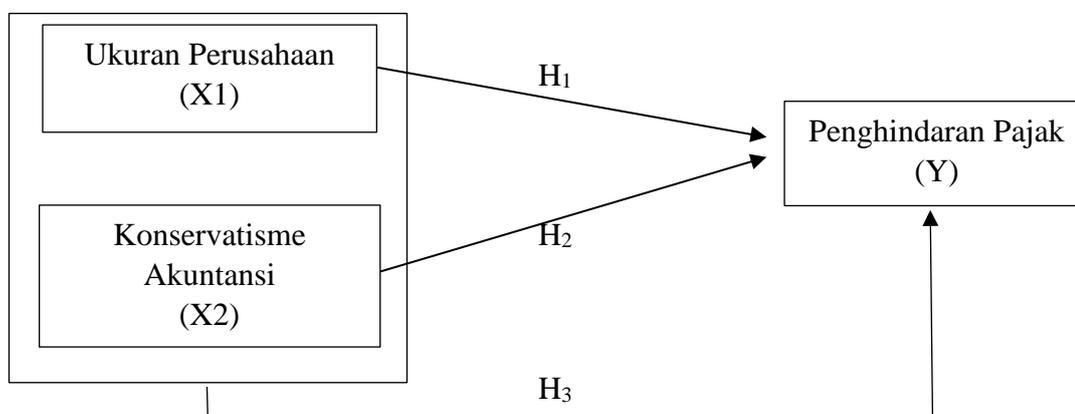
Berdasarkan uraian di atas, diduga adanya pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak. Hal ini didukung dalam penelitian Rosdiani & Hidayat (2020), Lismiyat & Herliansyah (2021), Nurcholis et al. (2021), Pratiwi & Djajanti (2021), dan Ellyanti & Suwarti (2022) yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

### 2.6.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak

Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut juga akan besar. Perusahaan yang tergolong besar cenderung akan memiliki total aset yang besar dan mampu menghasilkan laba yang besar secara konsisten setiap tahunnya. Semakin besar laba yang dihasilkan dalam laporan keuangannya maka semakin besar juga beban pajak terutang. Sedangkan, perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi dalam laporan keuangannya akan menunjukkan kualitas laba yang rendah karena prinsip ini menunda pengakuan ketika terjadi keuntungan atau laba dan mempercepat pengakuan ketika terjadi kerugian atau beban.

Berdasarkan uraian di atas, diduga adanya pengaruh ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak. Hal ini didukung dalam penelitian Dewi & Noviari (2017), Mulyati et al. (2019), Selviani et al. (2019), Fauziah (2021), dan Sari & Marsono (2020) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak serta didukung oleh penelitian Rosdiani & Hidayat (2020), Lismiyat & Herliansyah (2021), Nurcholis et al. (2021), Pratiwi & Djajanti (2021), dan Ellyanti & Suwarti (2022) yang menyimpulkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel independen yaitu Ukuran Perusahaan (X1) dan Konservatisme Akuntansi (X2) serta menggunakan satu variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak (Y). Sehingga tujuan penelitian ini adalah menguji apakah ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk lebih jelasnya maka penulis membuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

## 2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan prediksi atau jawaban sementara dari perumusan masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian. Hipotesis bersifat lemah karena jawaban yang diberikan hanya berlandaskan teori yang relevan, bukan berdasarkan fakta empiris yang dihasilkan dari pengumpulan data. Oleh karena itu, hipotesis dikemukakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mencoba membuat hipotesis sebagai jawaban sementara dari penelitian ini sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> = Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
- H<sub>2</sub> = Konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
- H<sub>3</sub> = Ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi berpengaruh positif secara simultan terhadap penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian verifikatif, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah *explonatory survey*, metode ini memiliki tujuan untuk menguji hipotesis, umumnya penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Uji hipotesis antar variabel ini akan dianalisis dengan teknik penelitian statistik kuantitatif.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

##### **3.2.1 Objek Analisis**

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi. Sedangkan, variabel dependen adalah penghindaran pajak. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menjelaskan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

##### **3.2.2 Unit Analisis**

Unit analisis yang digunakan adalah *organization*, yaitu berupa respon dari suatu divisi atau organisasi tertentu. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan organisasi atau perusahaan yang termasuk dalam sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2021 dengan menggunakan data tahunan sebagai dasar untuk penelitian.

##### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana variabel penelitian akan dianalisis guna memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 yang dapat diakses pada website resminya yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Sektor perdagangan, jasa, dan investasi merupakan salah satu sektor dalam klasifikasi JASICA. JASICA (*Jakarta Stock Industrial Classification*) adalah sistem klasifikasi sektoral yang digunakan untuk mengkategorikan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. JASICA sudah ada sejak tahun 1996. JASICA terdiri dari 9 sektor, salah satunya adalah sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Tepat pada tanggal 25 Januari 2021, Bursa Efek Indonesia memberlakukan aturan baru terkait perubahan klasifikasi industri perusahaan tercatat. Perubahan ini menunjukkan klasifikasi JASICA diganti menjadi IDX-IC (*Indonesia Stock Exchange Industrial*

*Classification*) dengan masa transisi selama tiga bulan. IDX-IC terdiri dari 12 sektor. Akibat perubahan klasifikasi dari JASICA ke IDX-IC menyebabkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi (JASICA) tersebar ke dalam 12 sektor yang ada di IDX-IC (Lampiran 1).

### 3.2.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data yang diteliti adalah data kuantitatif yang merupakan data sekunder. Data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan data konkrit biasanya berupa angka yang nantinya akan diukur untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu total aset, laba bersih, beban depresiasi, arus kas operasi, laba sebelum pajak dan laba fiskal yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi periode 2017-2021.

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data ini umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan yang sudah dipublikasikan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) selama periode 2017-2021. Jenis data yang akan digunakan berdasarkan waktu dan periode pengumpulannya akan berbentuk data panel yang merupakan gabungan dari *time series* dan *cross section*.

### 3.3 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan dalam penelitian guna memudahkan proses analisis dalam menentukan jenis dan indikator variabel-variabel yang akan digunakan. Oleh karena itu, penulis mengelompokan variabel-variabel penelitian menjadi dua kelompok, yaitu:

#### 1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Lubis (2018) variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya. Dalam penelitian ini, variabel independen yang akan digunakan adalah ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi.

#### 2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Lubis (2018) variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak.

Lengkapya, operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala Pengukuran
Ukuran Perusahaan	1. Total aset.	Size = Ln (Total Aset)	Rasio
Konservatisme akuntansi	1. Laba bersih. 2. Beban depresiasi. 3. Arus kas operasi. 4. Total aset.	$KA = \frac{(\text{Net Profit} + \text{Dep}) - \text{Cash Flow}}{\text{Total Asset}} \times -1$	Rasio
Penghindaran Pajak	1. Laba sebelum pajak. 2. Laba setelah rekonsiliasi fiskal. 3. Total aset.	$BTD = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$	Rasio

Sumber: Data diolah penulis, 2022

### 3.4 Metode Penarikan Sampel

Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk dalam sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Kemudian perusahaan-perusahaan ini akan dipilih kembali menjadi sampel dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun beberapa pertimbangan/kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
2. Perusahaan yang tidak mengalami *delisting* selama periode 2017-2021.
3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan menggunakan satuan mata uang Rupiah dalam pelaporan keuangannya selama periode 2017-2021.
4. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian yaitu 2017-2021.

Tabel 3.2 Pertimbangan Penarikan Sampel

No.	Pertimbangan	Jumlah
1.	Perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.	133
2.	Perusahaan yang tidak mengalami <i>delisting</i> selama periode 2017-2021	119
3.	Perusahaan yang memiliki data lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian selama periode 2017-2021.	117
4.	Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan menggunakan satuan mata uang Rupiah selama periode 2017-2021.	109
5.	Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian yaitu 2017-2021.	34
	Sampel penelitian	34
	Total sampel penelitian (5 tahun)	170

Sumber: www.idx.co.id. dan diolah penulis, 2022

Berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan dalam penarikan sampel penelitian, maka diperoleh sebanyak 34 perusahaan yang akan dijadikan sampel. Nama perusahaan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Daftar Sampel yang Memenuhi Pertimbangan Penelitian

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
1.	AKRA	PT AKR Corporindo Tbk	18.	MIKA	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
2.	APII	PT Arita Prima Indonesia Tbk	19.	PRDA	PT Prodia Widyahusada Tbk
3.	EPMT	Enseval Putera Megatrading Tbk	20.	ASGR	Astra Graphia Tbk
4.	MICE	Multi Indocitra Tbk	21.	DNET	PT Indoritel Makmur International Tbk
5.	SDPC	Millennium Pharmacon International Tbk	22.	MLPT	PT Multipolar Technology Tbk
6.	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk	23.	GEMA	Gema Grahasarana Tbk
7.	TURI	Tunas Ridean Tbk	24.	MFMI	Multifiling Mitra Indonesia Tbk
8.	UNTR	United Tractors Tbk	25.	SOSS	PT Shield On Service Tbk
9.	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk	26.	BOGA	PT Bintang Oto Global Tbk
10.	AMRT	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	27.	LTLS	PT Lautan Luas Tbk
11.	CSAP	Catur Sentosa Adiprana Tbk	28.	MPMX	Mitra Pinasthika Mustika Tbk
12.	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk	29.	RANC	Supra Boga Lestari Tbk
13.	MCAS	PT M Cash Integrasi Tbk	30.	BAYU	Bayu Buana Tbk
14.	MIDI	Midi Utama Indonesia Tbk	31.	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk
15.	JTPE	Jasuindo Tiga Perkasa Tbk	32.	MTDL	Metrodata Electronics Tbk
16.	LINK	PT Link Net Tbk	33.	BHIT	PT MNC Asia Holding Tbk
17.	SCMA	Surya Citra Media Tbk	34.	BMTR	PT Global Mediacom Tbk

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). dan diolah penulis, 2022

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data perlu dilakukan dalam penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diambil secara tidak langsung melalui media perantara yang dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan data runtun waktu (*time series*) dan data antar ruang (*cross section*). Sehingga metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan mendownload data berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi periode 2017-2021 melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Selain itu juga dilakukan penjelajahan berbagai jurnal, karya ilmiah, artikel, dan berbagai buku referensi sebagai sumber data dan acuan dalam penelitian ini.

### 3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu metode pengolahan data dalam memproses variabel-variabel yang tersedia untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dan memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Metode analisis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel. Ahmaddien & Susanto (2020) regresi data panel terdiri dari data *time series* dan *cross section*. Data panel merupakan data dari sejumlah *cross section* yang sama, yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Metode regresi data panel yang baik akan bersifat *Best Linear Unbiased Estimation* (BLUE). Untuk memperoleh persamaan yang bersifat BLUE, maka diperlukan uji asumsi klasik karena apabila suatu persamaan tidak bersifat BLUE maka persamaan tersebut masih diragukan kemampuannya dalam menghasilkan nilai prediksi yang akurat. Untuk membantu proses analisis data, peneliti menggunakan program Eviews versi 9.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Setelah mengumpulkan semua data yang dibutuhkan, selanjutnya peneliti akan melakukan serangkaian prosedur untuk menghitung dan mengolah data tersebut agar menghasilkan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat menunjang hipotesis yang diusulkan.

### 3.6.1 Metode Estimasi Regresi Data Panel

Sirait (2017) Untuk mengestimasi model regresi data panel maka terdapat tiga pendekatan yang sering digunakan yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Pada estimasi CEM dan FEM, keduanya menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS), hanya saja pada FEM intersepnya dinyatakan dengan variabel *dummy* atau *Least Square Dummy Variabel* (LSDV), sedangkan, pada estimasi REM menggunakan pendekatan *Generalized Least Square* (GLS).

#### 1. *Common Effect Model* (CEM)

CEM merupakan model yang paling sederhana karena seluruh data digabungkan tanpa memperhatikan individu dan waktu, hanya menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Sehingga dalam model ini ditaksirkan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Model ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil.

#### 2. *Fixed Effect Model* (FEM)

FEM merupakan model yang estimasi regresi data panel yang menaksirkan bahwa nilai intersepnya berbeda, tetapi slope koefisiennya sama. Untuk menangkap adanya perbedaan intersep, maka menggunakan *variabel dummy*. Model ini sering disebut dengan teknik *Least Square Dummy Variabel* (LSDV).

#### 3. *Random Effect Model* (REM)

REM merupakan model yang akan menaksirkan data panel di mana variabel gangguan saling berhubungan antar individu dan waktu. Pada model ini perbedaan intersepnya diakomodasi oleh *error term* dari masing-masing perusahaan. Model ini

sering disebut sebagai *Error Component Model* (ECM) atau *Generalized Least Square* (GLS).

### 3.6.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menjabarkan atau mengilustrasikan statistik data penelitian dan mengidentifikasi variabel-variabel pada setiap hipotesis. Analisis statistik deskriptif yang digunakan adalah rata-rata (*mean*), minimum, maksimum, dan standar deviasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi sebagai variabel independen serta penghindaran pajak sebagai variabel dependen.

### 3.6.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi data panel digunakan untuk menentukan persamaan estimasi regresi data panel yang akan digunakan. Basuki & Prawoto (2015) untuk memilih model regresi data panel maka diperlukan tiga pengujian yaitu uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier.

#### 1. Uji Chow

Uji chow digunakan untuk membandingkan antara model *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) yang paling sesuai dijadikan sebagai model dalam penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam uji chow adalah sebagai berikut:

$H_0$  = Jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka model yang dipilih adalah CEM.

$H_1$  = Jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka model yang dipilih adalah FEM.

#### 2. Uji Hausman

Uji hausman merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan pendekatan terbaik antara model *Random Effect Model* (REM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) dalam mengestimasi data panel. Hipotesis yang digunakan dalam uji hausman adalah sebagai berikut:

$H_0$  = Jika nilai probabilitas (P-value) untuk *cross section random*  $> 0,05$  (nilai signifikan) maka model terbaik yang digunakan untuk mengestimasi data panel adalah REM.

$H_1$  = Jika nilai probabilitas (P-value) untuk *cross section random*  $< 0,05$  (nilai signifikan) maka model terbaik yang digunakan untuk mengestimasi data panel adalah FEM.

#### 3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji lagrange multiplier merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan pendekatan terbaik antara model *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM) dalam mengestimasi data panel. Model REM dikembangkan oleh Breusch-pagan yang digunakan untuk menguji signifikansi yang didasarkan pada nilai

residual dari metode OLS. Hipotesis yang digunakan dalam uji lagrange multiplier adalah sebagai berikut:

$H_0$  = Jika nilai *cross section* Breusch-pagan  $> 0,05$  (nilai signifikan) maka model terbaik yang digunakan untuk mengestimasi data panel adalah CEM.

$H_1$  = Jika nilai *cross section* Breusch-pagan  $< 0,05$  (nilai signifikan) maka model terbaik yang digunakan untuk mengestimasi data panel adalah REM.

### 3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Basuki & Prawoto (2015) uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Dalam OLS terdiri dari satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Jenis asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Tidak ada ketentuan pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi, sehingga analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada.

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data yang sudah dikumpulkan berdistribusi normal atau diperoleh dari populasi normal. Metode pengujian normalitas tidak begitu rumit, sebenarnya data yang memiliki angka lebih dari 30 ( $n > 30$ ), maka sudah dapat dikatakan berdistribusi normal atau disebut juga sebagai sampel besar. Hal ini sejalan dengan teori *Central Limit Theorem*, yang menyatakan bahwa jika ukuran sampel yang digunakan lebih besar dari 30, maka data dianggap berdistribusi normal.

Dalam penelitian ini, uji normalitas data menggunakan uji Jarque-Bera. Dasar yang menjadi pengambilan keputusan uji normalitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas  $> 0,05$ , maka dapat dikatakan residual menyebar normal atau data berdistribusi normal.
- b. Jika nilai probabilitas  $< 0,05$ , maka dapat dikatakan residual tidak menyebar normal atau data tidak berdistribusi normal.

#### 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan keadaan di mana ditemukannya korelasi (hubungan) antara satu variabel independen dalam regresi dengan yang lain. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ini ditemukan korelasi tersebut karena apabila data penelitian mengalami multikolinearitas, maka koefisien regresi dari variabel independen tidak akan signifikan dan akan mempunyai *standard error* yang tinggi. Semakin kecil korelasi antar variabel independen, maka model regresi akan semakin baik.

Beberapa cara yang dilakukan agar data penelitian tidak mengalami multikolinearitas adalah mengganti atau mengeluarkan variabel yang berkolerasi tinggi, menambah jumlah observasi, dan dapat mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural, akar kuadrat atau bentuk *first difference delta*. Dalam penelitian ini, kriteria pengujian multikolinearitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai korelasi  $> 0,80$ , maka terdapat multikolinearitas diantara variabel independen.
- b. Jika nilai korelasi  $< 0,80$ , maka tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang memenuhi syarat heteroskedastisitas adalah adanya persamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut dengan homoskedastisitas. Beberapa metode yang bisa digunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah uji park atau uji white, uji glejser, grafik plot (scatter plot), dan uji koefisien korelasi spearman. Cara mengatasi gejala heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan alternatif uji lain, melakukan transformasi data penelitian menjadi Logaritma natural (Ln) atau yang lainnya, melakukan outlier data penelitian, atau dengan cara mengurangi atau menambah data penelitian.

Metode pengujian heteroskedastisitas yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah uji glejser, yaitu dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS\_RES). Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji glejser adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas  $> 0,05$ , maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai probabilitas  $< 0,05$ , maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Model regresi yang baik merupakan model yang independen dari autokorelasi.

Uji autokorelasi pada data panel dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Nilai uji Durbin-Watson kemudian dibandingkan dengan tabel Durbin-Watson untuk mengetahui keberadaan korelasi positif atau negatif. Ketentuan pengujian Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

- a. Jika  $dU < DW < 4-dU$ , maka tidak terjadi autokorelasi.
- b. Jika  $DW < dL$  atau  $DW > 4-dL$ , maka terjadi autokorelasi.
- c. Jika  $dL < DW < dU$  atau  $4-dU < DW < 4-dL$ , maka tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

### 3.6.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Data penelitian yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dengan program *Eviews 9* untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, model regresi linear berganda dapat memprediksi nilai variabel dependen apabila seluruh variabel independennya sudah diketahui nilainya. Adapun model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$BTDi, t = \beta_0 + \beta_1 SIZEi, t + \beta_2 KAI, t + \varepsilon$$

Keterangan:

$BTDi, t$	: Penghindaran pajak i pada tahun t
$\beta_0$	: Konstanta regresi
$\beta_1 SIZEi, t$	: Ukuran perusahaan i pada tahun t
$\beta_2 KAI, t$	: Konservatisme akuntansi i pada tahun t
$\varepsilon$	: Standar error

### 3.6.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan suatu langkah untuk membuktikan kebenaran sifat populasi berdasarkan data sampel. Para peneliti umumnya akan menggunakan data sampel sebagai data penelitian dibandingkan data populasi. Kemudian data sampel yang diambil dijadikan sebagai alat untuk verifikasi kebenaran populasi. Dalam menguji kebenaran hipotesis dari data sampel, maka uji statistik yang akan digunakan adalah uji t, uji f, dan koefisien determinasi (Basuki & Prawoto, 2015).

#### 1. Uji t

Uji t (uji parsial) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Secara parsial kriteria pengujian statistik t adalah sebagai berikut:

- Jika nilai t hitung < t tabel, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika nilai t hitung > t tabel, maka variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung masing-masing variabel independen dengan nilai t tabel di mana derajat kesalahannya adalah 5% atau ( $\alpha = 0,05$ ). Sehingga kriteria pengujian hipotesis dengan uji t adalah sebagai berikut:

- $H_{01}$ : Jika nilai Sig. > 0,05, maka ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
- $H_{11}$ : Jika nilai Sig. < 0,05, maka ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

- c.  $H_{02}$ : Jika nilai Sig.  $> 0,05$ , maka konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
- d.  $H_{12}$ : Jika nilai Sig.  $< 0,05$ , maka konservatisme akuntansi memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

## 2. Uji F

Uji F (uji simultan) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau simultan. Kriteria pengujian uji F adalah:

- a. Jika nilai F hitung  $< F$  tabel, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai F hitung  $> F$  tabel, artinya variabel dependen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.

Uji F dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi dengan signifikansi level  $0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ). Apabila nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$ , artinya secara simultan variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha$ , artinya secara simultan variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

- a.  $H_{03}$ : Jika nilai Sig.  $> 0,05$ , maka ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
- e.  $H_{13}$ : Jika nilai Sig.  $< 0,05$ , maka ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

## 3. Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan nilai yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu atau ( $0 < \text{Adjusted } R^2 < 1$ ). Nilai Adjusted  $R^2$  yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas dan sebaliknya, apabila nilai Adjusted  $R^2$  mendekati satu maka memiliki arti bahwa variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen (Awalia, 2019).

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Pengumpulan Data

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua variabel independen dan satu variabel dependen yaitu ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi serta pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Unit analisis yang digunakan adalah *organization* yaitu berupa laporan keuangan pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Untuk memudahkan pengolahan data, maka data diolah menggunakan program Eviews 9 agar dapat menjelaskan variabel-variabel yang diteliti. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang sumber datanya diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain (media perantara). Data penelitian ini diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang kemudian diseleksi kembali menggunakan metode *purposive sampling* untuk dijadikannya sebagai sampel penelitian. Dalam penelitian ini, jumlah populasi pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi periode 2017-2021 berjumlah 133 perusahaan dan yang terpilih menjadi sampel penelitian adalah 34 perusahaan.

Tabel 4.1 Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Pertimbangan	Jumlah
1.	Perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.	133
2.	Perusahaan yang tidak mengalami delisting selama periode 2017-2021	119
3.	Perusahaan yang memiliki data lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian selama periode 2017-2021.	117
4.	Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan menggunakan satuan mata uang Rupiah selama periode 2017-2021.	109
5.	Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian yaitu 2017-2021.	34
	Sampel penelitian	34
	Total sampel penelitian (5 tahun)	170

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). dan diolah penulis, 2022

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel penelitian adalah 34 perusahaan dengan 170 pengamatan. Berikut merupakan daftar nama perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian:

Tabel 4.2 Daftar Nama Perusahaan Sampel

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
1.	AKRA	PT AKR Corporindo Tbk	18.	MIKA	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
2.	APII	PT Arita Prima Indonesia Tbk	19.	PRDA	PT Prodia Widyahusada Tbk

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
3.	EPMT	Enseval Putera Megatrading Tbk	20.	ASGR	Astra Graphia Tbk
4.	MICE	Multi Indocitra Tbk	21.	DNET	PT Indoritel Makmur International Tbk
5.	SDPC	Millennium Pharmacon International Tbk	22.	MLPT	PT Multipolar Technology Tbk
6.	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk	23.	GEMA	Gema Grahasarana Tbk
7.	TURI	Tunas Ridean Tbk	24.	MFMI	Multifiling Mitra Indonesia Tbk
8.	UNTR	United Tractors Tbk	25.	SOSS	PT Shield On Service Tbk
9.	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk	26.	BOGA	PT Bintang Oto Global Tbk
10.	AMRT	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	27.	LTLS	PT Lautan Luas Tbk
11.	CSAP	Catur Sentosa Adiprana Tbk	28.	MPMX	Mitra Pinasthika Mustika Tbk
12.	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk	29.	RANC	Supra Boga Lestari Tbk
13.	MCAS	PT M Cash Integrasi Tbk	30.	BAYU	Bayu Buana Tbk
14.	MIDI	Midi Utama Indonesia Tbk	31.	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk
15.	JTPE	Jasuindo Tiga Perkasa Tbk	32.	MTDL	Metrodata Electronics Tbk
16.	LINK	PT Link Net Tbk	33.	BHIT	PT MNC Asia Holding Tbk
17.	SCMA	Surya Citra Media Tbk	34.	BMTR	PT Global Mediacom Tbk

Sumber: www.idx.co.id. dan diolah penulis, 2022

## 4.2 Kondisi Ukuran Perusahaan, Konservatisme Akuntansi, dan Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021

### 4.2.1 Kondisi Ukuran Perusahaan pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021

Ukuran perusahaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengelompokkan suatu perusahaan ke dalam kelompok besar atau kecil berdasarkan total asetnya. Semakin besar total aset maka semakin besar ukuran dari perusahaan tersebut. Perusahaan dengan total aset besar menandakan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan karena arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Adapun rumus ukuran perusahaan yang digunakan adalah:

$$\text{SIZE} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

Tabel 4.3 Data Perhitungan Ukuran Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021

No.	Kode	SIZE					Rata-Rata Perusahaan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	AKRA	30,4538	30,6238	30,6948	30,5587	30,7884	30,6239
2	APII	26,7711	26,8332	26,9194	26,9620	27,0191	26,9010
3	EPMT	29,6360	29,7500	29,7949	29,8515	29,9062	29,7877
4	MICE	27,4839	27,5572	27,6743	27,6313	27,6922	27,6078
5	SDPC	27,5670	27,8074	27,8387	27,7836	27,8186	27,7631

No.	Kode	SIZE					Rata-Rata Perusahaan
		2017	2018	2019	2020	2021	
6	TGKA	28,7043	28,8796	28,7283	28,8435	28,8560	28,8023
7	TURI	29,3294	29,4287	29,4704	29,3828	29,5480	29,4319
8	UNTR	32,0409	32,3870	32,3470	32,2342	32,3545	32,2727
9	ACES	29,1192	29,3027	29,4094	29,6116	29,6037	29,4093
10	AMRT	30,7176	30,7296	30,8088	30,8880	30,9450	30,8178
11	CSAP	29,2677	29,3863	29,5158	29,6613	29,7717	29,5206
12	ERAA	29,8141	30,1713	29,9081	30,0479	30,0622	30,0007
13	MCAS	27,0661	28,0020	28,4376	28,2382	28,3893	28,0266
14	MIDI	29,2158	29,2325	29,2385	29,4100	29,4785	29,3151
15	JTPE	27,6462	27,7146	27,7731	27,6684	27,8238	27,7252
16	LINK	29,3830	29,4267	29,5261	29,6851	29,9080	29,5858
17	SCMA	29,3148	29,5166	29,5356	29,5431	29,9249	29,5670
18	MIKA	29,1811	29,2582	29,3495	29,5379	29,5569	29,3767
19	PDRA	28,2452	28,2887	28,3296	28,4339	28,6311	28,3857
20	ASGR	28,5114	28,4514	28,6946	28,4591	28,6076	28,5448
21	DNET	30,0198	30,3071	30,3709	30,4773	30,5240	30,3398
22	MLPT	28,2573	28,3533	28,3759	28,5139	28,7273	28,4456
23	GEMA	27,4217	27,6177	27,5923	27,6026	27,6957	27,5860
24	MFMI	26,2234	26,3356	26,7680	26,5556	26,5528	26,4871
25	SOSS	26,1612	26,0773	26,3011	26,4063	26,4859	26,2863
26	BOGA	26,9776	27,0722	27,0862	27,1121	27,4249	27,1346
27	LTLS	29,3836	29,4745	29,3997	29,3402	29,4598	29,4115
28	MPMX	29,9073	30,1112	29,8890	29,8513	29,9205	29,9359
29	RANC	27,4129	27,5301	27,5824	27,9080	28,0445	27,6956
30	BAYU	27,3559	27,4090	27,4267	27,2637	27,3233	27,3557
31	MNCN	30,3429	30,4246	30,4731	30,5714	30,6930	30,5010
32	MTDL	28,9387	29,2106	29,3583	29,3972	29,6577	29,3125
33	BHIT	31,6657	31,6639	31,6848	31,7167	31,8055	31,7073
34	BMTR	30,9523	30,9972	31,0374	31,1049	31,1805	31,0545
	Rata-Rata	28,8379	28,9803	29,0394	29,0663	29,1818	29,0211
	Maximum	32,0409	32,3870	32,3470	32,2342	32,3545	32,2727
	Minimum	26,1612	26,0773	26,3011	26,4063	26,4859	26,2863

Sumber: data diolah oleh penulis, 2023



Sumber: data diolah oleh penulis, 2023

Gambar 4.1 Grafik Perhitungan Ukuran Perusahaan pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021

Berdasarkan tabel 4.3, perusahaan yang memiliki total aset paling besar selama periode 2017-2021 diduduki oleh UNTR yaitu sebesar 32,2727. Sedangkan, perusahaan yang memiliki total aset paling sedikit selama periode 2017-2021 diduduki oleh SOSS yaitu sebesar 26,2863.

Berdasarkan tabel 4.3 dan gambar 4.1, rata-rata ukuran perusahaan pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi selama periode 2017-2021 terus mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata ukuran perusahaan tahun 2017 sebesar 28,8379 kemudian tahun 2018 naik dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 28,9803. Pada tahun 2019 naik kembali dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 29,0394. Pada tahun 2020 dan 2021 terus naik dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 29,0663 dan 29,1818.

Berdasarkan data di atas, penulis menduga bahwa ada beberapa perusahaan yang sudah berskala besar karena grafik ukuran perusahaan yang meningkat setiap tahunnya. Semakin besar total aset yang dimiliki, maka semakin besar ukuran perusahaannya. Perusahaan dengan total aset besar menandakan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan karena arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Semakin besar juga ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks dan perusahaan mampu menyediakan sumber daya yang mumpuni.

#### **4.2.2 Kondisi Konservatisme Akuntansi pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021**

Konservatisme akuntansi merupakan teknik yang digunakan oleh perusahaan dalam mengakui pendapatan dan kerugian. Dalam penelitian ini konservatisme

akuntansi diukur dengan menjumlahkan laba bersih dan beban penyusutan kemudian dikurangi arus kas operasi, dibagi total aset dikalikan negatif 1. Semakin besar nilai positif rasio, menandakan perusahaan tersebut menerapkan akuntansi yang konservatif sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai negatif rasio menandakan perusahaan menerapkan akuntansi yang optimis (Hidayat, 2022). Adapun rumus konservatisme akuntansi yang digunakan adalah:

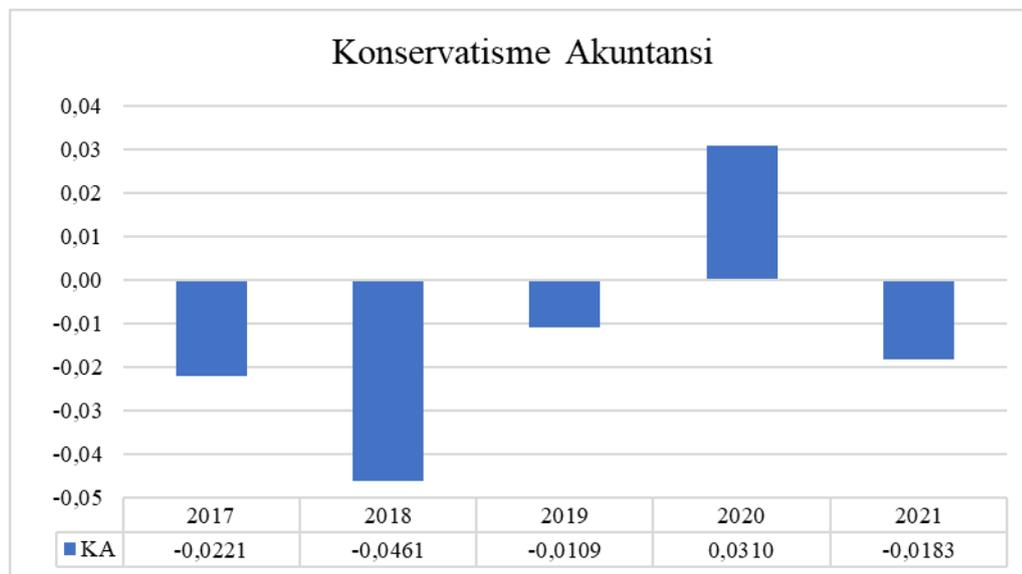
$$KA = \frac{(Net Profit + Dep) - Cash Flow}{Total Asset} \times -1$$

Tabel 4.4 Data Perhitungan Konservatisme Akuntansi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021

No.	Kode	Konservatisme Akuntansi					Rata-Rata Perusahaan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	AKRA	-0,0206	-0,0573	-0,0024	0,0027	0,0768	-0,0002
2	APII	-0,0269	-0,0176	0,0125	-0,0190	-0,0104	-0,0123
3	EPMT	-0,1134	-0,0284	-0,0528	0,0080	-0,0608	-0,0495
4	MICE	-0,0884	-0,0971	-0,0613	0,0111	-0,0234	-0,0518
5	SDPC	-0,0420	-0,1267	-0,0317	0,0458	-0,0361	-0,0381
6	TGKA	0,1185	-0,0893	0,2060	0,0809	-0,1371	0,0358
7	TURI	-0,0836	-0,0857	-0,0603	0,1241	-0,0667	-0,0344
8	UNTR	-0,0311	-0,0164	-0,1605	-0,0668	-0,0402	-0,0630
9	ACES	-0,0374	-0,1487	0,0011	0,0490	0,0192	-0,0233
10	AMRT	0,0250	0,1128	0,0589	0,0922	0,0360	0,0650
11	CSAP	-0,0201	-0,0537	0,0084	0,0414	-0,0466	-0,0141
12	ERAA	-0,1259	-0,2687	0,2029	0,1825	-0,1085	-0,0235
13	MCAS	-0,3358	-0,1311	-0,1829	-0,0542	0,0520	-0,1304
14	MIDI	0,0857	0,0816	0,1468	0,0416	0,0175	0,0746
15	JTPE	0,0030	0,0013	-0,0564	0,0582	0,0547	0,0122
16	LINK	-0,0181	0,0355	0,0132	-0,0023	-0,0078	0,0041
17	SCMA	-0,0469	0,0121	0,0028	0,0258	-0,0653	-0,0143
18	MIKA	-0,0110	-0,0098	-0,0103	-0,0055	0,0779	0,0083
19	PRDA	-0,0633	-0,0063	0,0253	0,0119	0,0038	-0,0057
20	ASGR	-0,0040	-0,2885	-0,0647	-0,1975	-0,0077	-0,1125
21	DNET	-0,0303	-0,0454	-0,0770	-0,0502	-0,0743	-0,0554
22	MLPT	0,0443	0,0131	0,0051	0,1672	0,0713	0,0602
23	GEMA	0,0078	0,0096	0,0993	0,0402	-0,0416	0,0231
24	MFMI	0,0493	0,0306	-0,2170	-0,0110	-0,0725	-0,0441
25	SOSS	0,0185	-0,2293	-0,1371	-0,0194	-0,0658	-0,0866
26	BOGA	-0,0138	0,0991	0,0562	0,0448	0,0098	0,0392
27	LTLS	-0,0280	-0,0287	0,0363	0,1181	0,0114	0,0218
28	MPMX	-0,0079	-0,3070	-0,0751	0,0257	0,0065	-0,0716
29	RANC	0,0507	0,0835	0,0198	0,0517	-0,0494	0,0312
30	BAYU	-0,0072	-0,0181	0,0238	0,1313	-0,0597	0,0140
31	MNCN	0,0254	-0,0417	-0,0410	-0,0528	-0,0259	-0,0272
32	MTDL	-0,0840	-0,0194	-0,0675	0,1400	-0,0933	-0,0248
33	BHIT	-0,0058	0,0262	0,0102	0,0407	0,0352	0,0213

No.	Kode	Konservatisme Akuntansi					Rata-Rata Perusahaan
		2017	2018	2019	2020	2021	
34	BMTR	0,0646	0,0428	0,0003	-0,0027	-0,0021	0,0206
	Rata-Rata	-0,0221	-0,0461	-0,0109	0,0310	-0,0183	-0,0133
	Maximum	0,1185	0,1128	0,2060	0,1825	0,0779	0,0746
	Minimum	-0,3358	-0,3070	-0,2170	-0,1975	-0,1371	-0,1304

Sumber: data diolah oleh penulis, 2023



Sumber: data diolah oleh penulis, 2023

Gambar 4.2 Grafik Perhitungan Konservatisme Akuntansi pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021

Berdasarkan tabel 4.4, perusahaan yang memiliki nilai konservatisme akuntansi paling besar selama periode 2017-2021 diduduki oleh MIDI yaitu sebesar 0,0746. Sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai konservatisme akuntansi paling sedikit selama periode 2017-2021 diduduki oleh MCAS yaitu sebesar -0,1304.

Berdasarkan tabel 4.4 dan gambar 4.2, rata-rata konservatisme akuntansi pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi selama periode 2017-2021 tidak konsisten. Pada tahun 2017 rata-rata konservatisme akuntansi cukup mendekati angka positif yakni sebesar -0,0221. Sedangkan, pada tahun 2018 rata-rata konservatisme akuntansi tidak mendekati angka positif yakni sebesar -0,0461. Pada tahun 2019 rata-rata konservatisme akuntansi cukup mendekati angka positif yakni sebesar -0,0109 dan puncaknya pada tahun 2020 rata-rata konservatisme akuntansi bernilai positif yakni sebesar 0,0310. Pada tahun 2021, rata-rata konservatisme akuntansi kembali cukup mendekati angka positif yaitu sebesar -0,0183.

Berdasarkan data di atas, penulis menduga bahwa ada beberapa perusahaan yang terindikasi menyajikan laporan keuangan yang konservatif baik disengaja maupun tidak karena memiliki nilai konservatisme mendekati nilai positif. Semakin besar nilai positif rasio, menandakan bahwa perusahaan tersebut menerapkan

akuntansi yang konservatif. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menerapkan konservatisme akuntansi dalam laporan keuangannya seperti membentuk cadangan kerugian piutang, menyusutkan aset tetap dengan metode saldo menurun ganda, masih mengoperasikan aset tetap yang umur ekonomisnya sudah habis atau bernilai buku nol, memperoleh keuntungan atas pertukaran aset tetap sajenis, melakukan provisi, mengakui pendapatan dengan metode *cash basis*, dan sebagainya.

#### 4.2.3 Kondisi Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021

Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan metode *BTD (Book Tax Differences)* yaitu selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal dibagi total aset. *BTD* digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam melaporkan laba yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai *BTD* maka semakin tinggi dugaan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak. Adapun rumus *BTD* yang digunakan adalah:

$$BTD (Book Tax Differences) = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Tabel 4.5 Data Perhitungan Penghindaran Pajak Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021

No.	Kode	Penghindaran Pajak (BTD)					Rata-Rata Perusahaan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	AKRA	-0,0060	-0,0508	0,0083	0,0107	0,0074	-0,0061
2	APII	-0,0095	-0,0041	-0,0088	0,0053	-0,0075	-0,0049
3	EPMT	0,0297	0,0266	0,0170	0,0276	0,0295	0,0261
4	MICE	0,0892	0,0125	0,0161	-0,0017	0,0166	0,0265
5	SDPC	-0,0072	-0,0067	-0,0051	-0,0079	-0,0191	-0,0092
6	TGKA	0,0313	0,0186	0,0320	0,0217	0,0508	0,0309
7	TURI	0,0860	0,0791	0,0714	-0,0095	0,0441	0,0542
8	UNTR	0,0934	0,1048	0,1183	0,0641	0,1120	0,0985
9	ACES	-0,0068	0,0029	-0,0040	-0,0156	0,0144	-0,0018
10	AMRT	-0,0034	-0,0018	0,0058	0,0020	0,0052	0,0016
11	CSAP	0,0092	0,0100	0,0118	0,0092	0,0161	0,0112
12	ERAA	0,0528	0,0558	0,0442	0,0695	0,1192	0,0683
13	MCAS	0,0087	0,1579	0,0899	0,0333	0,0653	0,0710
14	MIDI	0,0041	-0,0010	0,0010	-0,0056	-0,0006	-0,0004
15	JTPE	0,0102	0,0279	0,0424	0,0096	0,0178	0,0216
16	LINK	0,0042	-0,0488	-0,0239	0,0085	-0,0054	-0,0131
17	SCMA	0,3278	0,2791	0,2014	0,2193	0,1734	0,2402
18	MIKA	0,1813	0,1606	0,1743	0,1686	0,2458	0,1861
19	PDRA	0,0344	0,0245	0,0325	0,0282	0,0233	0,0286
20	ASGR	0,0361	0,0305	0,0112	-0,0015	0,0035	0,0160

No.	Kode	Penghindaran Pajak (BTD)					Rata-Rata Perusahaan
		2017	2018	2019	2020	2021	
21	DNET	0,0150	0,0189	0,0294	0,0141	0,0479	0,0250
22	MLPT	0,0047	-0,0162	0,0031	0,0082	0,0193	0,0038
23	GEMA	0,0282	0,0224	0,0348	0,0082	0,0110	0,0209
24	MFMI	0,0421	0,0466	0,2371	-0,0293	0,0138	0,0620
25	SOSS	0,0742	0,0646	0,1014	0,0264	0,0765	0,0686
26	BOGA	0,0259	0,0395	0,0398	0,0404	0,0677	0,0427
27	LTLS	0,0292	0,0281	0,0327	0,0505	0,0522	0,0385
28	MPMX	0,0461	-0,3917	0,0678	0,0293	0,0418	-0,0413
29	RANC	0,0086	0,0186	0,0252	0,0412	0,0103	0,0208
30	BAYU	0,0018	0,0106	0,0121	0,0276	0,0176	0,0139
31	MNCN	0,1640	0,0694	0,0925	0,1273	0,1584	0,1223
32	MTDL	0,1303	0,1203	0,1268	0,1159	0,1263	0,1239
33	BHIT	0,0610	0,0600	0,0789	0,0581	0,0690	0,0654
34	BMTR	0,0772	0,0693	0,1086	0,0863	0,1030	0,0889
	Rata-Rata	0,0492	0,0305	0,0537	0,0365	0,0508	0,0441
	Maximum	0,3278	0,2791	0,2371	0,2193	0,2458	0,2402
	Minimum	-0,0095	-0,3917	-0,0239	-0,0293	-0,0191	-0,0413

Sumber: data diolah oleh penulis, 2023



Sumber: data diolah oleh penulis, 2023

Gambar 4.3 Grafik Perhitungan Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Teraftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021

Berdasarkan tabel 4.5, perusahaan yang memiliki nilai BTD paling besar selama periode 2017-2021 diduduki oleh SCMA yaitu sebesar 0,2402. Sedangkan, perusahaan yang memiliki nilai BTD paling sedikit selama periode 2017-2021 diduduki oleh MPMX yaitu sebesar -0,0413.

Berdasarkan tabel 4.5 dan gambar 4.3, rata-rata penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi selama periode 2017-2021 tidak konsisten. Pada tahun 2017 rata-rata BTD sebesar 0,0492. Pada tahun 2018 rata-rata BTD mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni 0,0305. Kemudian pada tahun 2019 rata-rata BTD naik kembali dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 0,0537. Sedangkan, pada tahun 2020 rata-rata BTD turun dibandingkan tahun sebelumnya yakni 0,0365 dan pada tahun 2021 rata-rata BTD naik kembali dari tahun sebelumnya menjadi 0,0508.

Berdasarkan data di atas, penulis menduga bahwa ada beberapa perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak karena memiliki nilai BTD yang tinggi. Perusahaan yang memiliki nilai BTD tinggi, menandakan bahwa adanya upaya perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan laba fiskal yang rendah yang akan berdampak pada pembayaran pajak yang rendah juga.

### 4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan program Eviews 9 untuk memperlihatkan gambaran distribusi frekuensi data dan berapa hitungan pokok statistiknya seperti rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Analisis ini diharapkan menghasilkan perolehan yang tepat.

Tabel 4.6 Uji Statistik Deskriptif

Date: 02/25/23

Time: 20:28

Sample: 2017 2021

	BTD	SIZE	KA
Mean	0.044144	29.02115	-0.013283
Median	0.028000	29.30875	-0.006750
Maximum	0.327800	32.38700	0.206000
Minimum	-0.391700	26.07730	-0.335800
Std. Dev.	0.069796	1.462855	0.085265
Skewness	-0.150956	0.076028	-0.752911
Kurtosis	13.28186	2.423161	5.372565
Jarque-Bera	749.4712	2.520710	55.93400
Probability	0.000000	0.283553	0.000000
Sum	7.504400	4933.595	-2.258100
Sum Sq. Dev.	0.823280	361.6506	1.228644
Observations	170	170	170

Sumber: *Output* Eviews 9 yang diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 170 data. Ukuran perusahaan (X1) memiliki nilai terkecil sebesar 26,07730 yang dimiliki oleh SOSS pada tahun 2018 sedangkan, nilai terbesarnya adalah 32,38700 yang dimiliki oleh UNTR pada tahun 2018. Selain itu, ukuran perusahaan (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 29,02115 dengan standar deviasinya sebesar 1,462855.

Konservatisme akuntansi (X2) memiliki nilai terkecil sebesar -0,335800 yang dimiliki oleh MCAS pada tahun 2017 kemudian nilai terbesarnya adalah 0,206000 yang dimiliki oleh TGKA pada tahun 2019. Selain itu, konservatisme akuntansi (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar -0,013283 dengan standar deviasinya sebesar 0,085265.

Penghindaran pajak (Y) yang diproksikan dengan BTD (*Book Tax Differences*) memiliki nilai terkecil sebesar -0,391700 yang dimiliki oleh MPMX pada tahun 2018 sedangkan, nilai terbesarnya adalah 0,327800 yang dimiliki SCMA pada tahun 2017. Selain itu, penghindaran pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,044144 dengan standar deviasinya sebesar 0,069796.

#### 4.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi data panel digunakan untuk menentukan persamaan estimasi regresi data panel yang akan digunakan. Untuk menguji model regresi yang akan digunakan maka perlu melakukan tiga pengujian yaitu uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier.

##### 4.4.1 Uji Chow

Untuk menentukan model yang tepat antara *common effect model* dan *fixed effect model* maka dalam penelitian ini dilakukan uji chow. Hipotesis yang digunakan dalam uji chow adalah sebagai berikut:

$H_0$  = Jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka model yang dipilih adalah CEM.

$H_1$  = Jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka model yang dipilih adalah FEM

Tabel 4.7 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.142796	(33,134)	<b>0.0000</b>
Cross-section Chi-square	187.065025	33	0.0000

Sumber: *Output* Eviews 9 yang diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa nilai probabilitas untuk *cross-section F* adalah sebesar 0,0000 atau  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang lebih tepat untuk mengestimasi data panel adalah model *Fixed Effect Model* (FEM).

#### 4.4.2 Uji Hausman

Berdasarkan uji chow sebelumnya, diperoleh hasil bahwa model yang tepat digunakan adalah *fixed effect model*, sehingga perlu dilakukan pengujian lagi untuk menentukan model yang tepat antara *fixed effect model* dan *random effect model* dengan menggunakan uji hausman. Hipotesis yang digunakan dalam uji hausman adalah sebagai berikut:

$H_0$  = Jika nilai probabilitas (P-value) untuk *cross section random*  $> 0,05$  (nilai signifikan) maka model terbaik yang digunakan untuk mengestimasi data panel adalah REM.

$H_1$  = Jika nilai probabilitas (P-value) untuk *cross section random*  $< 0,05$  (nilai signifikan) maka model terbaik yang digunakan untuk mengestimasi data panel adalah FEM.

Tabel 4.8 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.023299	2	<b>0.5995</b>

Sumber: *Output Eviews 9* yang diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa nilai probabilitas untuk *cross-section random* adalah sebesar 0,5995 atau  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang lebih tepat untuk mengestimasi data panel adalah model *Random Effect Model* (REM).

#### 4.4.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Berdasarkan hasil pengujian chow dan hausman memperoleh hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan pengujian lagi untuk mengetahui model mana yang lebih dominan dalam mengestimasi data panel. Pengujian ini dilakukan dengan uji lagrange multiplier. Uji lagrange multiplier adalah pengujian yang digunakan untuk menentukan model yang tepat antara *common effect model* dan *random effect model*. Hipotesis yang digunakan dalam uji lagrange multiplier adalah sebagai berikut:

$H_0$  = Jika nilai *cross section Breusch-pagan*  $> 0,05$  (nilai signifikan) maka model terbaik yang digunakan untuk mengestimasi data panel adalah CEM.

$H_1$  = Jika nilai *cross section* Breusch-pagan < 0,05 (nilai signifikan) maka model terbaik yang digunakan untuk mengestimasi data panel adalah REM.

Tabel 4.9 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects  
 Null hypotheses: No effects  
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	113.6171 (0.0000)	0.457179 (0.4989)	114.0743 (0.0000)
Honda	10.65913 (0.0000)	-0.676150 --	7.059035 (0.0000)
King-Wu	10.65913 (0.0000)	-0.676150 --	2.866145 (0.0021)
Standardized Honda	11.12590 (0.0000)	-0.392204 --	3.402847 (0.0003)
Standardized King-Wu	11.12590 (0.0000)	-0.392204 --	0.253072 (0.4001)
Gourieriou, et al.*	--	--	113.6171 (< 0.01)

Sumber: *Output Eviews 9* yang diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai *cross-section* untuk Breusch-Pagan adalah sebesar 0,0000 atau < 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang lebih tepat untuk mengestimasi data panel adalah model *Random Effect Model* (REM).

Untuk menentukan model mana yang tepat untuk penelitian ini, maka penulis membuatkan tabel kesimpulan atas uji model regresi data panel.

Tabel 4.10 Hasil Uji Model Regresi Data Panel

No.	Metode	Pengujian	Hasil
1.	Uji Chow	$H_0$ : <i>Common Effect Model</i> $H_1$ : <i>Fixed Effect Model</i>	<i>Fixed Effect Model</i>
2.	Uji Hausman	$H_0$ : <i>Random Effect Model</i> $H_1$ : <i>Fixed Effect Model</i>	<i>Random Effect Model</i>
3.	Uji Lagrange Multiplier	$H_0$ : <i>Common Effect Model</i> $H_1$ : <i>Random Effect Model</i>	<i>Random Effect Model</i>
Kesimpulan		<i>Random Effect Model</i>	

Sumber: *Data diolah penulis*, 2023

## 4.5 Uji Asumsi Klasik

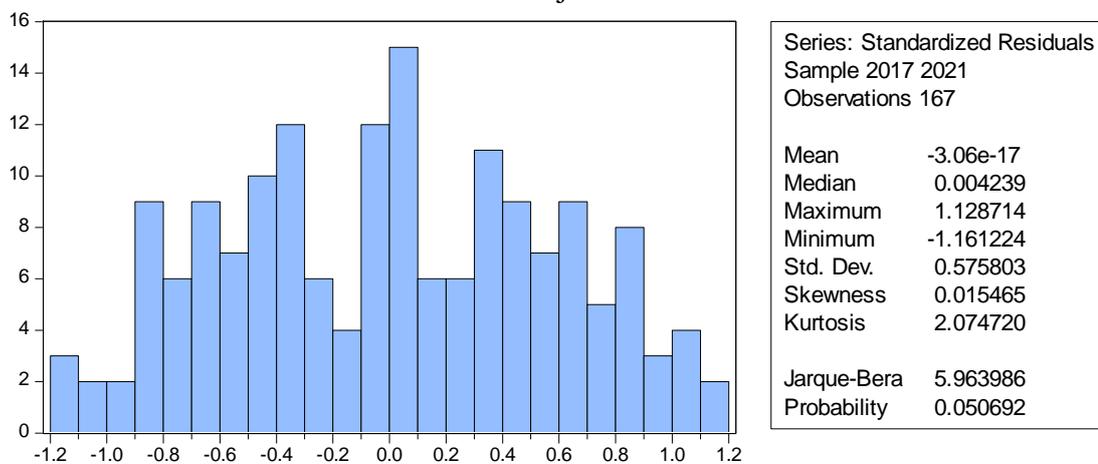
### 4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data yang sudah dikumpulkan berdistribusi normal atau diperoleh dari populasi normal. Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah uji Jarque-Bera. Hipotesis yang digunakan dalam uji Jarque-Bera adalah sebagai berikut:

$H_0$  = Jika nilai probabilitas  $> 0,05$ , maka data berdistribusi normal.

$H_1$  = Jika nilai probabilitas  $< 0,05$ , maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.11 Uji Normalitas



Sumber: *Output Eviews 9* yang diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 5,963986 dengan probabilitas  $0,050692 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya data berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, ukuran sampel sebelumnya berjumlah 170 tetapi data di outlier dengan metode *absolute standardize* lebih dari 3 sehingga sebanyak 3 data harus dikeluarkan dalam penelitian dan total data penelitian menjadi 167 data.

### 4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Hipotesis yang digunakan dalam uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

$H_0$  = Jika nilai korelasi  $> 0,80$ , maka model regresi mengandung multikolinearitas diantara variabel independen.

$H_1$  = Jika nilai korelasi  $< 0,80$ , maka tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen.

Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas

	SIZE	KA
SIZE	1.000000	<b>0.037799</b>
KA	<b>0.037799</b>	1.000000

Sumber: *Output Eviews 9* yang diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa nilai korelasi antara variabel ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi adalah  $0,037799 < 0,08$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung multikolinearitas.

### 4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidak-samaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Metode pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji glejser. Hipotesis yang digunakan dalam uji glejser adalah sebagai berikut:

$H_0$  = Jika nilai probabilitas  $> 0,05$ , maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

$H_1$  = Jika nilai probabilitas  $< 0,05$ , maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4.13 Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 02/25/23 Time: 21:06  
 Sample: 2017 2021  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 34  
 Total panel (unbalanced) observations: 167  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.702451	0.845538	2.013454	0.0457
SIZE	-0.044532	0.029088	-1.530923	<b>0.1277</b>
KA	-0.451149	0.396236	-1.138586	<b>0.2565</b>

Sumber: *Output Eviews 9* yang diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa nilai probabilitas dari kedua variabel independen adalah ukuran perusahaan  $0,1277 > 0,05$  dan konservatisme akuntansi  $0,2565 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### 4.5.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu

pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Durbin-Watson. Hipotesis yang digunakan dalam uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

$H_0$  = Jika  $dU < DW < 4-dU$ , maka tidak terjadi autokorelasi.

$H_1$  = Jika  $DW < dL$  atau  $DW > 4-dL$ , maka terjadi autokorelasi.

$H_2$  = Jika  $dL < DW < dU$  atau  $4-dU < DW < 4-dL$ , maka tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

Tabel 4.14 Uji Autokorelasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.613301	Mean dependent var	0.010578
Adjusted R-squared	0.498835	S.D. dependent var	0.028829
S.E. of regression	0.028099	Sum squared resid	0.129483
F-statistic	5.357624	<b>Durbin-Watson stat</b>	<b>1.829979</b>
Prob(F-statistic)	0.005573		

Sumber: *Output Eviews 9* yang diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.14 diketahui bahwa nilai DW (Durbin-Watson) adalah 1,829979. Apabila dilihat dalam tabel DW dengan jumlah variabel independen ( $k$ ) 2 dan jumlah data ( $n$ ) 167 diperoleh nilai  $dL$  sebesar 1,7227 dan  $dU$  sebesar 1,7712 maka  $4-dU$  adalah 2,2288 dan  $4-dL$  adalah 2,2773. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $dU < DW < 4-dU$  atau  $1,7712 < 1,829979 < 2,2288$  maka  $H_0$  diterima,  $H_1$  dan  $H_2$  ditolak. Artinya tidak terjadi autokorelasi.

#### 4.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi data panel merupakan regresi gabungan yang terdiri dari data *time series* dan *cross section*. Pengujian regresi data panel dilakukan guna mengetahui apakah terdapat pengaruh atau tidak variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan model *random effect model*.

Tabel 4.15 Analisis Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: *BTD*  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 02/25/23 Time: 21:10  
 Sample: 2017 2021  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 34  
 Total panel (unbalanced) observations: 167  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	<b>-0.236505</b>	0.180752	-1.308448	0.1926
SIZE	<b>0.009470</b>	0.006215	1.523703	0.1295
KA	<b>0.155446</b>	0.053702	2.894608	0.0043

Sumber: *Output Eviews 9* yang diolah oleh penulis, 2023

Formulasi persamaan analisis regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BTD_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 SIZE_{i,t} + \beta_2 KA_{i,t} + \varepsilon$$

$$BTD_{i,t} = -0,236505 C + 0,009470 SIZE + 0,155446 KA + \varepsilon$$

Keterangan:

$BTD_{i,t}$  : Penghindaran pajak *i* pada tahun *t*  
 $\beta_0$  : Konstanta regresi  
 $\beta_1 SIZE_{i,t}$  : Ukuran perusahaan *i* pada tahun *t*  
 $\beta_2 KA_{i,t}$  : Konservatisme akuntansi *i* pada tahun *t*  
 $\varepsilon$  : Standar error

Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa:

1. Nilai konstanta memiliki nilai sebesar -0,236505 artinya jika semua variabel independen meliputi ukuran perusahaan (X1) dan konservatisme akuntansi (X2) bernilai 0, maka nilai penghindaran pajak sebesar -0,236505.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel ukuran perusahaan (X1) memiliki nilai sebesar 0,009470 artinya jika ukuran perusahaan mengalami kenaikan sebesar 1%, maka penghindaran pajak akan naik juga sebesar 0,009470 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai konstan.
3. Nilai koefisien regresi untuk konservatisme akuntansi (X2) memiliki nilai sebesar 0,155446 artinya jika konservatisme akuntansi mengalami kenaikan sebesar 1%, maka penghindaran pajak akan mengalami kenaikan juga sebesar 0,155446 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai konstan.

## 4.7 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan salah satu prosedur yang bertujuan untuk memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model *random effect model*.

### 4.7.1 Uji t

Uji t merupakan pengujian secara parsial untuk melihat seberapa jauh masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen berdasarkan tingkat signifikansi 0,05. Pada penelitian ini, uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dalam uji t adalah sebagai berikut:

- $H_{01}$  : Jika nilai Sig. > 0,05, maka ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
- $H_{11}$  : Jika nilai Sig. < 0,05, maka ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
- $H_{02}$  : Jika nilai Sig. > 0,05, maka konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
- $H_{12}$  : Jika nilai Sig. < 0,05, maka konservatisme akuntansi memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 4.16 Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.236505	0.180752	-1.308448	0.1926
SIZE	0.009470	0.006215	1.523703	<b>0.1295</b>
KA	0.155446	0.053702	2.894608	<b>0.0043</b>

Sumber: *Output Eviews 9* yang diolah oleh penulis, 2023

Hipotesis 1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak  
Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa hasil uji t nilai probabilitas variabel ukuran perusahaan > nilai probabilitas kritis ( $\alpha = 5\%$ ) atau  $0,1295 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka  $H_{01}$  diterima dan  $H_{11}$  ditolak.

Hipotesis 2: Konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa hasil uji t nilai probabilitas variabel konservatisme akuntansi < nilai probabilitas kritis ( $\alpha = 5\%$ ) atau  $0,0043 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{12}$  diterima.

#### 4.7.2 Uji F

Uji F merupakan pengujian secara simultan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama berdasarkan tingkat signifikansi 0,05. Pada penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dalam uji t adalah sebagai berikut:

- $H_{03}$  : Jika nilai Sig. > 0,05, maka ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
- $H_{13}$  : Jika nilai Sig. < 0,05, maka ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 4.17 Uji F

Weighted Statistics			
R-squared	0.613301	Mean dependent var	0.010578
Adjusted R-squared	0.498835	S.D. dependent var	0.028829
S.E. of regression	0.028099	Sum squared resid	0.129483
F-statistic	5.357624	Durbin-Watson stat	1.829979
Prob(F-statistic)	<b>0.005573</b>		

Sumber: *Output Eviews 9* yang diolah oleh penulis, 2023

Hipotesis 3: Ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi berpengaruh positif secara simultan terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan tabel 4.17 diketahui bahwa hasil uji F nilai Prob (F-Statistic) sebesar  $0,005573 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka  $H_{03}$  ditolak dan  $H_{13}$  diterima.

#### 4.7.3 Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi merupakan pengujian yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R<sup>2</sup> berkisar antara 0 dan 1. Nilai R<sup>2</sup> yang semakin mendekati 1 maka akan dianggap semakin baik karena memiliki arti bahwa variabel independen dapat memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan dalam memprediksi variabel dependen.

Tabel 4.18 Koefisien Determinasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.613301	Mean dependent var	0.010578
Adjusted R-squared	<b>0.498835</b>	S.D. dependent var	0.028829
S.E. of regression	0.028099	Sum squared resid	0.129483
F-statistic	5.357624	Durbin-Watson stat	1.829979
Prob(F-statistic)	0.005573		

Sumber: *Output Eviews 9* yang diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.18 diketahui bahwa hasil uji koefisien determinasi atau nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,498835 atau 49,88%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 49,88% penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi, sedangkan, sisanya sebesar 50,12% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

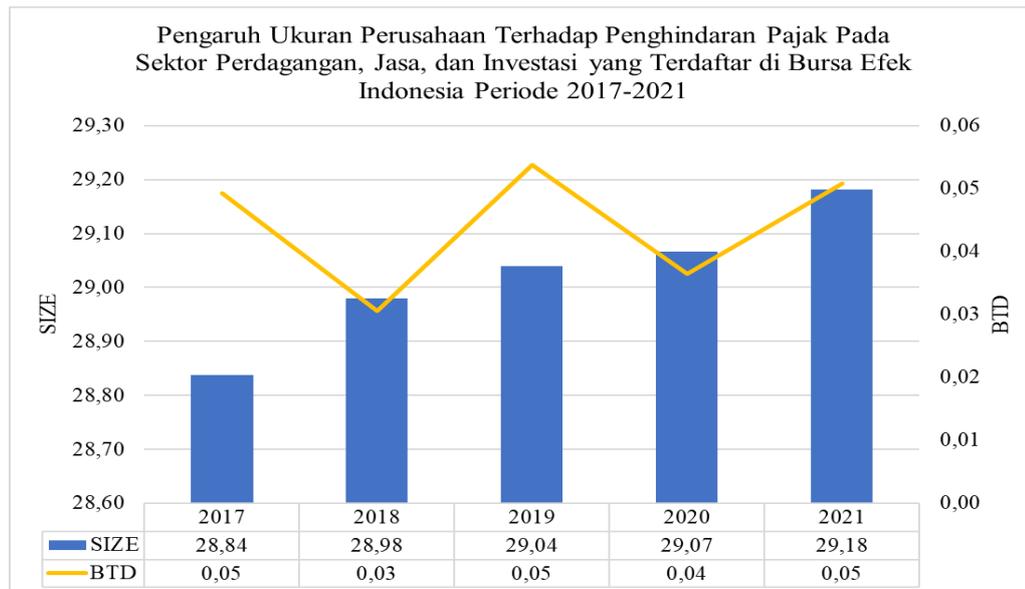
#### 4.8 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh penulis pada 25 perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 dengan program *eviews* versi 9 terkait pengaruh ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak, maka penulis akan menafsirkan hasil penelitian yang didukung dengan teori-teori yang ada dan hasil penelitian-penelitian lebih dahulu.

##### 4.8.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021

Ukuran perusahaan adalah parameter dalam mengelompokan suatu perusahaan dalam kelompok besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan karena memiliki arus kas yang positif dan diharapkan memiliki prospek yang baik dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, diketahui bahwa nilai probabilitas variabel ukuran perusahaan pada uji t lebih besar dari 0,05 atau  $0,1295 > 0,05$  sehingga  $H_1$  ditolak. Artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Selain itu, dapat dilihat juga perbandingan rata-rata ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada grafik dibawah ini.



Sumber: data diolah oleh penulis, 2023

**Gambar 4.4 Grafik Rata-Rata Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021**

Berdasarkan gambar 4.4 diduga bahwa perusahaan pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi tidak memanfaatkan ukuran perusahaan sebagai opsi dalam praktik penghindaran pajak karena pada tahun 2017 rata-rata ukuran perusahaan sebesar 28,84 sedangkan, rata-rata penghindaran pajak sebesar 0,05. Tahun 2018 rata-rata ukuran perusahaan meningkat menjadi 28,98 dan rata-rata penghindaran pajak turun menjadi 0,03. Pada tahun 2019 rata-rata ukuran perusahaan naik kembali menjadi 29,04 sedangkan, rata-rata penghindaran pajak yang sebelumnya turun kemudian naik menjadi 0,05. Pada tahun 2020 rata-rata ukuran perusahaan kembali meningkat menjadi 29,07 sedangkan, rata-rata penghindaran pajak turun lagi menjadi 0,04. Pada tahun 2021 rata-rata ukuran perusahaan naik dan rata-rata penghindaran pajak naik menjadi 29,18 dan 0,05.

Hal ini diduga disebabkan karena ukuran perusahaan yang termasuk dalam skala besar cenderung akan menghindari praktik penghindaran pajak karena perusahaan yang berskala besar akan lebih sering dipantau oleh penanam modal serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, perusahaan berskala besar juga sering mendapatkan sorotan dari Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat sehingga mereka cenderung akan menghindari praktik penghindaran pajak untuk menjaga kepercayaan para penanam modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat.

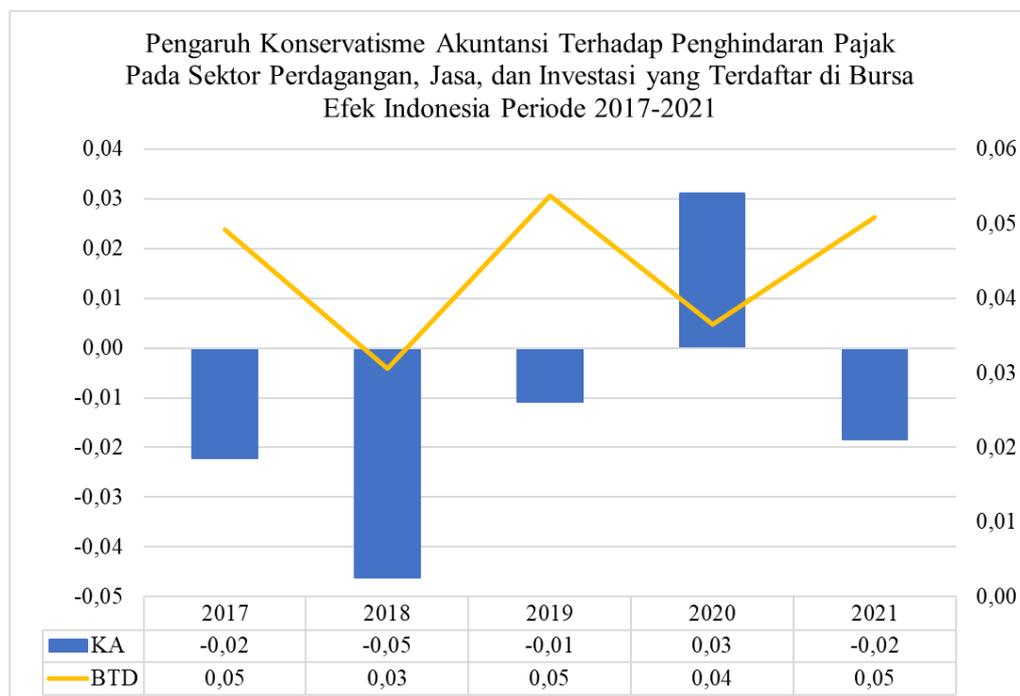
Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Krisyadi & Mulfandi (2021) dan Lubis, et al. (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi hasil penelitian ini tidak didukung oleh hasil

penelitian Dewi & Noviari (2017), Mulyati et al. (2019), Selviani et al. (2019), Fauziah (2021), dan Sari & Marsono (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### 4.8.2 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021

Konservatisme akuntansi adalah respon perusahaan dalam mendapati ketidakjelasan dalam mengakui pendapatan dan kerugian sehingga laporan keuangan akan bersifat pesimisme. Praktik konservatisme akuntansi dilakukan dengan cara menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya yang mungkin akan terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, diketahui bahwa nilai probabilitas variabel konservatisme akuntansi pada uji t lebih kecil dari 0,05 atau  $0,0066 < 0,05$  sehingga  $H_2$  diterima. Artinya konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Selain itu, dapat dilihat juga perbandingan rata-rata konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak pada grafik dibawah ini.



Sumber: data diolah oleh penulis, 2023

Gambar 4.5 Grafik Rata-Rata Konservatisme Akuntansi dan Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021

Berdasarkan gambar 4.5 diduga bahwa perusahaan pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi memanfaatkan konservatisme akuntansi sebagai opsi untuk praktik penghindaran pajak karena pada tahun 2017 rata-rata konservatisme akuntansi bernilai negatif sebesar -0,02 sedangkan, rata-rata penghindaran pajak sebesar 0,05. Tahun 2018 rata-rata konservatisme akuntansi turun menjadi -0,05 dan rata-rata penghindaran pajak juga turun menjadi 0,03. Pada tahun 2019 rata-rata konservatisme akuntansi naik menjadi -0,01 dan rata-rata penghindaran pajak juga naik menjadi 0,05. Pada tahun 2020 rata-rata konservatisme akuntansi naik menjadi bernilai positif 0,03 dan rata-rata penghindaran pajak bertambah turun menjadi 0,04. Pada tahun 2021 rata-rata konservatisme akuntansi turun kembali menjadi -0,02 dan rata-rata penghindaran pajak naik menjadi 0,05.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 banyak perusahaan pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi diindikasikan melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan konservatisme akuntansi karena pada tahun 2020 nilai konservatisme akuntansi memiliki nilai positif dan nilai penghindaran pajak pada tahun 2020 adalah nilai paling rendah antara tahun 2017-2021. Hal ini diduga karena perusahaan menerapkan konservatisme akuntansi dalam laporan keuangannya sehingga ketika perusahaan mendapatkan laba atau untung tidak segera mengakuinya sebagai aset yang terlalu besar dan sebaliknya, ketika perusahaan mengalami kerugian atau mengeluarkan biaya maka akan segera mengakuinya tanpa menunggu didaptkannya bukti nyata.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Rosdiani & Hidayat (2020), Lismiyat & Herliansyah (2021), Nurcholis et al. (2021), Pratiwi & Djajanti (2021), dan Ellyanti & Suwanti (2022) yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi hasil penelitian ini tidak didukung oleh hasil penelitian Dewi & Trisnawati (2021) dan Lubis, et al. (2022) yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **4.8.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021**

Berdasarkan hasil uji F atau simultan pada tabel 4.17, diketahui variabel independen yaitu ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi secara simultan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji F nilai Prob (F-Statistic) lebih kecil dari 0,05 atau  $0,005573 < 0,05$  sehingga  $H_3$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan (X1) dan konservatisme akuntansi (X2) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Y) pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

Untuk memudahkan pembaca dalam melihat hasil pembahasan dan interpretasi hasil penelitian, maka penulis membuatkan tabel ringkasan dari hasil penelitian ini yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 dengan tabel dibawah ini:

Tabel 4.19 Hasil Hipotesis Penelitian

No.	Keterangan	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
1	Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.	H <sub>1</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.	Ditolak
2	Pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak.	H <sub>2</sub> : Konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.	Konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.	Diterima
3	Pengaruh ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak.	H <sub>3</sub> : Ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi berpengaruh positif secara simultan terhadap penghindaran pajak.	Ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi berpengaruh positif secara simultan terhadap penghindaran pajak.	Diterima

Sumber: data diolah oleh penulis, 2023

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Berdasarkan hasil pengujian pengaruh yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Hal ini disebabkan karena ukuran perusahaan yang termasuk dalam skala besar sering mendapatkan sorotan serta dipantau oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah, masyarakat, dan investor sehingga perusahaan cenderung akan menghindari praktik penghindaran pajak untuk menjaga kepercayaan mereka. Pada sektor ini perusahaan yang berskala besar tidak memanfaatkan *power* nya untuk melakukan praktik penghindaran pajak.
2. Konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Hal ini disebabkan karena perusahaan pada sektor ini cenderung menerapkan sistem konservatisme akuntansi atau kehati-hatian dalam laporan keuangannya ketika mengakui pendapatan dan beban. Perusahaan akan memperlambat atau menunda pengakuan pendapatan yang mungkin akan terjadi dan mempercepat pengakuan biaya tanpa harus menunggu didapatkannya bukti yang nyata.
3. Ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi berpengaruh positif secara simultan terhadap penghindaran pajak pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Hasil ini menandakan bahwa perusahaan pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi memanfaatkan teknik penghindaran pajak secara legal dan aman tanpa harus melanggar ketentuan perpajakan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil bab pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

##### **5.2.1 Bagi Praktisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi untuk lebih berjaga-jaga dalam membuat kebijakan terkait perencanaan pajak agar tidak merusak reputasi perusahaan. Sedangkan, bagi investor ataupun calon investor, diharapkan untuk selalu

mengkaji terlebih dahulu kinerja dari suatu perusahaan dengan memperhatikan penghindaran pajak, ukuran perusahaan, dan konservatisme akuntansi sebagai bahan evaluasi dalam mengambil keputusan investasi.

### **5.3.1 Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi yang mempengaruhi penghindaran pajak sehingga dapat dijadikan rujukan dalam mengembangkan penelitian serupa. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas objek penelitian selain ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi karena masih banyak faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menambah variabel, sub variabel, atau indikator penelitian lain seperti *transfer pricing*, hubungan antara induk dan anak perusahaan, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmaddien, I. & Susanto, B. (2020). *Eviews 9: Analisis Regresi Data Panel*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Amalia, H. (2017). *Pengaruh Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Andriana, M. (2021). Accrual Basis Vs Cash Basis, Mana yang Lebih Baik?. Tersedia di: <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/ACCRUAL-BASIS-VS-CASH-BASIS-MANA-YANG-LEBIH-BAIK/>
- Awalia, S. M. (2019). *Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2017*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Azzahra, D. R. (2022). *Pengaruh Book Tax Gap, Karakter Eksekutif dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah) 2020-2021. Bps.go.id.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2015). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews)*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Bursa Efek Indonesia. (2022). Laporan Keuangan Tahunan 2017, 2018, 2019, dan 2020. Idx.go.id.
- Cahyani, M. R., & Kiswara, E. (2019). Pengaruh Rasio Pajak Tanggahan, Keahlian Pajak, dan Remunerasi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(4), 1-10.
- Dewi, E. R. K. R., & Trisnawati, R. (2021). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Proceeding of The URECOL*, 393-405.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 830-859.
- Ellyanti, R. S., & Suwarti, T. (2022). Analisis Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Corporate Governance, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 19(1), 118-128.
- Fauziah, F., & Kurnia. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1-21.

- Fitriasuri, & Terizaghi, T. (2014). Globalisasi Akuntansi : Implementasi Konvergensi IFRS Indonesia dan Tantangannya Bagi UMKM. *Journal & Proceeding FEB UNSOED*, 4(1), 794-807.
- Halim, A., et al. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 3*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Handayani, M. E., & Rachmawati, N. A. (2022). Dampak Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Terhadap Tax Avoidance Dengan Kompetensi Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 298-309.
- Hariani, A. (2022). 5 Sektor Penyumbang Terbesar Penerimaan Pajak. Pajak.com. Tersedia di: [www.pajak.com/pajak/5-sektor-penyumbang-terbesar-penerimaan-pajak/amp/](http://www.pajak.com/pajak/5-sektor-penyumbang-terbesar-penerimaan-pajak/amp/)
- Hidayat, M. A. (2022). *Pengaruh Insentif Pajak dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Juanda, A. (2012). Kandungan Prinsip Konservatisme Dalam Standar Akuntansi Keuangan Berbasis IFRS (*International Financial Reporting Standard*). *JURNAL HUMANITY*, 7(2), 24-34.
- Krisyadi, R., & Mulfandi, E. (2021). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 1162-1173.
- Lestari, A. N. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Lismiyat, N., & Herliansyah, Y. (2021). The Effect of Accounting Conservatism, Capital Intensity and Independent Commissionerson Tax Avoidance, With Independent Commissioners as Moderating Variabel (Empirical Study on Banking Companies on the IDX 2014-2017). *Dinasti International Journal of Economics, Finance and Accounting*, 2(1), 55-70.
- Lubis, M. S. (2018). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lubis, Y. C., Ummayro, N., & Sipahutar, T. T. U. (2022). Audit Committee, Company Size, Leverage and Accounting Conservatism on Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 2295-2304.
- Marselina, L. & Sebrina, N. (2016). Analisis Perbedaan Tingkat Konservatisme Akuntansi Sebelum dan Sesudah Konvergensi IFRS (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2009 dan 2012-2013). *Wahana Riset Akuntansi*, 4(1), 673-690.

- Mulyati, Y., Subing, H. J. T., & Fathonah, A. N. (2019). Effect of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(8), 26-35.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Nurcholis, H., Puji, E. A., Endah, W. C., & Erna, W. (2021). The Effect of Financial Distress and Accounting Conservatism on Tax Avoidance with Leverage as Moderating Variable. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 11(119), 81-86.
- Pemerintah Indonesia. (2007). Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pemerintah Indonesia. (2021). Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Prabandaru, A. (2019). Tax Avoidance Sebagai Pelanggaran Hukum Perpajakan. Klikpajak.id. Tersedia di: <https://klikpajak.id/blog/tax-avoidance-sebagai-pelanggaran-hukum-perpajakan/>
- Pratiwi, D. K., & Djajanti, A. (2021). Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Karakteristik Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 155-165.
- Prayanthi, I., & Pantow, L. H. (2018). Kovergensi IFRS dan Tingkat Konservatisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), 93-100.
- Putra, I. M., et al. (2019). *Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis*. Yogyakarta: Quadrant.
- Rosdiani, N., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 131-143.
- Salim, A., & Haeruddin. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. Sulawesi Tengah: LPP-Mitra Edukasi.
- Sandi, F. (2022). Mendag Blak-Blakan Tantangan Berat Perdagangan di 2022. Cnbcindonesia.com. Tersedia di: <https://cnbcindonesia.com/news/20220114092601-4-307272/mendag-blak-blakan-tantangan-berat-perdagangan-di-2022/amp>

- Santoso, Y. I. (2020). Akibat Penghindaran Pajak Indonesia Merugi Rp 68,7 Triliun Per Tahun. Kontan.co.id. Tersedia di: <https://amkontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-merugi-rp-687-triliun-per-tahun>
- Sari, E. & Sarumpaet, S. (2017). Pengaruh Adopsi International Financial Reporting Standart (IFRS) Terhadap Relevansi Informasi Akuntansi Serta Dampaknya Terhadap Unconditional dan Conditional Konservatisme Akuntansi di Indonesia (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember*.
- Sari, E. D. P., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018. *Journal of Accounting And Financial*, 5(1), 45-52.
- Sari, N., Kalbuana, N., & Jumadi, A. (2016). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 431-440.
- Savitri, E. (2016). *Konservatisme Akuntansi Cara Pengukuran, Tinjauan Empiris dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Yogyakarta: Pustaka Sahila.
- Selviani, R., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Kimia di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 5(1), 1-15.
- Sirait, R. (2017). *Pemodelan Regresi Data Panel Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2011-2014*. Tugas Akhir. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Siregar, R & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(2).
- Sugianto, D. (2019). Mengenal Soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro. Detikfinance.com. Tersedia di: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Sumarlin, & Firdaus, Q. (2018). Kajian Penggunaan Aset Zombie Ditinjau Dari Prinsip Konservatisme Akuntansi Pada PT Semen Sentosa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4(2), 115-133.
- Suparno. (2012). *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Semarang: Pustaka Magister.
- Wijayanti, M. & Martono, S. M. (2019). Analisis Piutang Dagang dan Penerimaan Kas Dalam Upaya Peningkatan Efektifitas Pengendalian Piutang CV Diana Papua Motor. *SOSCIED*, 2(1).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Ratna Ningsih  
Alamat : Kp. Katulampa Dam RT. 001, RW. 014, Katulampa,  
Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, 16144.  
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 11 November 2000  
Agama : Islam  
Pendidikan  
• SD : SDN Katulampa 1 Bogor  
• SMP : SMPN 18 Bogor  
• SMK : SMKN 3 Bogor  
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan Bogor

Bogor, Mei 2023

(Dewi Ratna Ningsih)

## LAMPIRAN 1

### TRANSFORMASI PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM SEKTOR PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI (JASICA) KE IDX-IC

No.	Nama Perusahaan	JASICA (Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi)	IDX-IC	
		Sub Sektor	Sektor	Sub Sektor
1	AIMS	Perdagangan besar	Energi	Minyak, gas & batubara
2	AKRA	Perdagangan besar	Energi	Minyak, gas & batubara
3	APII	Perdagangan besar	Perindustrian	Barang perindustrian
4	BMSR	Perdagangan besar	Barang baku	Barang baku
5	BOGA	Perdagangan besar	Barang konsumsi non primer	Perdagangan ritel
6	CARS	Perdagangan besar	Barang konsumsi non primer	Perdagangan ritel
7	CLPI	Perdagangan besar	Barang baku	Barang baku
8	CMPP	Perdagangan besar	DELISTING	
9	CNKO	Perdagangan besar	Energi	Minyak, gas & batubara
10	DPUM	Perdagangan besar	Barang konsumen primer	Makanan & minuman
11	DWGL	Perdagangan besar	Energi	Minyak, gas & batubara
12	EPMT	Perdagangan besar	Barang konsumen primer	Perdagangan ritel barang primer
13	FISH	Perdagangan besar	Barang konsumen primer	Makanan & minuman
14	GREN	Perdagangan besar	DELISTING	
15	HEXA	Perdagangan besar	Perindustrian	Barang perindustrian
16	INTA	Perdagangan besar	Perindustrian	Barang perindustrian
17	INTD	Perdagangan besar	Barang baku	Barang baku
18	KOBX	Perdagangan besar	Perindustrian	Barang perindustrian
19	KONI	Perdagangan besar	Perindustrian	Jasa perindustrian
20	LTLS	Perdagangan besar	Barang baku	Barang baku
21	MDRN	Perdagangan besar	Perindustrian	Jasa perindustrian
22	MICE	Perdagangan besar	Barang konsumsi non primer	Barang rumah tangga
23	MPMX	Perdagangan besar	Barang konsumsi non primer	Perdagangan ritel
24	OKAS	Perdagangan besar	Barang baku	Barang baku
25	SDPC	Perdagangan besar	Barang konsumen primer	Perdagangan ritel barang primer
26	SIAP	Perdagangan besar	DELISTING	
27	SQMI	Perdagangan besar	Barang baku	Barang baku
28	TGKA	Perdagangan besar	Barang konsumen primer	Makanan & minuman
29	TIRA	Perdagangan besar	Perindustrian	Jasa perindustrian
30	TMPI	Perdagangan besar	DELISTING	
31	TRIL	Perdagangan besar	Perindustrian	Jasa perindustrian
32	TURI	Perdagangan besar	Barang konsumsi non primer	Perdagangan ritel
33	UNTR	Perdagangan besar	Perindustrian	Barang perindustrian
34	WAPO	Perdagangan besar	Barang konsumen primer	Makanan & minuman
35	WICO	Perdagangan besar	Barang konsumen primer	Perdagangan ritel barang primer
36	ACES	Perdagangan eceran	Barang konsumsi non primer	Perdagangan ritel
37	AMRT	Perdagangan eceran	Barang konsumen primer	Perdagangan ritel barang primer
38	CENT	Perdagangan eceran	DELISTING	
39	CSAP	Perdagangan eceran	Barang konsumsi non primer	Perdagangan ritel
40	DAYA	Perdagangan eceran	Barang konsumen primer	Perdagangan ritel barang primer
41	ECII	Perdagangan eceran	Barang konsumsi non primer	Perdagangan ritel
42	ERAA	Perdagangan eceran	Barang konsumsi non primer	Perdagangan ritel
43	GLOB	Perdagangan eceran	Barang konsumsi non primer	Perdagangan ritel

No.	Nama Perusahaan	JASICA (Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi)	IDX-IC	
			Sektor	Sub Sektor
44	GOLD	Perdagangan eceran	DELISTING	
45	HERO	Perdagangan eceran	Barang konsumen primer	Perdagangan ritel barang primer
46	KIOS	Perdagangan eceran	Teknologi	Perangkat lunak & jasa TI
47	KOIN	Perdagangan eceran	Perindustrian	Barang perindustrian
48	LPIFF	Perdagangan eceran	DELISTING	
49	MAPI	Perdagangan eceran	Barang konsumsi non primer	Perdagangan ritel
50	MCAS	Perdagangan eceran	Teknologi	Perangkat lunak & jasa TI
51	MIDI	Perdagangan eceran	Barang konsumen primer	Perdagangan ritel barang primer
52	MKNT	Perdagangan eceran	Barang konsumsi non primer	Perdagangan ritel
53	MPPA	Perdagangan eceran	Barang konsumen primer	Perdagangan ritel barang primer
54	RALS	Perdagangan eceran	Barang konsumsi non primer	Perdagangan ritel
55	RANC	Perdagangan eceran	Barang konsumen primer	Perdagangan ritel barang primer
56	RIMO	Perdagangan eceran	DELISTING	
57	SKYB	Perdagangan eceran	Barang konsumsi non primer	Perdagangan ritel
58	SONA	Perdagangan eceran	Barang konsumsi non primer	Perdagangan ritel
59	TELE	Perdagangan eceran	Barang konsumsi non primer	Perdagangan ritel
60	TRIO	Perdagangan eceran	Barang konsumsi non primer	Perdagangan ritel
61	AKKU	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
62	ARTA	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
63	BAYU	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
64	BUVA	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
65	FAST	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
66	GMCW	Restoran, hotel & pariwisata	DELISTING	
67	HOME	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
68	HOTL	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
69	ICON	Restoran, hotel & pariwisata	Perindustrian	Jasa perindustrian
70	INPP	Restoran, hotel & pariwisata	DELISTING	
71	JGLE	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
72	JIHD	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
73	JSPT	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
74	KPIG	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
75	MABA	Restoran, hotel & pariwisata	DELISTING	
76	MAMI	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
77	MAMIP	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
78	MAPB	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
79	MINA	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
80	NASA	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
81	PANR	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
82	PDES	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
83	PGLI	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
84	PJAA	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
85	PNSE	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
86	PSKT	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
87	PTSP	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
88	PUDP	Restoran, hotel & pariwisata	DELISTING	
89	SHID	Restoran, hotel & pariwisata	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
90	ABBA	Periklanan, percetakan & media	Barang konsumsi non primer	Media & hiburan

No.	Nama Perusahaan	JASICA (Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi)	IDX-IC	
		Sub Sektor	Sektor	Sub Sektor
91	BLTZ	Periklanan, percetakan & media	Barang konsumsi non primer	Jasa konsumen
92	EMTK	Periklanan, percetakan & media	Teknologi	Perangkat lunak & jasa TI
93	FORU	Periklanan, percetakan & media	Barang konsumsi non primer	Media & hiburan
94	JTPE	Periklanan, percetakan & media	Perindustrian	Jasa perindustrian
95	KBLV	Periklanan, percetakan & media	Infrastruktur	Telekomunikasi
96	LINK	Periklanan, percetakan & media	Infrastruktur	Telekomunikasi
97	LPLI	Periklanan, percetakan & media	Properti dan real estat	Properti dan real estat
98	MARI	Periklanan, percetakan & media	Barang konsumsi non primer	Media & hiburan
99	MDIA	Periklanan, percetakan & media	Barang konsumsi non primer	Media & hiburan
100	MNCN	Periklanan, percetakan & media	Barang konsumsi non primer	Media & hiburan
101	MSKY	Periklanan, percetakan & media	Barang konsumsi non primer	Media & hiburan
102	SCMA	Periklanan, percetakan & media	Barang konsumsi non primer	Media & hiburan
103	TMPO	Periklanan, percetakan & media	Barang konsumsi non primer	Media & hiburan
104	VIVA	Periklanan, percetakan & media	Barang konsumsi non primer	Media & hiburan
105	MIKA	Kesehatan	Kesehatan	Jasa & peralatan kesehatan
106	OCAP	Kesehatan	Keuangan	Perusahaan holding & investasi
107	PRDA	Kesehatan	Kesehatan	Jasa & peralatan kesehatan
108	SAME	Kesehatan	Kesehatan	Jasa & peralatan kesehatan
109	SILO	Kesehatan	Kesehatan	Jasa & peralatan kesehatan
110	SRAJ	Kesehatan	Kesehatan	Jasa & peralatan kesehatan
111	ASGR	Jasa komputer & perangkatnya	Perindustrian	Jasa perindustrian
112	ATIC	Jasa komputer & perangkatnya	Teknologi	Perangkat lunak & jasa TI
113	DNET	Jasa komputer & perangkatnya	Keuangan	Perusahaan holding & investasi
114	LMAS	Jasa komputer & perangkatnya	Teknologi	Perangkat lunak & jasa TI
115	MLPT	Jasa komputer & perangkatnya	Teknologi	Perangkat lunak & jasa TI
116	MTDL	Jasa komputer & perangkatnya	Teknologi	Perangkat keras & peralatan teknologi
117	ABMM	Perusahaan investasi	Perindustrian	Perusahaan holding multi sektor
118	BHIT	Perusahaan investasi	Perindustrian	Perusahaan holding multi sektor
119	BMTR	Perusahaan investasi	Perindustrian	Perusahaan holding multi sektor
120	BNBR	Perusahaan investasi	Perindustrian	Perusahaan holding multi sektor
121	BRMS	Perusahaan investasi	Barang baku	Barang baku
122	MLPL	Perusahaan investasi	Perindustrian	Perusahaan holding multi sektor
123	PLAS	Perusahaan investasi	Keuangan	Perusahaan holding & investasi
124	POOL	Perusahaan investasi	Keuangan	Perusahaan holding & investasi
125	SRTG	Perusahaan investasi	Keuangan	Perusahaan holding & investasi
126	AKSI	Lainnya	DELISTING	
127	DYAN	Lainnya	Perindustrian	Jasa perindustrian
128	GEMA	Lainnya	Barang konsumsi non primer	Barang rumah tangga
129	ITMA	Lainnya	Energi	Minyak, gas & batubara
130	ITTG	Lainnya	DELISTING	
131	MFMI	Lainnya	Perindustrian	Jasa perindustrian
132	SIMA	Lainnya	Barang konsumsi non primer	Perdagangan ritel
133	SOSS	Lainnya	Perindustrian	Jasa perindustrian

**LAMPIRAN 2**

**PERHITUNGAN UKURAN PERUSAHAAN PADA SEKTOR  
PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA  
EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021**

No.	Kode Saham	Tahun	Total Aset	Ukuran Perusahaan
1	AKRA	2017	16.823.208.531.000	30,4538
		2018	19.940.850.599.000	30,6238
		2019	21.409.046.173.000	30,6948
		2020	18.683.572.815.000	30,5587
		2021	23.508.585.736.000	30,7884
2	APII	2017	423.181.306.980	26,7711
		2018	450.303.354.800	26,8332
		2019	490.860.655.716	26,9194
		2020	512.220.639.129	26,9620
		2021	542.329.085.650	27,0191
3	EPMT	2017	7.425.800.257.838	29,6360
		2018	8.322.960.974.230	29,7500
		2019	8.704.958.834.283	29,7949
		2020	9.211.731.059.218	29,8515
		2021	9.729.919.645.520	29,9062
4	MICE	2017	863.182.442.302	27,4839
		2018	928.832.007.829	27,5572
		2019	1.044.252.437.786	27,6743
		2020	1.000.283.894.657	27,6313
		2021	1.063.137.390.963	27,6922
5	SDPC	2017	938.005.256.482	27,5670
		2018	1.192.891.220.453	27,8074
		2019	1.230.844.175.984	27,8387
		2020	1.164.826.486.522	27,7836
		2021	1.206.385.542.888	27,8186
6	TGKA	2017	2.924.962.977.878	28,7043
		2018	3.485.510.411.961	28,8796
		2019	2.995.872.438.975	28,7283
		2020	3.361.956.197.960	28,8435
		2021	3.403.961.007.490	28,8560
7	TURI	2017	5.464.898.000.000	29,3294
		2018	6.035.844.000.000	29,4287
		2019	6.292.705.000.000	29,4704
		2020	5.764.700.000.000	29,3828
		2021	6.800.389.000.000	29,5480
8	UNTR	2017	82.262.093.000.000	32,0409
		2018	116.281.017.000.000	32,3870

No.	Kode Saham	Tahun	Total Aset	Ukuran Perusahaan
		2019	111.713.375.000.000	32,3470
		2020	99.800.963.000.000	32,2342
		2021	112.561.356.000.000	32,3545
9	ACES	2017	4.428.840.550.479	29,1192
		2018	5.321.180.855.541	29,3027
		2019	5.920.169.803.449	29,4094
		2020	7.247.063.894.294	29,6116
		2021	7.189.816.371.434	29,6037
10	AMRT	2017	21.901.740.000.000	30,7176
		2018	22.165.968.000.000	30,7296
		2019	23.992.313.000.000	30,8088
		2020	25.970.743.000.000	30,8880
		2021	27.493.748.000.000	30,9450
11	CSAP	2017	5.138.259.285.000	29,2677
		2018	5.785.287.553.000	29,3863
		2019	6.584.587.023.000	29,5158
		2020	7.616.266.096.000	29,6613
		2021	8.505.127.561.000	29,7717
12	ERAA	2017	8.873.875.493.055	29,8141
		2018	12.682.902.626.000	30,1713
		2019	9.747.703.198.000	29,9081
		2020	11.211.369.042.000	30,0479
		2021	11.372.225.256.000	30,0622
13	MCAS	2017	568.397.002.684	27,0661
		2018	1.449.199.404.929	28,0020
		2019	2.240.267.222.701	28,4376
		2020	1.835.183.217.105	28,2382
		2021	2.134.534.261.341	28,3893
14	MIDI	2017	4.878.115.000.000	29,2158
		2018	4.960.145.000.000	29,2325
		2019	4.990.309.000.000	29,2385
		2020	5.923.693.000.000	29,4100
		2021	6.344.016.000.000	29,4785
15	JTPE	2017	1.015.271.044.216	27,6462
		2018	1.087.169.297.635	27,7146
		2019	1.152.696.526.641	27,7731
		2020	1.038.097.010.616	27,6684
		2021	1.212.589.829.191	27,8238
16	LINK	2017	5.766.226.000.000	29,3830
		2018	6.023.611.000.000	29,4267
		2019	6.652.974.000.000	29,5261
		2020	7.799.803.000.000	29,6851

No.	Kode Saham	Tahun	Total Aset	Ukuran Perusahaan
		2021	9.746.894.000.000	29,9080
17	SCMA	2017	5.385.807.878.000	29,3148
		2018	6.589.842.943.000	29,5166
		2019	6.716.724.073.000	29,5356
		2020	6.766.903.494.000	29,5431
		2021	9.913.440.970.000	29,9249
18	MIKA	2017	4.712.039.481.525	29,1811
		2018	5.089.416.875.753	29,2582
		2019	5.576.085.408.175	29,3495
		2020	6.732.279.460.008	29,5379
		2021	6.860.971.097.854	29,5569
19	PRDA	2017	1.848.201.000.000	28,2452
		2018	1.930.381.000.000	28,2887
		2019	2.010.967.000.000	28,3296
		2020	2.232.052.000.000	28,4339
		2021	2.718.564.000.000	28,6311
20	ASGR	2017	2.411.872.000.000	28,5114
		2018	2.271.344.000.000	28,4514
		2019	2.896.840.000.000	28,6946
		2020	2.288.831.000.000	28,4591
		2021	2.655.278.000.000	28,6076
21	DNET	2017	10.899.944.883.176	30,0198
		2018	14.527.983.724.288	30,3071
		2019	15.484.342.922.485	30,3709
		2020	17.223.362.000.000	30,4773
		2021	18.046.214.000.000	30,5240
22	MLPT	2017	1.870.716.006.000	28,2573
		2018	2.059.020.000.000	28,3533
		2019	2.106.286.000.000	28,3759
		2020	2.417.802.000.000	28,5139
		2021	2.993.102.000.000	28,7273
23	GEMA	2017	811.103.847.459	27,4217
		2018	986.798.686.383	27,6177
		2019	962.025.149.261	27,5923
		2020	972.015.359.252	27,6026
		2021	1.066.798.461.757	27,6957
24	MFMI	2017	244.722.928.696	26,2234
		2018	273.775.760.725	26,3356
		2019	421.902.495.547	26,7680
		2020	341.169.168.581	26,5556
		2021	340.216.666.768	26,5528
25	SOSS	2017	229.955.330.203	26,1612

No.	Kode Saham	Tahun	Total Aset	Ukuran Perusahaan
		2018	211.457.207.414	26,0773
		2019	264.486.020.028	26,3011
		2020	293.845.361.216	26,4063
		2021	318.171.407.124	26,4859
26	BOGA	2017	520.241.333.584	26,9776
		2018	571.901.434.748	27,0722
		2019	579.936.011.162	27,0862
		2020	595.139.264.972	27,1121
		2021	813.751.994.176	27,4249
27	LTLS	2017	5.769.332.000.000	29,3836
		2018	6.318.441.000.000	29,4745
		2019	5.863.204.000.000	29,3997
		2020	5.524.302.000.000	29,3402
		2021	6.226.014.000.000	29,4598
28	MPMX	2017	9.740.576.000.000	29,9073
		2018	11.943.407.000.000	30,1112
		2019	9.563.681.000.000	29,8890
		2020	9.209.838.000.000	29,8513
		2021	9.869.734.000.000	29,9205
29	RANC	2017	804.020.324.861	27,4129
		2018	904.003.739.438	27,5301
		2019	952.496.300.846	27,5824
		2020	1.319.134.443.995	27,9080
		2021	1.512.036.014.160	28,0445
30	BAYU	2017	759.510.011.496	27,3559
		2018	800.918.912.470	27,4090
		2019	815.195.083.632	27,4267
		2020	692.609.391.235	27,2637
		2021	735.109.129.569	27,3233
31	MNCN	2017	15.057.291.000.000	30,3429
		2018	16.339.552.000.000	30,4246
		2019	17.152.089.000.000	30,4731
		2020	18.923.235.000.000	30,5714
		2021	21.369.004.000.000	30,6930
32	MTDL	2017	3.697.416.000.000	28,9387
		2018	4.852.776.000.000	29,2106
		2019	5.625.277.000.000	29,3583
		2020	5.848.603.000.000	29,3972
		2021	7.588.792.000.000	29,6577
33	BHIT	2017	56.523.811.000.000	31,6657
		2018	56.421.973.000.000	31,6639
		2019	57.613.499.000.000	31,6848

<b>No.</b>	<b>Kode Saham</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total Aset</b>	<b>Ukuran Perusahaan</b>
		2020	59.484.422.000.000	31,7167
		2021	65.006.122.000.000	31,8055
34	BMTR	2017	27.694.734.000.000	30,9523
		2018	28.968.162.000.000	30,9972
		2019	30.154.793.000.000	31,0374
		2020	32.261.560.000.000	31,1049
		2021	34.795.776.000.000	31,1805

**LAMPIRAN 3**

**PERHITUNGAN KONSERVATISME AKUNTANSI PADA SEKTOR  
PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA  
EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021**

No.	Kode Saham	Tahun	Net Profit	Dep	Cash Flow	Total Aset	KA
1	AKRA	2017	1.001.314.446.000	26.773.826.000	682.224.585.000	16.823.208.531.000	-0,0206
		2018	663.340.794.000	30.153.040.000	-448.864.030.000	19.940.850.599.000	-0,0573
		2019	699.495.583.000	40.509.836.000	687.979.553.000	21.409.046.173.000	-0,0024
		2020	961.997.313.000	54.886.285.000	1.066.972.977.000	18.683.572.815.000	0,0027
		2021	1.135.001.756.000	4.115.852.251	2.944.557.443.000	23.508.585.736.000	0,0768
2	APII	2017	13.921.992.681	5.693.227.956	8.238.805.310	423.181.306.980	-0,0269
		2018	30.402.061.201	5.122.247.993	27.583.121.972	450.303.354.800	-0,0176
		2019	25.744.441.617	5.174.564.756	37.059.345.494	490.860.655.716	0,0125
		2020	30.152.459.780	5.019.147.395	25.431.274.798	512.220.639.129	-0,0190
		2021	20.672.232.124	7.596.661.454	22.626.179.241	542.329.085.650	-0,0104
3	EPMT	2017	517.836.170.615	120.750.791.005	-203.606.805.066	7.425.800.257.838	-0,1134
		2018	653.250.886.056	127.257.234.433	543.778.934.884	8.322.960.974.230	-0,0284
		2019	580.814.677.453	128.101.871.402	248.919.605.641	8.704.958.834.283	-0,0528
		2020	679.870.547.997	137.568.863.697	890.695.031.727	9.211.731.059.218	0,0080
		2021	846.240.999.497	150.387.052.482	404.805.061.273	9.729.919.645.520	-0,0608
4	MICE	2017	66.623.111.353	14.759.935.705	5.049.117.127	863.182.442.302	-0,0884
		2018	32.997.196.204	15.665.765.861	-41.564.156.522	928.832.007.829	-0,0971
		2019	39.846.770.853	16.515.687.413	-7.672.031.151	1.044.252.437.786	-0,0613
		2020	2.701.416.962	32.111.526.343	45.961.019.849	1.000.283.894.657	0,0111
		2021	30.116.574.542	24.367.124.377	29.553.260.078	1.063.137.390.963	-0,0234
5	SDPC	2017	14.180.345.525	4.457.348.031	-20.717.530.026	938.005.256.482	-0,0420
		2018	19.444.262.069	4.723.081.358	-126.981.520.345	1.192.891.220.453	-0,1267
		2019	7.880.007.292	5.861.483.406	-25.260.772.062	1.230.844.175.984	-0,0317
		2020	2.804.331.066	15.483.029.262	71.692.697.277	1.164.826.486.522	0,0458
		2021	9.571.235.584	15.785.496.236	-18.176.304.116	1.206.385.542.888	-0,0361
6	TGKA	2017	254.951.562.937	32.998.923.630	634.622.494.223	2.924.962.977.878	0,1185
		2018	318.607.055.495	30.417.683.064	37.887.768.280	3.485.510.411.961	-0,0893
		2019	428.418.484.105	26.321.617.687	1.071.859.164.912	2.995.872.438.975	0,2060
		2020	478.561.152.411	51.263.267.582	801.751.675.565	3.361.956.197.960	0,0809
		2021	481.109.483.989	56.625.530.478	71.133.769.549	3.403.961.007.490	-0,1371
7	TURI	2017	476.203.000.000	201.463.000.000	221.019.000.000	5.464.898.000.000	-0,0836
		2018	561.159.000.000	246.106.000.000	290.205.000.000	6.035.844.000.000	-0,0857
		2019	583.234.000.000	278.474.000.000	482.218.000.000	6.292.705.000.000	-0,0603
		2020	42.664.000.000	291.496.000.000	1.049.847.000.000	5.764.700.000.000	0,1241
		2021	540.400.000.000	279.846.000.000	366.642.000.000	6.800.389.000.000	-0,0667
8	UNTR	2017	7.673.322.000.000	6.836.235.000.000	11.951.265.000.000	82.262.093.000.000	-0,0311
		2018	11.498.409.000.000	9.363.749.000.000	18.959.739.000.000	116.281.017.000.000	-0,0164
		2019	11.134.641.000.000	16.236.456.000.000	9.435.985.000.000	111.713.375.000.000	-0,1605
		2020	5.632.425.000.000	19.586.428.000.000	18.557.088.000.000	99.800.963.000.000	-0,0668
		2021	10.608.267.000.000	17.205.409.000.000	23.284.854.000.000	112.561.356.000.000	-0,0402
9	ACES	2017	780.686.814.661	75.367.416.455	690.355.938.041	4.428.840.550.479	-0,0374
		2018	976.273.356.597	95.368.219.887	280.549.714.304	5.321.180.855.541	-0,1487

No.	Kode Saham	Tahun	Net Profit	Dep	Cash Flow	Total Aset	KA
		2019	1.036.610.556.510	116.311.600.128	1.159.516.485.667	5.920.169.803.449	0,0011
		2020	731.310.571.351	451.996.143.489	1.538.615.302.164	7.247.063.894.294	0,0490
		2021	718.802.339.551	448.490.494.356	1.305.426.267.837	7.189.816.371.434	0,0192
10	AMRT	2017	257.735.000.000	2.518.230.000.000	3.322.625.000.000	21.901.740.000.000	0,0250
		2018	668.426.000.000	2.787.234.000.000	5.956.645.000.000	22.165.968.000.000	0,1128
		2019	1.138.888.000.000	2.856.279.000.000	5.409.142.000.000	23.992.313.000.000	0,0589
		2020	1.088.477.000.000	3.076.195.000.000	6.560.173.000.000	25.970.743.000.000	0,0922
		2021	1.988.750.000.000	3.358.237.000.000	6.335.963.000.000	27.493.748.000.000	0,0360
11	CSAP	2017	89.022.191.000	74.305.534.000	59.811.075.000	5.138.259.285.000	-0,0201
		2018	89.609.693.000	92.366.126.000	-128.525.342.000	5.785.287.553.000	-0,0537
		2019	68.480.112.000	102.800.019.000	226.905.815.000	6.584.587.023.000	0,0084
		2020	60.817.945.000	209.499.336.000	585.773.390.000	7.616.266.096.000	0,0414
		2021	225.314.512.000	254.355.783.000	83.211.600.000	8.505.127.561.000	-0,0466
12	ERAA	2017	347.149.581.987	4.861.581.530	-765.037.485.224	8.873.875.493.055	-0,1259
		2018	889.340.783.000	91.405.781.000	-2.427.388.011.000	12.682.902.626.000	-0,2687
		2019	325.583.191.000	127.372.360.000	2.430.790.765.000	9.747.703.198.000	0,2029
		2020	671.172.137.000	135.974.084.000	2.852.705.359.000	11.211.369.042.000	0,1825
		2021	1.117.917.248.000	137.411.258.000	21.739.143.000	11.372.225.256.000	-0,1085
13	MCAS	2017	8.639.539.567	575.659.165	-181.629.013.753	568.397.002.684	-0,3358
		2018	254.888.243.759	2.976.749.356	67.849.217.482	1.449.199.404.929	-0,1311
		2019	212.275.752.694	8.938.065.793	-188.542.369.085	2.240.267.222.701	-0,1829
		2020	72.398.663.433	14.447.383.283	-12.648.478.653	1.835.183.217.105	-0,0542
		2021	141.358.466.402	21.592.632.386	273.859.953.530	2.134.534.261.341	0,0520
14	MIDI	2017	102.812.000.000	271.967.000.000	792.739.000.000	4.878.115.000.000	0,0857
		2018	159.154.000.000	305.627.000.000	869.407.000.000	4.960.145.000.000	0,0816
		2019	203.070.000.000	320.800.000.000	1.256.434.000.000	4.990.309.000.000	0,1468
		2020	200.273.000.000	685.612.000.000	1.132.508.000.000	5.923.693.000.000	0,0416
		2021	275.221.000.000	755.620.000.000	1.141.971.000.000	6.344.016.000.000	0,0175
15	JTPE	2017	81.951.350.420	43.000.112.242	128.033.765.711	1.015.271.044.216	0,0030
		2018	120.550.064.804	32.056.880.963	153.989.098.030	1.087.169.297.635	0,0013
		2019	182.442.649.410	31.718.732.330	149.142.543.025	1.152.696.526.641	-0,0564
		2020	74.172.914.384	32.996.204.087	167.588.791.746	1.038.097.010.616	0,0582
		2021	96.513.247.316	35.598.372.978	198.461.515.932	1.212.589.829.191	0,0547
16	LINK	2017	1.007.278.000.000	644.103.000.000	1.547.163.000.000	5.766.226.000.000	-0,0181
		2018	788.918.000.000	718.810.000.000	1.721.611.000.000	6.023.611.000.000	0,0355
		2019	894.531.000.000	775.163.000.000	1.757.585.000.000	6.652.974.000.000	0,0132
		2020	941.707.000.000	931.146.000.000	1.854.902.000.000	7.799.803.000.000	-0,0023
		2021	885.319.000.000	1.159.913.000.000	1.968.956.000.000	9.746.894.000.000	-0,0078
17	SCMA	2017	1.317.748.064.000	185.347.863.000	1.250.519.493.000	5.385.807.878.000	-0,0469
		2018	1.393.354.787.000	198.929.785.000	1.671.725.614.000	6.589.842.943.000	0,0121
		2019	971.618.417.000	202.522.161.000	1.193.085.922.000	6.716.724.073.000	0,0028
		2020	1.459.476.632.000	210.753.154.000	1.844.553.753.000	6.766.903.494.000	0,0258
		2021	1.752.421.136.000	219.485.024.000	1.324.800.543.000	9.913.440.970.000	-0,0653
18	MIKA	2017	708.761.732.542	113.026.440.522	769.745.377.540	4.712.039.481.525	-0,0110
		2018	658.737.307.293	134.120.777.355	743.203.517.544	5.089.416.875.753	-0,0098
		2019	791.419.176.854	160.221.193.086	894.242.357.918	5.576.085.408.175	-0,0103
		2020	923.472.717.339	179.399.955.266	1.066.112.489.721	6.732.279.460.008	-0,0055
		2021	1.361.523.557.333	193.220.328.888	2.089.515.437.267	6.860.971.097.854	0,0779

No.	Kode Saham	Tahun	Net Profit	Dep	Cash Flow	Total Aset	KA
19	PRDA	2017	150.797.000.000	59.649.000.000	93.470.000.000	1.848.201.000.000	-0,0633
		2018	175.450.000.000	76.470.000.000	239.829.000.000	1.930.381.000.000	-0,0063
		2019	210.261.000.000	80.633.000.000	341.825.000.000	2.010.967.000.000	0,0253
		2020	268.747.000.000	139.247.000.000	434.631.000.000	2.232.052.000.000	0,0119
		2021	621.623.000.000	145.344.000.000	777.266.000.000	2.718.564.000.000	0,0038
20	ASGR	2017	257.225.000.000	327.240.000.000	574.711.000.000	2.411.872.000.000	-0,0040
		2018	270.404.000.000	348.933.000.000	-35.908.000.000	2.271.344.000.000	-0,2885
		2019	250.992.000.000	381.743.000.000	445.417.000.000	2.896.840.000.000	-0,0647
		2020	47.783.000.000	420.693.000.000	16.384.000.000	2.288.831.000.000	-0,1975
		2021	87.311.000.000	396.457.000.000	463.449.000.000	2.655.278.000.000	-0,0077
21	DNET	2017	170.793.416.762	38.078.395.178	-121.774.273.690	10.899.944.883.176	-0,0303
		2018	282.868.126.051	81.755.991.692	-294.354.133.522	14.527.983.724.288	-0,0454
		2019	519.144.061.565	141.385.822.065	-531.706.155.518	15.484.342.922.485	-0,0770
		2020	327.053.000.000	227.254.000.000	-310.072.000.000	17.223.362.000.000	-0,0502
		2021	984.670.000.000	309.343.000.000	-47.696.000.000	18.046.214.000.000	-0,0743
22	MLPT	2017	100.032.397.000	16.242.609.000	199.177.868.000	1.870.716.006.000	0,0443
		2018	84.419.000.000	15.702.000.000	127.022.000.000	2.059.020.000.000	0,0131
		2019	125.178.000.000	14.300.000.000	150.130.000.000	2.106.286.000.000	0,0051
		2020	160.646.000.000	15.707.000.000	580.494.000.000	2.417.802.000.000	0,1672
		2021	260.870.000.000	12.995.000.000	487.141.000.000	2.993.102.000.000	0,0713
23	GEMA	2017	23.905.950.470	7.378.205.846	37.601.380.213	811.103.847.459	0,0078
		2018	21.618.512.703	8.278.381.145	39.352.528.385	986.798.686.383	0,0096
		2019	32.133.014.664	9.782.158.612	137.449.463.262	962.025.149.261	0,0993
		2020	1.599.783.419	23.133.701.679	63.846.407.765	972.015.359.252	0,0402
		2021	13.140.035.584	27.153.849.875	-4.039.344.218	1.066.798.461.757	-0,0416
24	MFMI	2017	23.129.521.063	11.457.828.222	46.647.016.741	244.722.928.696	0,0493
		2018	26.510.126.801	13.732.859.488	48.622.930.677	273.775.760.725	0,0306
		2019	133.446.664.847	17.719.473.927	59.605.617.520	421.902.495.547	-0,2170
		2020	18.175.143.820	33.820.960.661	48.258.332.197	341.169.168.581	-0,0110
		2021	25.160.193.681	35.354.824.217	35.859.253.111	340.216.666.768	-0,0725
25	SOSS	2017	15.940.744.026	7.515.260.532	27.705.998.002	229.955.330.203	0,0185
		2018	15.391.994.571	5.857.436.484	-27.239.054.054	211.457.207.414	-0,2293
		2019	31.402.600.298	4.866.660.985	14.744.667	264.486.020.028	-0,1371
		2020	16.489.408.278	9.839.587.668	20.615.253.467	293.845.361.216	-0,0194
		2021	32.632.401.729	9.536.203.884	21.238.344.872	318.171.407.124	-0,0658
26	BOGA	2017	8.240.279.559	6.300.392.565	7.339.928.373	520.241.333.584	-0,0138
		2018	11.681.281.142	12.126.956.376	80.476.055.116	571.901.434.748	0,0991
		2019	9.828.516.439	13.582.590.424	55.995.844.607	579.936.011.162	0,0562
		2020	9.748.220.012	13.519.632.415	49.908.636.196	595.139.264.972	0,0448
		2021	27.522.924.173	10.625.800.112	46.148.740.837	813.751.994.176	0,0098
27	LTLS	2017	183.621.000.000	52.851.000.000	74.906.000.000	5.769.332.000.000	-0,0280
		2018	233.141.000.000	45.306.000.000	97.124.000.000	6.318.441.000.000	-0,0287
		2019	255.747.000.000	44.984.000.000	513.701.000.000	5.863.204.000.000	0,0363
		2020	118.196.000.000	58.231.000.000	828.597.000.000	5.524.302.000.000	0,1181
		2021	311.410.000.000	55.575.000.000	437.946.000.000	6.226.014.000.000	0,0114
28	MPMX	2017	412.626.000.000	52.728.000.000	388.351.000.000	9.740.576.000.000	-0,0079
		2018	3.701.835.000.000	67.604.000.000	102.235.000.000	11.943.407.000.000	-0,3070
		2019	466.248.000.000	63.099.000.000	-189.300.000.000	9.563.681.000.000	-0,0751

No.	Kode Saham	Tahun	Net Profit	Dep	Cash Flow	Total Aset	KA
		2020	133.572.000.000	96.900.000.000	467.318.000.000	9.209.838.000.000	0,0257
		2021	411.748.000.000	104.499.000.000	580.491.000.000	9.869.734.000.000	0,0065
29	RANC	2017	37.685.584.998	50.705.755.959	129.121.141.743	804.020.324.861	0,0507
		2018	49.966.984.744	57.725.956.836	183.156.837.562	904.003.739.438	0,0835
		2019	55.464.434.251	10.429.218.797	84.774.223.458	952.496.300.846	0,0198
		2020	76.002.689.458	127.195.684.395	271.338.536.010	1.319.134.443.995	0,0517
		2021	9.838.767.784	163.824.386.575	99.018.069.286	1.512.036.014.160	-0,0494
30	BAYU	2017	32.945.602.411	4.143.445.487	31.654.863.615	759.510.011.496	-0,0072
		2018	39.648.863.027	3.811.385.119	28.926.514.700	800.918.912.470	-0,0181
		2019	47.449.047.778	4.247.086.796	71.124.158.519	815.195.083.632	0,0238
		2020	1.245.008.804	5.591.019.408	97.798.085.539	692.609.391.235	0,1313
		2021	306.222.936	6.670.369.100	-36.913.624.651	735.109.129.569	-0,0597
31	MNCN	2017	1.567.546.000.000	247.641.000.000	2.197.773.000.000	15.057.291.000.000	0,0254
		2018	703.062.000.000	231.160.000.000	252.501.000.000	16.339.552.000.000	-0,0417
		2019	1.219.864.000.000	218.457.000.000	734.908.000.000	17.152.089.000.000	-0,0410
		2020	1.871.028.000.000	507.143.000.000	1.379.270.000.000	18.923.235.000.000	-0,0528
		2021	2.576.699.000.000	636.443.000.000	2.660.621.000.000	21.369.004.000.000	-0,0259
32	MTDL	2017	374.241.000.000	15.193.000.000	78.901.000.000	3.697.416.000.000	-0,0840
		2018	426.084.000.000	16.230.000.000	348.323.000.000	4.852.776.000.000	-0,0194
		2019	535.110.000.000	19.153.000.000	174.538.000.000	5.625.277.000.000	-0,0675
		2020	541.671.000.000	22.341.000.000	1.382.910.000.000	5.848.603.000.000	0,1400
		2021	761.834.000.000	26.061.000.000	79.593.000.000	7.588.792.000.000	-0,0933
33	BHIT	2017	524.708.000.000	321.072.000.000	517.819.000.000	56.523.811.000.000	-0,0058
		2018	945.195.000.000	320.335.000.000	2.745.730.000.000	56.421.973.000.000	0,0262
		2019	2.087.823.000.000	368.163.000.000	3.041.286.000.000	57.613.499.000.000	0,0102
		2020	1.525.889.000.000	388.992.000.000	4.336.751.000.000	59.484.422.000.000	0,0407
		2021	2.453.908.000.000	464.579.000.000	5.205.985.000.000	65.006.122.000.000	0,0352
34	BMTR	2017	1.054.125.000.000	1.529.774.000.000	4.372.376.000.000	27.694.734.000.000	0,0646
		2018	1.351.480.000.000	1.577.307.000.000	4.167.980.000.000	28.968.162.000.000	0,0428
		2019	2.317.437.000.000	1.662.039.000.000	3.987.313.000.000	30.154.793.000.000	0,0003
		2020	1.801.029.000.000	1.578.002.000.000	3.290.901.000.000	32.261.560.000.000	-0,0027
		2021	2.451.139.000.000	1.650.538.000.000	4.028.519.000.000	34.795.776.000.000	-0,0021

## LAMPIRAN 4

**PERHITUNGAN PENGHINDARAN PAJAK PADA SEKTOR  
PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA  
EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021**

No.	Kode Saham	Tahun	Laba Akuntansi	Laba Fiskal	Total Aset	BTD
1	AKRA	2017	1.156.229.638.000	1.257.567.495.000	16.823.208.531.000	-0,0060
		2018	890.156.150.000	1.904.084.165.000	19.940.850.599.000	-0,0508
		2019	899.083.233.000	722.230.229.000	21.409.046.173.000	0,0083
		2020	1.226.718.840.000	1.026.084.584.000	18.683.572.815.000	0,0107
		2021	1.436.743.040.000	1.263.924.848.000	23.508.585.736.000	0,0074
2	APII	2017	19.199.605.423	23.238.775.516	423.181.306.980	-0,0095
		2018	40.653.039.839	42.505.123.432	450.303.354.800	-0,0041
		2019	34.250.926.596	38.563.712.628	490.860.655.716	-0,0088
		2020	38.984.987.175	36.272.520.062	512.220.639.129	0,0053
		2021	28.665.324.729	32.737.884.355	542.329.085.650	-0,0075
3	EPMT	2017	684.757.751.310	464.348.466.702	7.425.800.257.838	0,0297
		2018	868.232.230.796	647.107.327.224	8.322.960.974.230	0,0266
		2019	801.391.256.095	653.130.990.514	8.704.958.834.283	0,0170
		2020	873.612.121.925	619.745.181.623	9.211.731.059.218	0,0276
		2021	1.083.958.145.355	796.513.943.965	9.729.919.645.520	0,0295
4	MICE	2017	101.431.580.514	24.467.441.672	863.182.442.302	0,0892
		2018	44.127.315.887	32.548.687.224	928.832.007.829	0,0125
		2019	50.909.127.400	34.101.034.393	1.044.252.437.786	0,0161
		2020	8.674.034.193	10.340.238.160	1.000.283.894.657	-0,0017
		2021	42.602.681.964	25.005.574.589	1.063.137.390.963	0,0166
5	SDPC	2017	20.674.313.211	27.385.696.593	938.005.256.482	-0,0072
		2018	28.590.920.205	36.577.648.073	1.192.891.220.453	-0,0067
		2019	11.969.483.578	18.196.152.107	1.230.844.175.984	-0,0051
		2020	7.739.375.309	16.930.878.602	1.164.826.486.522	-0,0079
		2021	17.922.516.585	40.952.269.036	1.206.385.542.888	-0,0191
6	TGKA	2017	325.696.478.507	234.199.164.999	2.924.962.977.878	0,0313
		2018	426.291.444.535	361.536.222.083	3.485.510.411.961	0,0186
		2019	553.046.935.019	457.058.991.186	2.995.872.438.975	0,0320
		2020	625.284.763.496	552.346.846.814	3.361.956.197.960	0,0217
		2021	608.171.241.151	435.343.325.233	3.403.961.007.490	0,0508
7	TURI	2017	593.261.000.000	123.040.000.000	5.464.898.000.000	0,0860
		2018	686.846.000.000	209.581.000.000	6.035.844.000.000	0,0791
		2019	735.960.000.000	286.886.000.000	6.292.705.000.000	0,0714
		2020	119.765.000.000	174.727.000.000	5.764.700.000.000	-0,0095
		2021	691.548.000.000	391.524.000.000	6.800.389.000.000	0,0441
8	UNTR	2017	10.522.657.000.000	2.838.116.000.000	82.262.093.000.000	0,0934

No.	Kode Saham	Tahun	Laba Akuntansi	Laba Fiskal	Total Aset	BTD
		2018	15.708.719.000.000	3.521.443.000.000	116.281.017.000.000	0,1048
		2019	15.476.885.000.000	2.265.115.000.000	111.713.375.000.000	0,1183
		2020	7.011.186.000.000	616.801.000.000	99.800.963.000.000	0,0641
		2021	14.462.250.000.000	1.858.960.000.000	112.561.356.000.000	0,1120
9	ACES	2017	959.980.347.383	990.030.033.300	4.428.840.550.479	-0,0068
		2018	1.202.709.103.365	1.187.068.404.440	5.321.180.855.541	0,0029
		2019	1.280.008.338.244	1.303.596.618.263	5.920.169.803.449	-0,0040
		2020	923.335.768.686	1.036.198.693.223	7.247.063.894.294	-0,0156
		2021	858.919.125.667	755.510.479.870	7.189.816.371.434	0,0144
10	AMRT	2017	318.873.000.000	392.295.000.000	21.901.740.000.000	-0,0034
		2018	831.658.000.000	871.005.000.000	22.165.968.000.000	-0,0018
		2019	1.414.137.000.000	1.273.842.000.000	23.992.313.000.000	0,0058
		2020	1.352.466.000.000	1.301.674.000.000	25.970.743.000.000	0,0020
		2021	2.423.250.000.000	2.280.445.000.000	27.493.748.000.000	0,0052
11	CSAP	2017	115.130.429.000	68.081.056.000	5.138.259.285.000	0,0092
		2018	131.939.083.000	74.179.664.000	5.785.287.553.000	0,0100
		2019	105.046.392.000	27.537.761.000	6.584.587.023.000	0,0118
		2020	114.757.297.000	44.632.660.000	7.616.266.096.000	0,0092
		2021	288.064.940.000	151.299.974.000	8.505.127.561.000	0,0161
12	ERAA	2017	479.656.198.588	11.372.225.256	8.873.875.493.055	0,0528
		2018	1.203.140.844.000	495.371.964.000	12.682.902.626.000	0,0558
		2019	472.719.996.000	41.598.809.000	9.747.703.198.000	0,0442
		2020	917.316.742.000	138.523.552.000	11.211.369.042.000	0,0695
		2021	1.495.064.863.000	139.087.632.000	11.372.225.256.000	0,1192
13	MCAS	2017	10.607.609.077	5.689.482.330	568.397.002.684	0,0087
		2018	282.530.224.119	53.666.815.025	1.449.199.404.929	0,1579
		2019	246.485.273.585	45.082.082.703	2.240.267.222.701	0,0899
		2020	95.426.725.423	34.363.139.021	1.835.183.217.105	0,0333
		2021	158.154.107.803	18.860.568.741	2.134.534.261.341	0,0653
14	MIDI	2017	123.249.000.000	103.279.000.000	4.878.115.000.000	0,0041
		2018	197.098.000.000	201.959.000.000	4.960.145.000.000	-0,0010
		2019	270.473.000.000	265.275.000.000	4.990.309.000.000	0,0010
		2020	261.024.000.000	294.435.000.000	5.923.693.000.000	-0,0056
		2021	322.747.000.000	326.667.000.000	6.344.016.000.000	-0,0006
15	JTPE	2017	110.555.734.896	100.158.035.250	1.015.271.044.216	0,0102
		2018	160.136.680.625	129.799.946.398	1.087.169.297.635	0,0279
		2019	242.552.261.337	193.729.954.210	1.152.696.526.641	0,0424
		2020	97.672.912.335	87.709.919.096	1.038.097.010.616	0,0096
		2021	125.077.341.657	103.477.846.827	1.212.589.829.191	0,0178
16	LINK	2017	1.339.421.000.000	1.315.433.000.000	5.766.226.000.000	0,0042
		2018	1.120.496.000.000	1.414.313.000.000	6.023.611.000.000	-0,0488

No.	Kode Saham	Tahun	Laba Akuntansi	Laba Fiskal	Total Aset	BTD
		2019	1.240.307.000.000	1.399.581.000.000	6.652.974.000.000	-0,0239
		2020	1.246.629.000.000	1.180.343.000.000	7.799.803.000.000	0,0085
		2021	1.148.877.000.000	1.201.763.000.000	9.746.894.000.000	-0,0054
17	SCMA	2017	1.782.043.501.000	16.376.425.000	5.385.807.878.000	0,3278
		2018	1.859.188.000.000	20.089.157.000	6.589.842.943.000	0,2791
		2019	1.373.065.504.000	20.294.915.000	6.716.724.073.000	0,2014
		2020	1.488.100.052.000	3.888.075.000	6.766.903.494.000	0,2193
		2021	1.725.634.233.000	6.558.469.000	9.913.440.970.000	0,1734
18	MIKA	2017	877.154.672.813	22.676.890.865	4.712.039.481.525	0,1813
		2018	850.147.997.720	32.822.957.983	5.089.416.875.753	0,1606
		2019	1.004.330.166.327	32.212.891.136	5.576.085.408.175	0,1743
		2020	1.169.750.150.099	34.805.448.768	6.732.279.460.008	0,1686
		2021	1.719.517.732.469	32.923.681.008	6.860.971.097.854	0,2458
19	PRDA	2017	196.714.000.000	133.198.000.000	1.848.201.000.000	0,0344
		2018	221.693.000.000	174.381.000.000	1.930.381.000.000	0,0245
		2019	264.800.000.000	199.479.000.000	2.010.967.000.000	0,0325
		2020	339.078.000.000	276.063.000.000	2.232.052.000.000	0,0282
		2021	786.575.000.000	723.226.000.000	2.718.564.000.000	0,0233
20	ASGR	2017	349.439.000.000	262.380.000.000	2.411.872.000.000	0,0361
		2018	361.128.000.000	291.747.000.000	2.271.344.000.000	0,0305
		2019	337.894.000.000	305.470.000.000	2.896.840.000.000	0,0112
		2020	63.720.000.000	67.174.000.000	2.288.831.000.000	-0,0015
		2021	111.886.000.000	102.585.000.000	2.655.278.000.000	0,0035
21	DNET	2017	164.461.447.372	1.386.334.256	10.899.944.883.176	0,0150
		2018	286.072.851.383	11.905.948.063	14.527.983.724.288	0,0189
		2019	540.808.402.281	85.583.549.455	15.484.342.922.485	0,0294
		2020	343.401.000.000	100.578.000.000	17.223.362.000.000	0,0141
		2021	1.006.490.000.000	142.041.000.000	18.046.214.000.000	0,0479
22	MLPT	2017	131.871.684.000	123.055.012.000	1.870.716.006.000	0,0047
		2018	120.074.000.000	153.432.000.000	2.059.020.000.000	-0,0162
		2019	176.546.000.000	170.053.000.000	2.106.286.000.000	0,0031
		2020	223.324.000.000	203.603.000.000	2.417.802.000.000	0,0082
		2021	295.003.000.000	237.180.000.000	2.993.102.000.000	0,0193
23	GEMA	2017	27.038.693.862	4.136.525.262	811.103.847.459	0,0282
		2018	31.823.506.073	9.682.123.165	986.798.686.383	0,0224
		2019	41.383.924.614	7.913.886.821	962.025.149.261	0,0348
		2020	10.902.705.411	2.942.155.992	972.015.359.252	0,0082
		2021	17.000.480.788	5.310.329.204	1.066.798.461.757	0,0110
24	MFMI	2017	30.384.378.457	20.089.006.762	244.722.928.696	0,0421
		2018	34.539.454.566	21.785.321.997	273.775.760.725	0,0466
		2019	141.858.190.209	41.826.054.233	421.902.495.547	0,2371

No.	Kode Saham	Tahun	Laba Akuntansi	Laba Fiskal	Total Aset	BTD
		2020	20.661.479.556	30.649.019.319	341.169.168.581	-0,0293
		2021	27.568.960.527	22.889.555.667	340.216.666.768	0,0138
25	SOSS	2017	23.892.942.499	6.819.164.000	229.955.330.203	0,0742
		2018	23.712.712.622	10.048.878.644	211.457.207.414	0,0646
		2019	46.643.753.985	19.824.970.351	264.486.020.028	0,1014
		2020	25.468.934.168	17.707.817.301	293.845.361.216	0,0264
		2021	45.952.269.932	21.620.937.200	318.171.407.124	0,0765
26	BOGA	2017	11.774.183.708	-1.718.023.958	520.241.333.584	0,0259
		2018	18.985.636.053	-3.613.700.631	571.901.434.748	0,0395
		2019	17.651.441.119	-5.404.543.365	579.936.011.162	0,0398
		2020	15.784.634.474	-8.232.605.771	595.139.264.972	0,0404
		2021	37.471.580.135	-17.629.777.458	813.751.994.176	0,0677
27	LTLS	2017	251.788.000.000	83.090.000.000	5.769.332.000.000	0,0292
		2018	305.450.000.000	128.058.000.000	6.318.441.000.000	0,0281
		2019	302.147.000.000	110.281.000.000	5.863.204.000.000	0,0327
		2020	196.332.000.000	-82.682.000.000	5.524.302.000.000	0,0505
		2021	439.059.000.000	114.229.000.000	6.226.014.000.000	0,0522
28	MPMX	2017	231.277.000.000	-218.148.000.000	9.740.576.000.000	0,0461
		2018	225.502.000.000	4.903.361.000.000	11.943.407.000.000	-0,3917
		2019	733.673.000.000	85.358.000.000	9.563.681.000.000	0,0678
		2020	283.464.000.000	13.804.000.000	9.209.838.000.000	0,0293
		2021	423.834.000.000	10.798.000.000	9.869.734.000.000	0,0418
29	RANC	2017	47.109.826.388	40.192.487.701	804.020.324.861	0,0086
		2018	59.877.255.323	43.085.667.811	904.003.739.438	0,0186
		2019	64.038.406.949	39.987.957.688	952.496.300.846	0,0252
		2020	94.284.369.099	39.987.957.688	1.319.134.443.995	0,0412
		2021	8.515.696.324	-7.046.342.215	1.512.036.014.160	0,0103
30	BAYU	2017	42.496.773.007	41.110.041.532	759.510.011.496	0,0018
		2018	50.997.511.760	42.510.602.202	800.918.912.470	0,0106
		2019	59.314.921.524	49.469.644.064	815.195.083.632	0,0121
		2020	2.871.841.196	-16.243.236.648	692.609.391.235	0,0276
		2021	796.123.137	-12.156.705.891	735.109.129.569	0,0176
31	MNCN	2017	2.415.650.000.000	-54.322.000.000	15.057.291.000.000	0,1640
		2018	994.686.000.000	-139.076.000.000	16.339.552.000.000	0,0694
		2019	1.535.770.000.000	-50.829.000.000	17.152.089.000.000	0,0925
		2020	2.339.661.000.000	-68.761.000.000	18.923.235.000.000	0,1273
		2021	3.212.440.000.000	-171.587.000.000	21.369.004.000.000	0,1584
32	MTDL	2017	468.483.000.000	-13.452.000.000	3.697.416.000.000	0,1303
		2018	579.270.000.000	-4.631.000.000	4.852.776.000.000	0,1203
		2019	716.958.000.000	3.529.000.000	5.625.277.000.000	0,1268
		2020	703.330.000.000	25.383.000.000	5.848.603.000.000	0,1159

No.	Kode Saham	Tahun	Laba Akuntansi	Laba Fiskal	Total Aset	BTD
		2021	983.477.000.000	25.370.000.000	7.588.792.000.000	0,1263
33	BHIT	2017	1.205.454.000.000	2.240.472.000.000	56.523.811.000.000	0,0610
		2018	1.522.284.000.000	1.861.010.000.000	56.421.973.000.000	0,0600
		2019	2.713.548.000.000	1.834.246.000.000	57.613.499.000.000	0,0789
		2020	2.187.197.000.000	1.271.137.000.000	59.484.422.000.000	0,0581
		2021	3.068.632.000.000	1.414.077.000.000	65.006.122.000.000	0,0690
		2017	2.026.069.000.000	-111.908.000.000	27.694.734.000.000	0,0772
34	BMTR	2018	1.782.744.000.000	-225.186.000.000	28.968.162.000.000	0,0693
		2019	2.907.632.000.000	-367.367.000.000	30.154.793.000.000	0,1086
		2020	2.224.285.000.000	-558.784.000.000	32.261.560.000.000	0,0863
		2021	3.056.846.000.000	-526.098.000.000	34.795.776.000.000	0,1030